

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAPPELITBANGDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Padalarang- Ciarua KM.2 Desa Mekarsari - Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

EKSEKUTIF SUMMARY

KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL JEJARING INOVASI DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

(BAPPELITBANGDA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Latarbelakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran serta Landasan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Sebuah daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu untuk terus berkembang. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam mecipatakan daya saing produktif, disinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting karena adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing.

Secara geografis, di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat empat jenis morfologi, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan. Dari luas wilayah keseluruhan, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis yang cenderung sulit memberikan tantangan kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk tetap menyediakan layanan terbaik, baik layanan dasar maupun pembangunan yang mendukung aktivitas sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat membutuhkan beberapa inovasi-inovasi sebagai wujud komitmen dalam meningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

bappelitbangda

Inovasi menunjuk pada adanya perubahan (positif) yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Inovasi bukan semata-mata melahirkan sesuatu yang sama sekali baru, tapi inovasi juga bisa merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari suatu produk karena adanya nilai tambah. Inovasi lahir dari adanya ide/gagasan baru yang berasal dari pengalaman-pengalaman maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wujud dari inovasi adalah terciptanya suatu produk, proses, dan jasa baru yang bermanfaat bagi institusi maupun masyarakat sehingga tercipta kemudahan dan kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia, inovasi dapat meningkatkan daya saing sebagai keunggulan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan.

Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Munculnya era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan perlunya integrasi pelayanan pemerintah sehingga dipandang perlu adanya pengembangan model jejaring inovasi dalam rangka penguatan SIDa. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilah sebesar 2,0966 dengan kategori sedang. Pengukuran IDSD ini terdiri dari 4 aspek yaitu factor penguat/*enabling environment,* sumber daya manusia/*human capital,* faktor pasar/*market, dan ekosistem inovasi.* Dari 4 aspek diatas, aspek ekosistem inovasi memperoleh nilai paling kecil yaitu 0,81.

Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukan sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah. Dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjaan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompentensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memerlukan penataan secara sistemik dan hubungan antar perangkat daerah dan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Pengembangan SIDa menjadi agenda prioritas dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah dan penguatan sistem inovasi nasional Pelaksanaan SIDa.

2. MAKSUD

Maksud dari dilakukannya Kajian Pengembangan Model Jejaring Inovasi Dalam Rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ini adalah *mendapatkan laporan Rencana Aksi yang telah terlaksana, menginvetarisir kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan rencana aksi dan melakukan pendampingan peningkatan fungsi kelembagaan penguatan SIDa.*

3. TUJUAN

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut

1. Terindentifikasinya kondisi SIDa Kabupaten Bandung Barat saat ini;
2. Terindentifikasinya tantangan dan peluang SIDa Kabupaten Bandung Barat;
3. Tersusunnya konsep pengembangan kreativitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berorientasi inovasi;
4. Tersusunnya arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa.

4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari kajian ini adalah untuk mendorong serta memicu pertumbuhan ekonomi serta tercapainya Kajian Pengembangan Model Jejaring Inovasi Dalam Rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

bappelitbangda

5. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 – 2029.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 – 2023.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomer 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

bappeltbangda

B. Pendekatan Dan Metodologi

1. PENDEKATAN

Diperlukan suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan meminimalisasi subjektivitas dalam perumusan objektif/kriteria untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu pengambilan keputusan perlu dibantu untuk menetapkan preferensi dari "*value judgement*" nya atas suatu prioritas objektif /kriteria. Dengan demikian akan mempermudah tahapan selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan yang rasional (***Ciptomulyo, 2000***). Selanjutnya akan dilakukan pemilihan dan perankingan lebih lanjut untuk strategi penetapan tujuan penguatan SIDa, tujuan mana yang akan dituliskan dalam penyusunan kebijakan SIDa dengan metode MCGDM (*Multi Criteria Group Dicision Making*). Pengambilan keputusan konsesus yang kompleks dan menantang dalam pengambilan keputusan secara kelompok (*group*) dan banyak kriteria (*multi criteria*) karena adanya banyak keterlibatan dari beberapa pengambil keputusan, dan sering bertentangan antara satu dengan yang lainnya karena keberadaan subyektif dan ketidaktepatan dalam proses pengambilan keputusan. Maka untuk memastikan keputusan yang efektif, semua kepentingan dan keputusan dalam pengambilan keputusan diwakili oleh tingkat konsesus dalam proses pengambilan keputusan harus dipertimbangkan secara memadai (***Wibowo & Deng, 2013***).

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN SISTEM INOVASI**

Pembelajaran organisasi dan sharing manajemen pengetahuan sebagai prinsip proses terjadinya inovasi. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, pengetahuan telah dilihat sebagai salah satu asset yang berkelanjutan dan perusahaan telah membayar banyak untuk manajemen pengetahuan dan sistemnya. Diantaranya berbagai macam prespektif dari manajemen pengetahuan dan sistem inovasi, pendekatan proses dan penelitian rekayasa. Juga memiliki spesifik keuntungan untuk desain dan inovasi dalam menghindari informasi yang berlebih, meningkatkan nilai penciptaan dan meningkatkan kegunaan dari ilmu pengetahuan (*Xu et al, 2011*)

A. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengatahun mempunyai banyak definisi dalam perkembangannya. Manajemen pengetahuan sabagai sebuah strategi yang terwujud untuk mendapatkan pengetahuan yang benar kepada orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat, dan menempatkan informasi kedalam tindakan yang akan meningkatkan daya saing organisasi. Manajemen pengetahuan adalah proses penciptaan, akuisisi dan transfer pengetahuan yang terefleksikan dalam prilaku organisasi. Demikian pula dalam mempertimbangkan manajemen pengetahuan sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkan dalam organisasi serta memasukannya dalam semua proses organisasi, dalam konteks ini pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu pengetahuan explicit dan tacit (***Alvarez, 2014***).

Goffin dan Hislop dalam Alvarez (2014) menyatakan bahwa pengetahuan tacit adalah pengetahuan pribadi yang dikembangkan dari pengalaman, hal ini ditandai dengan sulitnya untuk di transfer, diproduksi dan diwujudkan. Jenis pengetahuan ini dibentuk oleh ide-ide dan kemampuan menilai, contohnya adalah kecerdasan dari individu karyawan di perusahaan. Sedangkan pengetahuan explicit pengetahuan yang bersifat formal dan dapat dikodifikasikan

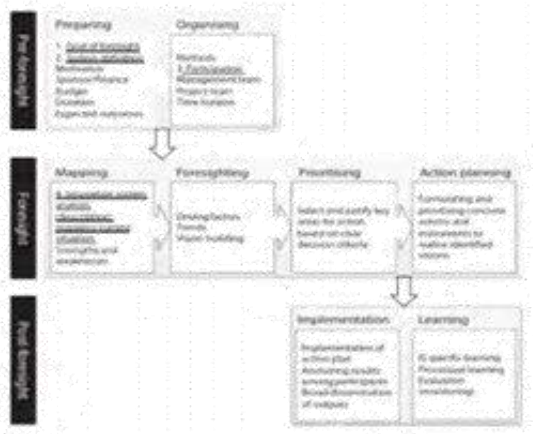
bappeltbangda

dan hasilnya dapat diidentifikasi dan ditransmisikan relatif dengan mudah, contohnya adalah bentuk panduan manual perusahaan. Selain mendefinisikan dua karakter tersebut ***Nonaka & Takeuchi (1995)*** dalam ***Alvarez (2014)*** menunjukan proses manajemen pengetahuan menjadi empat tahapan yaitu sosialisasi, exteriorization, interiorization, dan kombinasi. Dengan cara sosialisasi dan kombinasi ditemukan pengetahuan, lalu kegiatan eksternalisasi dan internalisasi perusahaan digunakan untuk menangkap pengetahuan. Kemudian proses ini menetapkan berbagai kemungkinan pengetahuan untuk dapat diterapkan dalam manajemen melalui rutinitas kegiatan.

B. Inovasi

Inovasi adalah proses mengubah struktur dan meningkatkan kemampuan organisasi, selain itu inovasi kelembagaan yang dapat memperluas intensif pasar untuk kegiatan kewirausahaan dan perdagangan teknologi yang mempunyai ideide, produk, dan praktik baru kedalam domain komersial. Pada daerah seperti geografis, klematologi dan ilmu-ilmu sosial proses inovasi digunakan sebagai sumber daya untuk membuat kegiatan yang lebih produktif untuk meningkatkan kinerja ekonomi (***Yusuf, 2009***).

Berdasarkan perkembangannya ilmu pengetahuan yang termanajemen dengan baik terbukti dapat mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, proses teknologi baru, struktur baru atau sistem administrasi, rencana atau program baru yang berkaitan dengan anggota organisasi. Oleh karena itu inovasi organisasi biasanya diukur oleh tingkat adopsi inovasi (***Liao & Wu, 2010***). Porter dalam ***Andersen (2014)*** menjelaskan bahwa inovasi adalah kejelian dari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan orientasi berpandangan kedepan dan pandangan tersebut berorientasi terhadap teknologi karena tuntutan yang lebih mengutamakan pada kekuatan kontekstual sosial ekonomi, dan berinteraksi dengan kemampuan teknis yang muncul untuk mempengaruhi produk dan jasa yang mempunyai nilai lebih. Foresight (pandangan kedepan) sistem inovasi secara explicit dapat menunjukan kerangka berpikir atau sebagai pondasi teoritis yang dioperasikan dengan pemahaman sistematis, kontekstual dan pengembangan inovasi. Maka dalam proses *foresight* sistem inovasi dapat dikategorikan dalam tiga fase yaitu pre-foresight, foresight, dan post-foresight (**Andersen, 2014**). Dengan konsep perkembangan inovasi berdasarkan pandangan ini maka fase tahapan inovasi tersebut dapat terinterprestasikan seperti sekema pada Gambar B.1 berikut.



Gambar B.1
Fase umum dan langkah dalam pengembangan inovasi kedepan
(***Andersen and Rasmussen, 2010***)

pasca.itb.ac.id

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI SISTEM INOVASI NASIONAL (SINas)**

Istilah Sistem Inovasi Nasional (SINas) pertama kali diciptakan oleh ***Freeman dan Lundvall (1980-an)*** dalam ***Brunner dan Marxt (2013)*** awalnya didefinisikan inovasi sempit dan luas, disamping organisasi dan lembaga yang terlibat dalam mencari dan mengeksplorisasi seperti departemen *Research & Development* (R & D), lembaga teknologi dan universitas. Pandangan sistem inovasi nasional secara luas meliputi divusi, penyerapan dan penggunaan inovasi. ***Balzat et al., (2004)*** juga menyatakan selain R & D upaya oleh perusahaan dan para pelaku bisnis lokal, proses pembelajaran, mekanisme insentif atau ketersediaan tenaga kerja terampil serta interaksi atara organisasi dan lembaga lokal juga termasuk dalam proses terbentuknya sistem inovasi nasional. ***Freeman (1995)*** dalam ***Lu et al., (2014)*** Sistem teknologi adalah jaringan dinamis antar entitas ekonomi didaerah yang bertujuan untuk menciptakan, mengirimkan, dan menerapkan teknologi sebagai sistem inovasi nasional yang mempengaruhi pembangunan secara inovasi. Artinya, sebuah SINas adalah jaringan lembaga disektor publik dan swasta yang kegiatan dan interaksinya sebagai impor, modifikasi, dan menyebarkan teknologi baru. Secara signifikan sistem ini berbeda dari SINas pada tiga perspektif berikut, pertama sistem teknologi menerapkan teknologi baru sementara SINas berfokus pada transmisi dan penerapan teknologi. Kedua, kekuatan teknologi sistem di masing-masing daerah berbeda dalam satu negara. Ketiga, klasifikasi sistem teknologi berbasis pada teknologi daripada batas-batas nasional ***(Lu et al., 2014)***. Tujuan penguatan SINas 2010-2025 di Indonesia, sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 17 tahun 2001 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penguatan SINas bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatan kapasitas inovatif nasional melalui kerangka kerja sistem inovasi. Penguatan SINas harus mampu menjadi salah satu wahana utama pencapaian tujuan pembangunan nasional (Tim BPPT, 2012).



Gambar B.2
Kerangka Strategi Penguatan SINas (Tim BPPT, 2012)

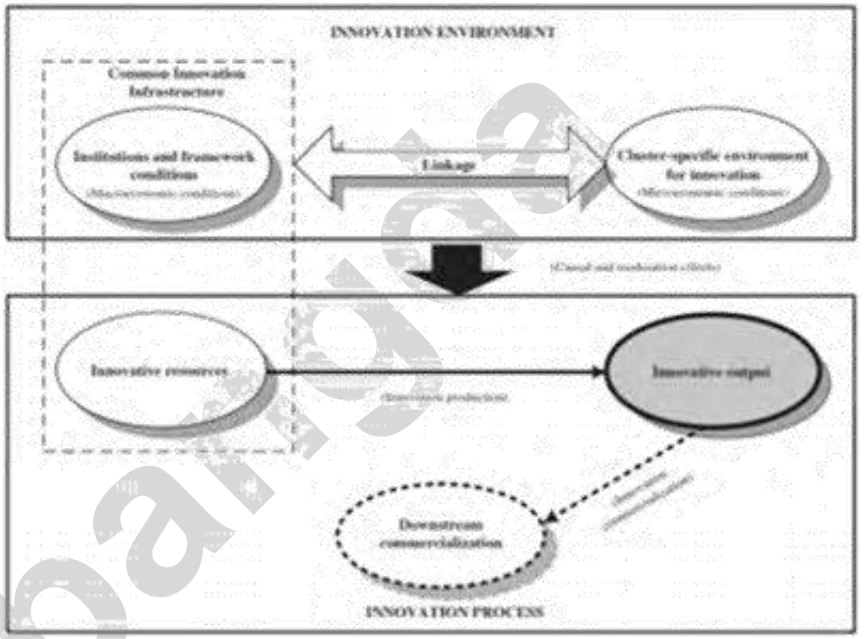
❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)**

Chen dan Guan (2011) dalam pemetaan fungsional pada sistem inovasi daerah di Cina, memperkenalkan penggabungan berbagai fungsional pembangunan dengan penentuan kinerja dari sistem inovasi kedalam integrase aliran kerangka kerja berdasarkan model kerangka kerja ***Romer's*** yang berdasarkan *production function*. Diagram pengetahuan jalur produksi memberikan gambaran yang sederhana untuk proses inovasi

bappeda

dengan pusat pengetahuan tambahan yang dihasilkan dari investasi terutama dalam pembiayaan *Research & Development (R&D)* dan bidang keilmuan *Science / engineering* (***Pakes dan Griliches, 1980***). Selanjutnyan, ***Romer's (1990)*** memunculkan ide pertumbuhan teori secara endogen mengindikasikan bahwa inovasi tidak "jatuh dari langit", tetapi berasal dari ketersediaan sumber daya manusia dan investasi pengetahuan sebelumnya. Terbukti dengan tersimpannya pengetahuan masa lalu dan perkembangan R&D pada sumber daya manusia serta material yang ada, dapat dilihat sebagai prasyarat membentuk proses inovasi dan menghasilkan output yang inovatif (***Chen dan Guan, 2011***).

Edquist dan Hommen (1999) menyatakan pendekatan sistem inovasi lebih mempertimbangkan faktor-faktor penentu kontekstual inovasi dari perspektif berorientasi pada sisi kebijakan permintaan daripada elemen masukan sederhana dari perspektif linier pada kebijakan yang berorientasi penawaran. Pandangan yang lebih sistematik dari proses inovasi secara eksplisit berpotensi dan saling ketergantungan, dan kemungkinan beberapa jenis interaksi antara elemen dari berbagai proses inovasi. Hal ini terlihat dari contoh model keterkaitan yang lebih berorintasi pada sisi permintaan, perspektif seperti ini sangat penting untuk mengevaluasi peran dalam kebijakan publik untuk inovasi instrumen sisi permintaan (***Chen dan Guan, 2011***). ***Doloreux (2002)*** berpendapat bahwa pusat konsep sistem inovasi daerah adalah gagasan *embeddednes*, jelas bahwa gagasan ini sebagian besar berkaitan dengan keterkaitan antara proses produksi inovasi lingkungan dan inovasi kontekstual. Singkatnya, struktur utama dari sistem inovasi yang terintegrasi dapat digambarkan oleh dua kategori interaktif: proses produksi inovasi dan lingkungan inovasi kontekstual, seperti pada Gambar 2.3 (***Chen dan Guan, 2011***).



Gambar B.3

Diagram fungsional kerangka kerja terintegrasi berdasarkan kategori inovasi untuk sistem inovasi daerah

Pada Gambar B.3 menunjukkan bahwa berbagai sumber daya inovatif dasar dan prasyarat untuk inovasi daerah. Sumber daya inovatif terutama mencakup investasi inovatif tambahan dikedua pengeluaran R&D dan keilmuan science/engineering, sebelum adanya pengetahuan komulatif dan diakuisisi pengetahuan eksternal terutama oleh efek spillover/berlebih (***Furman et al., 2002***). Sumber daya yang inovatif dan output yang inovatif bersama-sama membentuk proses inovasi, yang tidak diganti oleh beberapa elemen yang memfasilitasi dalam lingkungan inovasi. Tentu saja lingkungan

bappeltbanda

inovasi tidak hanya fasilitator tetapi penggerak aktif dan penyebab dari sistem inovasi daerah, maka ada hubungan kausal antara lingkungan inovatif dengan output yang inovatif. Hal ini mempengaruhi produktivitas inovasi daerah dan menyebabkan perbedaan antar daerah dalam kapasitas berinovatif (***Fritsch et al., 2007 dalam Chen dan Guan, 2011***).

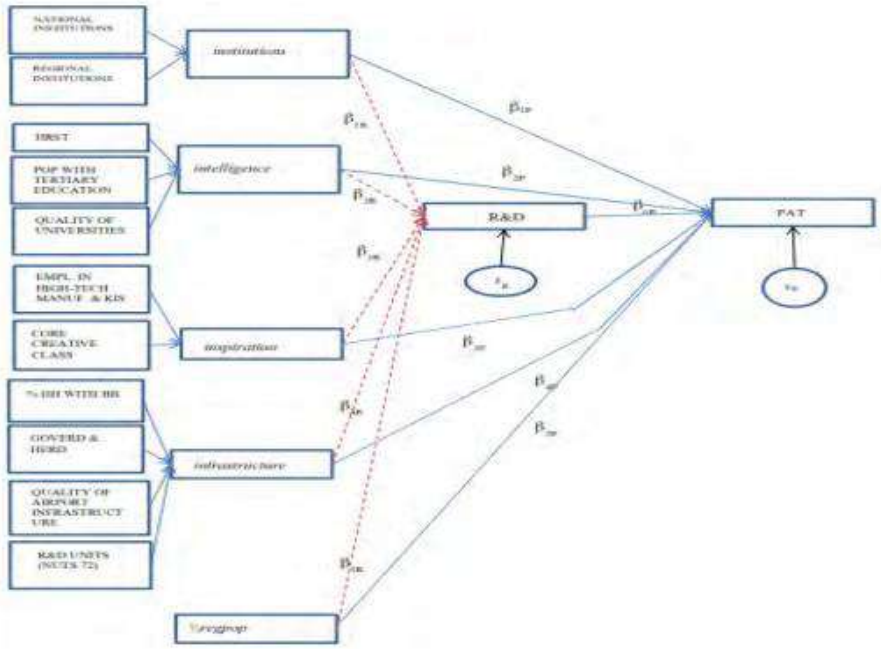
❖ **INOVASI DALAM MODEL KREATIVITAS PENGEMBANGAN DAERAH**

Model pembangunan daerah berdasarkan kreatifitas daerah dibangun diatas kapasitas dan sistem inovasi. ***Sleuwaegen dan Boiardi (2014)*** menetapkan bahwa pembangunan daerah berjalan dengan tiga fungsi proses kreatif interaktif, (i) dampak kewirausahaan (ii) penciptaan inovasi (iii) internasionalisasi. Proses kreatif ini akan menghasilkan pertumbuhan daerah jika didukung oleh unsur dan dasar sistem, yang mengarahkan tiga unsur tersebut pada arah yang benar dan mampu untuk mempertahankan serta terus dikembangkan. Empat faktor yang membentuk pembelajaran dengan kreatifitas adalah lembaga, kecerdasan, inspirasi dan infrastrukur. Masing-masing faktor sangat penting untuk memandu dan mempertahankan proses pembangunan daerah. Sebagai penggerak dasar dari sistem berbeda sesuai dengan tingkatannya seperti jenis-jenis perusahaan, pemilihan lokasi, perluasan kapasitas usaha yang dilakukan dalam suatu daerah. Inovasi ini penting sebagai peningkatan dalam penentuan sistem yang saling mempengaruhi proses kreatif satu faktor dengan faktor yang lainnya. Inovasi memang menjadi faktor yang bisa merangsang kewirausahaan untuk terwujudnya daerah berada pada tahap internasionalisasi (***Wright at al., 2007*** dalam ***Sleuwaegen dan Boiardi, 2014***). Model pembelajaran kreatif sebagai pengembangan daerah oleh ***Sleuwaegen dan Boiardi (2014)*** yang dilakukan diberbagai wilayah di Uni Eropa, menggunakan data-data dasar yang tersedia dimasing-masing daerah. Dengan empat pengukuran yang dianggap berkaitan dan saling menguatkan, untuk dikembangkan dalam R&D di daerah yang menciptakan suatu paten (hak cipta) inovasi yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Empat faktor tersebut meliputi

- ***Institutions (Kelembagaan)***, pengukuran tingkat kelembagaan nasional dan kelembagaan pada tingkat daerah yang terkait dengan sistem inovasi / pengembangan daerah. Kelembagaan yang meliputi hukum, peraturan, sistem peradilan dan langkah-langkah nyata perwujudan secara umum.
- ***Intelligence (Kecerdasan)***, penilaian berdasarkan prosentase tingkat pendidikan masyarakat yang bekerja. Berkaitan dengan sumber daya manusia dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi dari tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan di suatu daerah.
- ***Inspiration (Inspirasi)***, merupakan ukuran dari pekerjaan yang dapat diukur dengan dua faktor yaitu tingkat kreativitas utama dan intensif pengetahuan teknologi tinggi.
- ***Infrastructure (Infrastruktur)***, teknologi dan investasi masyarakat dalam R&D suatu daerah adalah kombinasi dari empat langkah. (i) tingkat umum pada pengeluaran R&D yang berpusat pada penelitian di perguruan tinggi, laboratorium penelitian dan infrastruktur inovasi lainnya. (ii) tingkat agglomeration jumlah unit R&D per 1000 penduduk, yang meliputi jumlah konsultasi, jumlah kantor, serta pusat penelitian umum yang ada. (iii) tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup rumah tangga, sebagai indikator kualitas dan cakupan jaringan komunikasi didaerah. (iv) aksesbilitas global yang mencakup jenis dan jaringan transportasi yang ada didaerah beserta dengan kesiapan dan kinerjanya. Keterkaitan dari empat faktor yang dinyatakan dapat menghasilkan sebuah konsep

bappelitbangda

pembelajaran berbasis kreativitas, dan peran aktif tersebut dapat merangsang pertumbuhan serta keberlangsungan ekonomi daerah dengan adanya badan R&D yang mampu menciptakan inovasi dan paten daerah. Seperti pada Gambar B.4.



Gambar B.4
Diagram alir dari rekursif struktural persamaan sistem penciptaan PAT / Paten (***Sleuwaegen dan Boiardi, 2014***)

❖ ***INTAGIBLE* ASET SEBAGAI PENGGERAK SISTEM INOVASI DAERAH**

Intagible aset semakin dilihat sebagai penggerak penting dalam penciptaan pengetahuan, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Aset ini dapat didefinisikan sebagai semua faktor non-materi yang berkontribusi terhadap kinerja perusahaan-perusahaan dalam produksi barang atau penyediaan jasa, atau yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi untuk individu dan kelompok yang menggerakkan perekonomian (***Eustace, 2000 dalam Kramer et al., 2011***). Studi kasus masalah *Intagible* aset di tingkat daerah, telah banyak ada pada literatur inovasi secara geografi dalam perwujudan regional atau lokalitas. Inovasi saat ini dipandang berkaitan erat dengan lingkungan lokalitas tertentu, karena dapat dilihat bahwa cikal bakal inovasi terdapat pada tingkatan lokal/dasar. Sementara penekanan internasionalisasi dan diversifikasi dari perusahaan multinasional dan lembaga R&D memiliki kegiatan inovasi. Secara signifikan mempengaruhi kesenjangan melalui upaya peningkatan teknologi oleh perusahaan multinasional di daerah, dalam ekonomi yang menggelobal, terkait dengan lokasi lain di luar batas-batas nasional (***Kramer et al., 2011***). *Intagible* aset ditingkat sub-nasional / daerah, pada sebuah penelitian memiliki tiga isu utama yaitu (***Kramer et al,. 2011***),

1. Inovasi yang merupakan proses interaktif antara aktor dan lembagalembaga publik serta lembaga swasta.
2. Sistem daerah didefinisikan dalam konteks yang spesifik dimana jaringan antara aktor dan lembaga bertindak dan berinteraksi untuk menghasilkan, mentransfer, memodifikasi dan menyebarkan pengetahuan serta teknologi yang baru.
3. Seluruh proses ekonomi dan pengetahuan yang dibuat didalam dan diluar perusahaan-perusahaan yang tertanam dilingkungan setempat

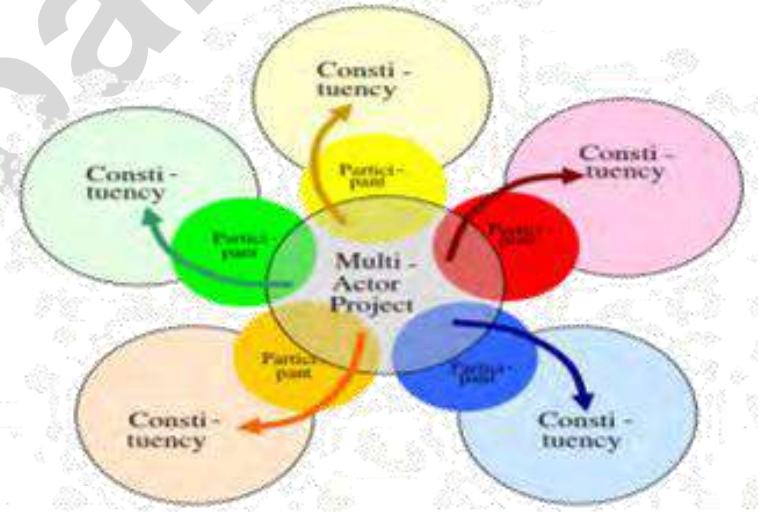
bappeda.jatimprov.go.id

❖ PEMBELAJARAN SOSIAL *PADA* JARINGAN INOVASI DAERAH

Pembelajaran sosial dalam jaringan inovasi multi-aktor semakin dianggap sebagai prasyarat penting untuk mengatasi keberlanjutan dalam konteks pembangunan daerah. Pembelajaran sosial dipandang sebagai cara yang memungkinkan untuk para pemangku kepentingan dalam mengambil keuntungan dari keragaman pada kepentingan perspektif dan nilai-nilai untuk menghasilkan praktik dan kebijakan yang lebih berkelanjutan (***Sol et al., 2013***). Sebuah daerah dapat dilihat sebagai kawasan yang lebih kecil dari sebuah bangsa yang memiliki identitas dengan batasan administratif tersendiri, dengan karakteristik ekonomi, sosial, budaya atau komponen lengkap yang endogen (***Martens et al., 2010*** dalam ***Sol et al., 2013***). Dalam proses pembangunan daerah yang berbeda (kelompok) pelaku sering memiliki keinginan yang berbeda dari gambaran apa yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah daerah.

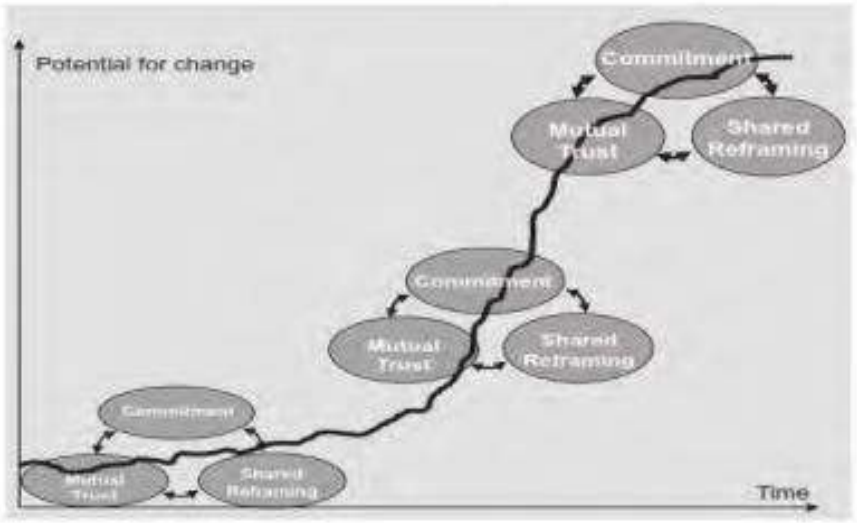
Keunggulan kompetitif nyata dari jaringan inovasi daerah didasarkan pada kemampuan seluruh stakeholder untuk menciptakan pengetahuan dalam proses pembelajaran kolektif dan interaktif (***Sol et al., 2013***) Pembelajaran multi-aktor memiliki konsep pembelajaran sosial secara eksplisit, oleh karena itu awalnya akan terasa rumit dan lama pada beberapa latar belakang konsep pembelajaran. Seperti konsep pembangunan sosial, penggambaran pada organisasi pendidikan dan teori pembelajaran, sebelum pada akhirnya dapat fokus pada proses pembelajaran sosial itu sendiri. Proses belajar adalah kemampuan untuk berorganisasi, membangun pengalaman dan sosial di lingkungan. ***Vygotsky (1978)*** dalam Sol et ***al., (2013)***, menyatakan tentang pengembangan individu "setiap fungsi dalam anak perkembangan budaya muncul dua kali" pertama pada tingkat sosial dan kemudian pada tingkat individu, pertama antar orang ke orang (interpsychological) dan kemudian didalam anak itu sendiri (*intrapsychological*).

Pendekatan ini menekankan bahwa belajar adalah suatu proses interaktif sosial, terlepas apakah itu individu atau sosial. Konsep interaksi pembelajaran sosial yang dibentuk oleh Sol et al., (2013) terlihat seperti pada Gambar E.5 yang menyajikan sebuah gagasan proyek inovasi yang meliputi multi-aktor melalui para anggota stakeholder yang terkait dan pemilihan daerah yang dimiliki. Dimana konsep pembelajaran sosial ini (Gambar E.6) menghasilkan tingkat kepercayaan, komitmen dan peninjauan kembali adalah sebuah pembelajaran yang bisa terus menerus dihasilkan oleh masing-masing individu dalam pengembangan sosial sebagai penunjang keberhasilan pengetahuan inovasi daerah.



Gambar B.5
Keterkaitan Multi-aktor dalam Pembelajaran Sosial (***Sol et al., 2013***)

bapeltanah

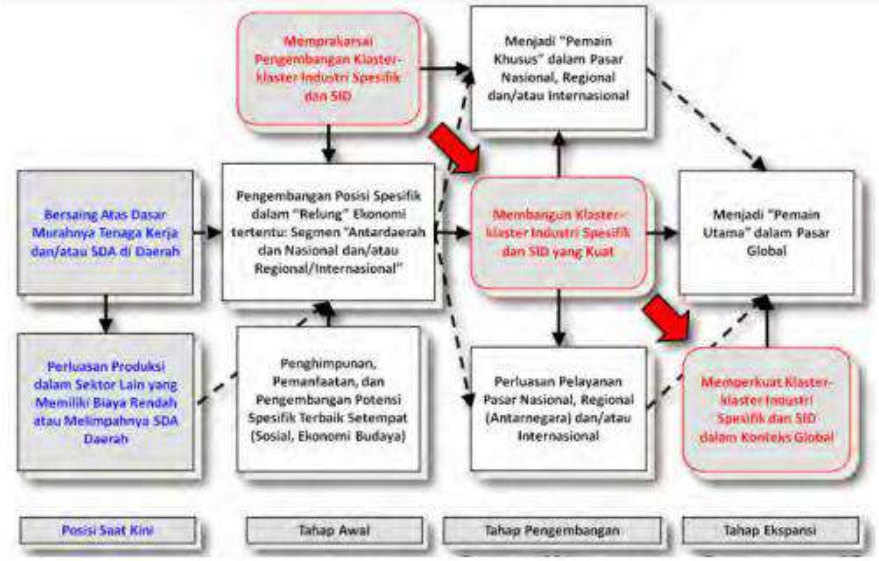


Gambar B.6
Potensi Peningkatan dalam Pembelajaran Sosial (***Sol et al., 2013***)

- **FOKUS PRIORITAS PENGUATAN SIDa DI INDONESIA**

  Dewasa ini semakin disadari bahwa pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari pembangunan daerah, ketimpangan perkembangan wilayah secara nasional merupakan pelajaran penting dimana pembangunan nasional yang terlalu terpusat dengan mengandalkan indikator makro nasional mengakibatkan pola pembangunan yang tidak merata. Demikian pula halnya dengan penguatan SINas, perkembangan dewasa ini semakin memperkuat pentingnya pergeseran fokus dari tingkat nasional pada tingkat daerah. Dengan beberapa pertimbangan sepertihalnya kesadaran bahwa kedekatan spasial memudahkan banyak pihak untuk saling berbagi pengetahuan yang tacit dan kapasitas untuk pembelajaran secara lebih terlokalisasi. Inovasi (selain yang bersifat teknokratik, juga organisasional dan institusional) sering terjadi dalam konteks institusional, politis dan sosial tertentu yang mendukung dan bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu. Pembelajaran yang terlokalisasi terfasilitasi oleh sehimpunan kelembagaan daerah yang serupa. Ini misalnya karena lebih kuatnya dukungan kelembagaan (dalam arti luas) dalam mengembangkan agenda bersama. Ini tentu sangat penting dalam mendorong sinergi positif dan eksternalisasi ekonomi. Perusahaan yang berklaster di suatu daerah memiliki kesamaan budaya daerah yang memudahkan proses pembelajaran. Warisan budaya yang positif dan kecenderungan sifat path dependence tentang pengetahuan/teknologi dan inovasi turut mempengaruhi proses interaksi yang lebih intensif ditingkat lokal (Tim BPPT, 2012).
  Dengan demikian penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan komponen penting dalam penguatan SINas yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas. Tahapan generik dari startegi ini dapat dilihat pada Gambar E.7. Dengan kata lain Strategi penguatan SIDa memiliki dua substansi pokok yakni pengembangan kapasitas inovatif daerah (penguatan pilar-pilar sistem inovasi daerah) dan penguatan klaster spesifik daerah. Kedua substansi pokok tersebut mencerminkan integrasi tataran makro dengan tataran mikro (industrial) sehingga strategi penguatan sistem inovasi daerah dapat dikatakan strategi tingkat meso. Dalam kaitannya dengan pengembangan koridor ekonomi MP3EI, maka penguatan sistem inovasi daerah dapat menjadi wahana yang mensinergikan fokus pengembangan koridor ekonomi yang ditetapkan pada tataran nasional dengan fokus/tema prioritas daerah dalam suatu kerangka kerja yang sistematis dan kolaboratif (Tim BPPT, 2012).

bapplitbang



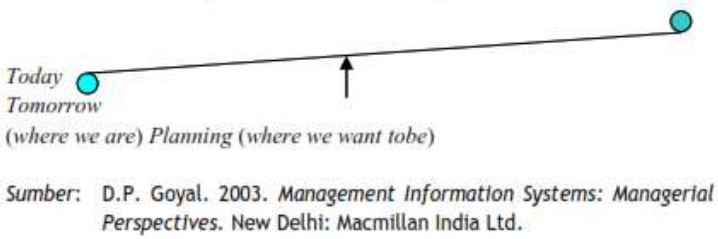
Gambar B.7
Kerangka Umum Pengembangan SIDa (Tim BPPT, 2012)

A. Manajemen

Istilah Manajemen telah didefinisikan secara beraneka ragam menurut berbagai aliran yang berbeda. Salah satu definisi manajemen yang sering digunakan dan sudah diterima secara luas adalah definisi yang dikemukakan oleh ***Koontz***. Menurut ***Koontz*** seperti yang dikutip ***Goyal*** (2003), Manajemen merupakan seni untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dilakukan melalui dan dengan orang lain di dalam kelompok-kelompok yang terorganisir secara formal ("*Management is the art of getting things done through and with the other people informally organised groups*"). Definisi Manajemen dari ***Koontz*** di atas sebenarnya ingin menegaskan bahwa seorang manajer dalam organisasi untuk mencapai atau memperoleh sesuatu bukanlah melalui tongkat ajaib (*a magic stick*), melainkan melalui pelaksanaan sejumlah fungsi berbeda oleh seorang manajer dalam suatu cara yang sistematis. Fungsi-fungsi dasar yang harus dilakukan seorang manajer dalam suatu organisasi itulah yang kemudian dikenal sebagai fungsi-fungsimanajerial (*manajerial functions*). Apa sajakah yang menjadi fungsi-fungsi dasar yang harus dijalankan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini. Fungsi-fungsi Manajerial (*Managerial Functions*) Umumnya fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa fungsi dasar sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*).

Menurut **Goyal** (2003), Perencanaan adalah suatu proses untuk merumuskan atau memperkirakan apa yang akan dilakukan di masa depan ("*Planningis a process of foreseeing the future inadvance*"). Fungsi perencanaan sesungguhnya berperan untuk menjembatani perbedaan atau kesenjangan (gap) antara kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang, seperti yang diungkapkan oleh Goyal pada gambar di bawah ini.



Sumber: D.P. Goyal. 2003. *Management Information Systems: Managerial Perspectives*. New Delhi: Macmillan India Ltd.

Gambar B.8 Fungsi Perencanaan

bapelitbang

Karena perencanaan merupakan suatu perumusan dari sejumlah tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan maka perencanaan yang baik pada dasarnya harus dapat menjawab beberapa pertanyaan pokok yaitu:

- Apa yang akan dilakukan? (What).
- Bagaimana melakukannya? (How).
- Mengapa sesuatu harus dilakukan? (Why).
- Dimana harus dilakukan? (Where).
- Kapan harus dilakukan? (When).
- Siapa yang akan melakukan? (Who).

Sebagai perencana yang baik, seorang manajer harus mempunyai pandangan yang cukup luas dan jauh ke depan. Rencana yang baik tentu saja harus mencakup persoalan 5 W dan 1 H di atas. Mengenai pertanyaan ***What*** yang dipersoalkan adalah tentang apa, dalam hal ini menjawab tentang tujuan apa yang hendak dicapai atau kegiatan apa yang akan dilakukan dalam suatu rencana. Selanjutnya, yang perlu dijawab adalah pertanyaan ***How*** yaitu bagaimanakah cara yang sebaikbaiknya harus dijalankan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau sudah diketahui apa yang menjadi tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya maka persoalan berikutnya adalah menjawab pertanyaan tentang ***Why*** yaitu berkaitan dengan persoalan mengapa suatu kegiatan perlu dilakukan. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan lain yang juga perlu dijawab adalah ***Where*** dan yang menunjukkan di mana dan kapan rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Terakhir sampailah pada pertanyaan ***Who*** yaitu berkenaan dengan penentuan siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Lazimnya, rencana-rencana yang dibuat manajer berkaitan dengan penetapan berbagai tujuan dan sasaran organisasi yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur, aturan, program, anggaran, strategi, dan jadwal kegiatan untuk mencapai rencana tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian, dalam fungsi perencanaan kegiatan manajer adalah merumuskan tujuan organisasi, menentukan arah tindakan bagi organisasi serta menetapkan langkah langkah strategis guna mencapai tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Goyal (2003) mendifinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses pengidentifikasian keseluruhan pekerjaan organisasi, pembagian pekerjaan ke dalam bentuk tugas-tugas yang lebih rinci, pengalokasian bidang pekerjaan kepada setiap orang/kelompok serta pendelegasian wewenang kepada setiap orang agar dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana yang telah direncanakan ("*Organising is the process of identifying the entire job, dividing the job into convenient subjects/tasks, allocating sub-jobs to person/group of persons and delegating authority to each so that the job is carried out as planned*"). Dalam pengorganisasian, kegiatan manajer adalah mengatur atau menata berbagai kegiatan dalam organisasi supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur kewenangan dan rantai komando, pembentukan unit-unit kerja (bagian-bagian dalam organisasi), penempatan pegawai dalam satuan-satuan organisasi, dan sebagainya.

3. Penempatan Pegawai (*Staffing*).

Penempatan Pegawai (*Staffing*) menurut **Goyal** (2003, hal. 6) merupakan proses menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat ("*Staffing is the process of putting the right person at the right job*"). Dalam fungsi ini, kegiatan manajemen antara lain: merumuskan persyaratan yang

pamelitbangda

harus dipenuhi oleh setiap orang untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan, menyeleksi orang-orang yang tepat untuk posisi tertentu serta melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai agar mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efektif. Fungsi penempatan pegawai pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan fungsi pengorganisasian, manakala fungsi pengorganisasian lebih memfokuskan perhatiannya pada struktur dan proses dari pengalokasian pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sedangkan fungsi penempatan pegawai lebih menitikberatkan perhatiannya pada orang-orang dalam pekerjaannya. Jadi, pengorganisasian adalah fungsi yang berorientasi pada pekerjaan (*job-oriented*), sedangkan penempatan pegawai (*staffing*) merupakan fungsi yang berorientasi pada pekerja (*worker-oriented*).

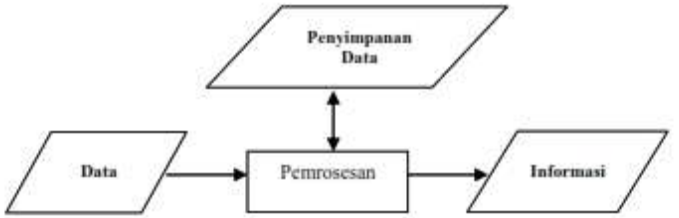
4. **Pengarahan (*Directing*)**
   Fungsi pengarahan termasuk fungsi manajemen yang penting karena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, orang-orang dalam organisasi perlu dibimbing, diarahkan, dan didorong atau digerakkan oleh manajer ke arah pencapaian tujuan organisasi. Menurut pakar filosofi manajemen modern (**Goyal: 2003**, hal. 6), fungsi pengarahan mencakup 3 (tiga) kegiatan utama yaitu komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan.
5. **Pengendalian/Pengawasan (*Controlling*).**
   Pengawasan atau pengendalian pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan. Kedua fungsi manajemen tersebut seringkali diibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang. Pengawasan dibutuhkan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Walaupun suatu rencana sudah dibuat secara matang belum tentu dapat menjamin untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan tanpa adanya pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan dari rencana tersebut. Dalam fungsi pengawasan/pengendalian (**Kumorotomo dan Margono: 1998**, hal. 13), kegiatan manajer adalah mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai organisasi telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dan penyimpangan akan ditetapkan pula cara-cara untuk mengatasinya. Menurut **Goyal** (2003, hal. 6) fungsi pengawasan merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa kegiatan yaitu a) Menetapkan standar untuk mengukur kinerja (*performance*) dari suatu pekerjaan. b) Mengukur kinerja yang aktual. c) Membandingkan kinerja yang aktual dengan standar dan berusaha menemukan penyimpangan apabila ada. d) Mengambil tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam menjalankan setiap fungsi manajemen di atas, seorang manajer pada dasarnya selalu dihadapkan pada kegiatan pengambilan berbagai jenis keputusan. Sebagai contoh, dalam fungsi perencanaan, seorang manajer perlumemutuskan apa yang menjadi tujuan dari rencana yang dibuat dan bagaimana cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian atau pembagian pekerjaan. Begitu pula halnya dengan fungsi staffing, manajer harus mengambil keputusan untuk menetapkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Pendek kata, semua fungsi manajemen akan selalu berhadapan dengan kegiatan pengambilan keputusan. Seperti yang dikutip **Goyal** (2003, hal.7) dari ucapan ***Peter Drucker*** yang mengatakan bahwa "apa pun yang dikerjakan oleh seorang manajer, akan dilakukannya melalui pengambilan keputusan" ("*Whatever a manager does, he*

bahan terbitan non

does itthrough decision making"). Dalam rangka memahami lebih jauh konsep manajemen, terutama dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen.

B. Informasi

Informasi merupakan komponen kedua yang terdapat dalam konsep Sistem Informasi Manajemen yang penting untuk diketahui dalam upaya memahami batasan dari konsep Sistem Informasi Manajemen. Informasi sering dipandang sebagai suatu sumber daya yang bernilai (*a valuable resource*) yang dibutuhkan manajemen dalam rangka menjalankan organisasi. Dalam praktik, kebanyakan orang seringkali mengartikan informasi dalam pengertian yang sama dengan data. Namun, dalam kajian ilmiah atau bagi kaum profesional, dua istilah tersebut sesungguhnya mengandung pengertian dasar yang berbeda. Menurut ***Kumorotomo dan Margono*** (1998, hal.10) Data merujuk kepada fakta-fakta, baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu dan semacamnya. Ciri pokok dari suatu data adalah adanya fakta. Sebagai contoh: nomor telepon seluruh penduduk di suatu kota yang lazimnya terdapat dalam buku halaman kuning, Nomor Induk seluruh mahasiswa di sebuah perguruan tinggi/universitas, daftar Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tercatat di BAKN, jadwal keberangkatan dan kedatangan Kereta Penumpang di sebuah stasiun kereta dan sebagainya. Apabila data tersebut sudah disaring dan diproses (diolah) melalui suatu sistem pemrosesan sehingga memberikan nilai dan memiliki arti bagi orang yang menerimanya maka data itu sudah berubah fungsinya menjadi informasi. Contohnya adalah ketika seseorang menghubungi petugas loket di stasiun kereta untuk melihat dan menanyakan jalur kereta kelas eksekutif pada hari tertentu menuju ke suatu kota lengkap dengan keterangan tentang berapa tempat duduk yang masih tersisa, kapan jam kedatangan, dan keberangkatan kereta serta berapa harga karcis/tiketnya maka hal-hal yang ditanyakan itu adalah informasi. Dengan demikian, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pada saat ini atau mendatang. Seperti yang diungkapkan oleh ***Goyal*** (2003, hal.9) tentang definisi umum dari informasi sebagai berikut. "*Information is data that is processed and is presented in a form which assists Decision Makers. It may contain an element of surprise, reduce uncertainty or provoke a manager to initiate an action*". Berbeda dengan datamaka informasi pada dasarnya mengandung unsur kejutan (surprise), dapat mengurangi ketidakpastian, dan dapat mengarahkan seseorang (seorang manajer) untuk mengambil suatu tindakan. Sebaliknya, data umumnya tidak mempunyai nilai „*surprise*" (tidak memberikan sesuatu yang baru) bagi seseorang, belum terorganisir, dan tidak menambah apa pun terhadap pengetahuan seseorang. Hubungan antara data dengan informasi adalah seperti bahan baku sampai barang jadi sebagaimana terlihat pada diagram berikut.

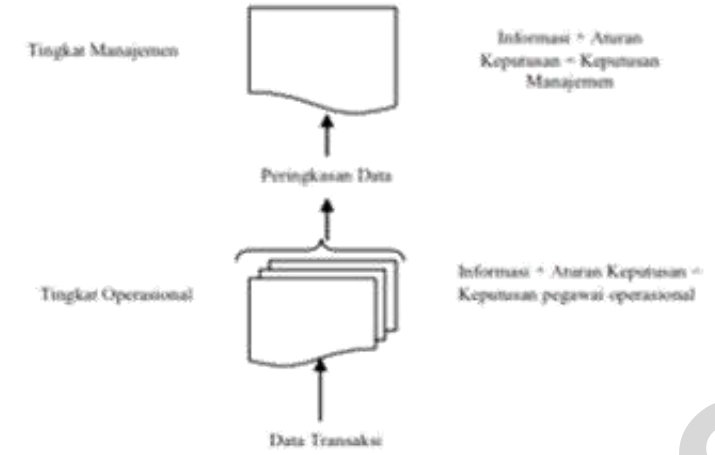


Sumber: Gordon B. Davis. 1992. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Bagian I: Pengantar. terjm. Andreas S. Adiwardana. Jakarta: PT. Gramedia.

Gambar B.9 Transformasi Data Menjadi Informasi

pdfelitheng.id

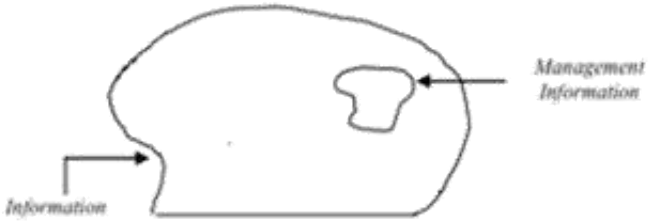
Gambar di atas memperlihatkan bahwa sistem informasi manajemen mengolah data menjadi informasi, atau lebih tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi bentuk informasi yang bermanfaat dan bernilai bagi penerimanya. Akan tetapi, konsep data dan informasi merupakan sesuatu yang sifatnya relatif. Analogi bahan baku (*raw material*) terhadap barang jadi (*finished product*) dapat diartikan bahwa informasi bagi seseorang mungkin masih dipandang atau dianggap data mentah oleh orang lain, dan sebaliknya data mentah bagi satu pihak mungkin sudah dianggap informasi bagi pihak lainnya.



Sumber: Gordon B. Davis. 1992. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Bagian I: Pengantar. terjm. Andreas S. Adiwardana. Jakarta: PT. Gramedia.

Gambar B.10
Data Bagi Suatu Tingkat Organisasi Mungkin Berupa Informasi Bagi Tingkat Lainnya

Dalam konteks Sistem Informasi Manajemen, pengertian informasi mempunyai penekanan yang berbeda dengan definisi umum informasi. Informasi yang disajikan oleh Sistem Informasi Manajemen adalah informas yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam rangka pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini diistilahkan oleh ***Goyal*** (2000, hal 11) sebagai informasi manajemen (*Management Information*). Jadi, Sistem Informasi Manajemen harus menyajikan „informasi manajemen" yang dibutuhkan oleh para manajer untuk pengambilan keputusan. Informasi Manajemen itu sendiri menurut ***Goyal*** (2003, hal.11) merujuk pada kualitas dari informasi, dalam arti tepat waktu, akurat, lengkap, relevan, eksplisit, dan sebagainya. Hubungan antara informasi dan informasi manajemen dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:



Sumber: D.P. Goyal. 2003. Management Information System: Managerial Perspective: NewDelhi: Macmillan India Ltd.

Gambar B.11
Relation of Informationand Management Information

Pada gambar diatas jelas terlihat bahwa cakupan informasi jauh lebih luas daripada informasi manajemen karena pada hakikatnya informasi yang diterima oleh organisasi jumlahnya

bappelitbangda

sangat banyak dan tidak terbatas, namun informasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh level manajemen mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan informasi yang dapat diterima oleh organisasi. Untuk itu, dapat kiranya dikatakan bahwa informasi manajemen adalah bagian dari keseluruhan informasi yang dimiliki atau diterima organisasi, manakala informasi manajemen bukanlah sembarang informasi melainkan informasi yang terpilih, dalam arti informasi yang memiliki persyaratan kualitas sebagaimana yang diinginkan oleh level manajemen dalam rangka pengambilan keputusan organisasi yang rasional dan logis.

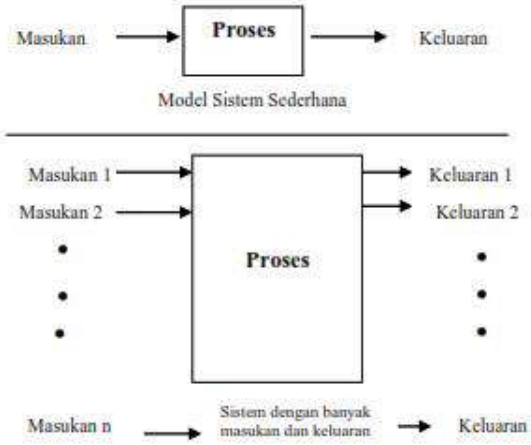
C. Sistem

Komponen berikutnya yang perlu dibahas dalam rangka memahami batasan dari Sistem Informasi Manajemen adalah konsep Sistem. Secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. (***Kumorotomo dan Margono: 1998, hal. 8***). Sementara itu, dalam pengertian yang hampir sama, Goyal (2003, hal.12) mengartikan sistem sebagai seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, tempat elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu dengan yang lainnya. Setiap sistem pada dasarnya dibangun atau terdiri atas subsistem-sub sistem. Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh suatu organisasi bisnis, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem, manakala berbagai bagian yang terdapat dalam organisasi bisnis tersebut (divisi, departemen, unit, dan sebagainya) adalah subsistem-subsistem dari organisasi bisnis sebagai suatu sistem. Teori Sistem Umum (*The General System Theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Boulding lebih menekankan pada pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. (***Kumorotomo dan Margono: 1998, hal.8***).

Namun dalam praktik organisasi, kecenderungan yang seringkali terjadi adalah bahwa seorang pemimpin terlalu memusatkan perhatiannya pada salah satu komponen saja dari sistem organisasi secara keseluruhan.

Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk sistem (organisasi) adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh agar pimpinan dapat bertindak lebih efektif. ***Kumorotomo dan Margono (1998, hal.9***) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur atau komponen pembentuk organisasi disini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lainlainnya. Seperangkat elemen dari suatu sistem dapat pula dipahami melalui model sistem yang umum (*the general model of a system*) yang terdiri atas 3 (tiga) elemen utama, yaitu input, proses, dan output. Sebuah sistem dapat memiliki satu atau banyak input, manakala input-input tersebut akan diolah atau diproses melalui suatu proses transformasi yang akan mengubah input menjadi output (***Goyal:2003, hal.12***).

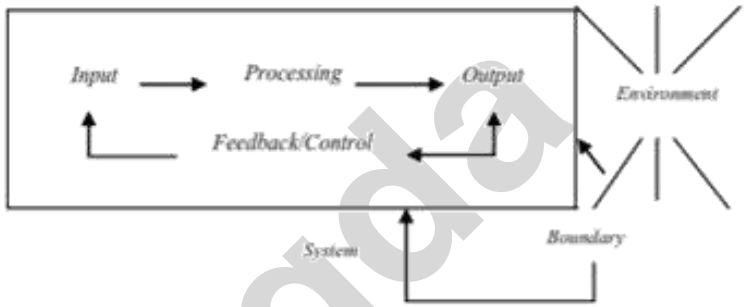
pascasarjana



Sumber: Gordon B. Davis. 1992. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Bagian I: Pengantar. terjm. Andreas S. Adiwardana, Jakarta: PT. Gramedia.

Gambar B.12
Model Umum Sebuah Sistem
The General Model of a System

Sebuah sistem umumnya tidak dapat hidup atau berada dalam kekosongan (vakum), melainkan sistem hidup dan berfungsi dalam suatu lingkungan tertentu. Akan tetapi, sistem dapat dibedakan dari lingkungannya melalui batas-batas (*boundary*) yang dimilikinya. Bagaimana keterkaitan antara sistem dengan lingkungannya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Sumber: D.P. Goyal. 2003. *Management Information System: Managerial Perspective*. NewDelhi: Macmillan India Ltd.

Gambar B.13 *A System with Boundary and Environment*

Beberapa sistem mungkin berada dan saling berbagi dalam lingkungan yang sama. Sementara beberapa sistem lainnya yang berada pada lingkungan yang berbeda mungkin akan saling berinteraksi melalui "*interface*" atau jalinan. Menurut ***Davis (1992, hal. 69***) *Interface* adalah saluran atau media yang digunakan untuk saling berhubungan dan berinteraksi di antara sistem atau sub-sistem. Sebuah sistem yang mengadakan interaksi dengan lingkungannya serta melakukan pertukaran input dan output sering dikenal sebagai sistem terbuka (*open system*). Sedangkan, sistem yang sama sekali tidak melakukan interaksi atau pertukaran input dan output dengan lingkungannya disebut sistem tertutup (*close system*).

bappelitbangda

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI SISTEM TERINTEGRASI**

Menurut ***Davis (1992, hal.4)***, sebuah sistem yang terpadu atau terintegrasi didasarkan pada asumsi bahwa harus ada integrasi antara data dan pengolahan, ketika integrasi data tersebut dapat dicapai melalui penggunaan data base. Sementara itu, ***Kountur (1996, hal.11)*** mendefinisikan sistem yang terintegrasi sebagai suatu sistem pengolahan data yang terpusat, manakala data tersimpan dalam suatu pusat penyimpanan data dan dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Pengolahan yang terpadu sesungguhnya dapat dicapai melalui sebuah perencanaan sistem secara menyeluruh. Lazimnya, sistem informasi dirancang sebagai suatu gabungan beberapa subsistem dan bukan sebagai sebuah sistem tunggal. Perancangan sistem ini dapat berupa sebuah komputer pusat besar atau dapat pula merupakan sebuah jaringan kerja dari beberapa komputer kecil dengan gagasan pokoknya adalah paduan yang terencana dari berbagai aplikasi yang layak dan efektif.

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI SISTEM MANUSIA - MESIN YANG BERBASIS KOMPUTER (*COMPUTER BASEDUSER - SYSTEM*)**

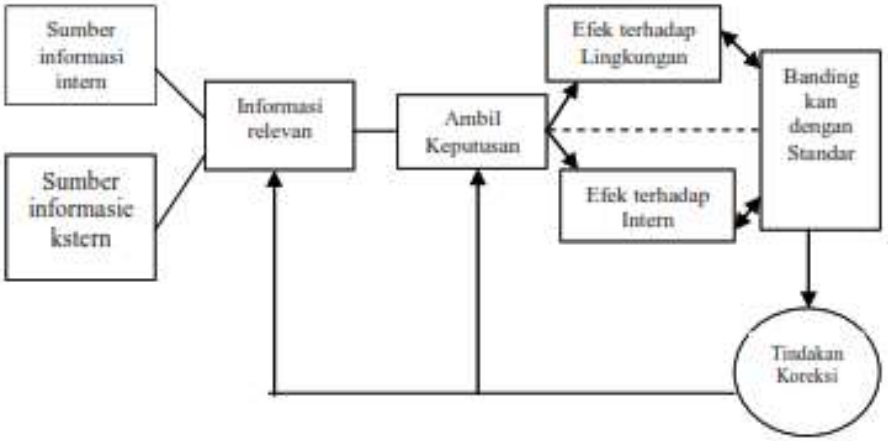
Secara konseptual, sistem informasi manajemen dapat saja beroperasi tanpa dukungan komputer, namun kekuatan komputer membuat system informasi manajemen menjadi lebih feasible (layak). Teknologi komputer dapat melakukan pengolahan data lebih cepat, akurat dan dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan pokok di sini bukanlah pada persoalan apakah teknologi komputer harus digunakan atau tidak dalam sistem informasi manajemen, melainkan lebih pada persoalan informasi manakah yang butuh untuk dikomputerisasikan. Konsep sistem manusia-mesin dalam Sistem Informasi Manajemen pada hakikatnya menegaskan bahwa beberapa pekerjaan atau tugas organisasi adalah lebih baik bila dilakukan oleh manusia, sementara tugas yang lainnya akan lebih tepat bila dikerjakan dengan mesin atau teknologi komputer. Untuk beberapa kasus, manusia (*user*) dan komputer membentuk sebuah sistem kombinasi yang hasilnya diperoleh melalui satu set interaksi antara komputer dengan user. Di sini pada dasarnya telah terjadi atau berlangsung komunikasi antara user dengan komputer. *User* mengetik beberapa perintah ke dalam komputer melalui *keyboard* dan segera setelah itu, hasilnya akan tampak pada layar komputer. *User* dari sistem informasi manajemen adalah orang yang bertanggung jawab untuk meng-input data, memberikan instruksi pada sistem, atau yang menggunakan (membutuhkan) output informasi dari sistem. Karena sistem informasi manajemen merupakan sistem interaksi antara manusia dengan mesin maka manusia (*user*) akan selalu berhadapan dengan mesin (komputer). Oleh karena manusia sering berhadapan dengan Komputer maka dalam merancang sistem informasi manajemen kenyamanan user perlu pula diperhatikan. Karakteristik sistem manusia-mesin berbasis komputer dari sistem informasi manajemen sesungguhnya memengaruhi persyaratan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pengguna sistem maupun oleh pengembang sistem. Konsep "*Computer-based*" (berbasis komputer) mengandung arti bahwa perancang atau desainer sistem informasi manajemen harus memiliki pengetahuan tentang teknologi komputer serta bagaimana menggunakan teknologi tersebut dalam pemrosesan informasi. Sedangkan konsep "*user-machine*" (manusia-mesin) berarti bahwa perancang sistem harus juga memahami kemampuan manusia sebagai salah satu komponen dari sistem (sebagai pengolah informasi) serta perilaku manusia sebagai pengguna informasi. Aplikasi sistem informasi sebenarnya tidak menuntut para pengguna (users) menjadi seorang yang ahli dalam bidang komputer, akan tetapi user lebih dituntut untuk

pappelitbang.com

mampu menentukan spesifikasi kebutuhannya terhadap informasi, mengerti sedikit tentang komputer, dan sifat informasi serta memahami penggunaan informasi dalam berbagai fungsi manajemen sehingga pada akhirnya dapat membantu user dalam pelaksanaan tugas-tugasnya (***Davis, 1993:8***).

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI YANG MENGHASILKAN ATAU MENYAJIKAN INFORMASI**

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ***Goyal (2000:18)*** maka tujuan utama dari dibangunnya Sistem Informasi Manajemen oleh suatu organisasi adalah untuk menghasilkan atau memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam pengambilan keputusan (*MIS is set up by an organization with the prime objective to obtain management information to be used by its managers in decision making*) atau dengan kata lain, tujuan utama dari Sistem Informasi Manajemen tersebut adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian/penyediaan informasi. Sehubungan dengan hal di atas maka yang menjadi tantangan terbesar bagi Sistem Informasi Manajemen yang efektif dan efisien adalah berkaitan dengan kemampuan Sistem Informasi Manajemen untuk a. menghasilkan jenis dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi, khususnya oleh level manajemen; b. menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan serta mudah dipahami oleh pimpinan organisasi (*user*). Informasi yang baik adalah informasi yang mempunyai persyaratan kualitas, seperti lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya, dan up to-date(terkini); Satu cara yang banyak membantu agar perancangan dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dapat efektif dan efisien adalah dengan memandang informasi sebagai sumber daya yang esensial bagi organisasi sepanjang menyangkut uang, personalia, perlengkapan, peralatan, dan fasilitas lainnya. Dengan menempatkan informasi sebagai sumber daya yang esensial maka efisiensi kerja dalam organisasi dapat dicapai. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen pun dapat membantu menjembatani antara perencanaan dan pengendalian dalam organisasi seperti yang tampak pada gambar di bawah ini.



Sumber: Ibnu Syamsi. 1995. Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, Jakarta: Bumi Aksara.

Gambar B.14
Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Penyajian Informasi untukMenjembatani Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Organisasi

❖ **PENDEKATAN KONSEP TEORI YANG MENDUKUNG FUNGSI OPERASI**

Sistem pengolahan informasi yang sudah canggih (mutakhir) sekali pun masih tetap harus melayani pengolahan transaksi.

bapelitbang

Pada praktiknya, pengolahan transaksi, seperti daftar gaji, penjualan, piutang, rekrutmen karyawan, dan sebagainya, menyajikan masukan bagi "data base" yang vital untuk penerapan selanjutnya dalam organisasi. Peran Sistem Informasi Manajemen dalam mendukung fungsi operasi adalah dengan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian organisasi/perusahaan sehari-hari. Misalnya, informasi yang mendukung pengendalian biaya, informasi yang mendukung pengendalian kualitas menyeluruh atau total quality control, dan informasi yang mendukung peningkatan penjualan. Kecenderungan dalam mendukung fungsi operasi atau pengolahan transaksi pada berbagai sistem informasi yang sudah maju (mutakhir) adalah menuju pada pengumpulan data dan permintaan informasi (inquiry) secara online. Peremajaan file dapat dilaksanakan seketika atau segera, walau ancangan-ancangan lain dapat pula dipakai. Kemampuan memperoleh informasi secara online sangat besar peranannya dalam mendukung operasi. Ini berarti bahwa setiap petugas yang berwenang dapat memperoleh jawaban langsung atas permintaan informasi tertentu. Sebagai contoh, informasi tentang posisi terakhir perkiraan jumlah pelanggan atau persediaan yang ada untuk satu jenis barang tertentu.

- **PENDEKATAN KONSEP TEORI YANG MENDUKUNG FUNGSI MANAJEMEN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung bukan hanya fungsi operasi, tetapi juga mendukung proses atau fungsi manajemen. Peran Sistem Informasi Manajemen dalam mendukung fungsi manajemen adalah dengan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Informasi ini akan digunakan user atau dalam hal ini manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen senantiasa membutuhkan informasi yang up-to-date (informasi terbaru atau terkini) untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi tersebut harus secepatnya diperoleh pada saat dibutuhkan dan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan user (manajemen). Dengan kata lain, sehubungan dengan perannya dalam mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan maka Sistem Informasi Manajemen harus mampu menyajikan "informasi manajemen". Pada dasarnya tidaklah cukup bagi seseorang untuk menerima data hanya dalam bentuk data mentah atau bahkan dalam bentuk ringkasan data. Data umumnya harus diproses dan disajikan melalui suatu cara atau metode yang hasilnya dapat diarahkan pada keputusan yang akan dibuat. Metode untuk melakukan hal ini adalah metode pengolahan data item yang didasarkan pada sebuah model keputusan. Sebagai contoh, keputusan investasi yang berkaitan dengan pengeluaran modal baru harus diolah dalam bentuk sebuah model keputusan pengeluaran modal. Model-model keputusan dapat digunakan untuk mendukung berbagai tahap yang berbeda dalam proses pembuatan keputusan. Dalam era informasi tidak akan ada satu pun organisasi yang dapat bertahan hidup (*survive*) dan tumbuh (*grow*) tanpa memiliki sistem informasi manajemen yang terencana, didesain, dan dikelola dengan tepat. Jelaskan mengapa pengembangan sistem informasi secara berkesinambungan perlubahkan suatu keharusan bagi organisasi.

pangelitbangnas

2. METODOLOGI

❖ METODE *INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING* (ISM)

Proses pembuatan *Interpretive Structural Modeling* dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pengetahuan perorangan terhadap suatu permasalahan secara menyeluruh yang diambil dari proses diskusi atau sebuah analisa. Pengetahuan tersebut yang dibutuhakan dalam mengkomunikasikan sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang diinginkan (***Indrawati, 2013***). Maka ISM bisa disebut alat MCDM (*Multi Criteria Dicision Making*) yang menyediakan interaksi dan hubungan timbal balik antara atribut yang dipilih. ***Attri et al., (2013)*** dalam ***Kumar et al., (2014)*** berpendapat bahwa hubungan langsung antara faktor menggambarkan situasi yang lebih akurat daripada faktor individu yang tersendiri. Karena manfaat ISM inilah banyak penelitian mengaplikasikan pada berbagai bidang yang lebih luas disemua bidang dan dilakukan dengan pendekatan MCDM. Seperti pertama yang dikenalkan oleh ***Mandal dan Deshmukh (1994)*** dalam manajemen rantai pasok menggunakan ISM untuk memilih vendor terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti kualitas, pengiriman dan harga. ***Singh et al., (2010)*** menggunakan ISM untuk pemilihan praktik terbaik dalam peranan rantai pasok diperusahaan. Begitu juga ***Diabat dan Govindan (2011)*** menganalisa faktor pendorong dalam *green supplay chain*. Disisi lain ***Lee et al., (2011)*** menganalisa manfaat biaya dan resiko dalam pemilihan teknologi yang terpadu menggunakan ISM dan *Analytic Hierarchy Process* (***Kumar et al., 2014***). Kumar et al., (2014) menjelaskan Analisa isu-isu CSR dalam proses pemilihan suplier dengan pendekatan ISM. Tahapan dalam penggunaan ISM meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan elemen-elemen yang sesuai dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi isu-isu CSR. Dalam proses ini dilakukan pemilihan UKM yang relevan lalu dilakukan literatur data secara primer (survei, group problem solving, wawancara, dll) maupun sekunder.
2. Membuat dan menjalankan kuisioner berbasis pada isu-isu CSR ke UKM / perusahaan yang telah dipilih. Kuisioner diberikan kepada para manajer dan orang-orang yang berpengaruh di perusahaan, untuk menetapkan prioritas dan berbagai isu CSR.
3. Analisa isu CSR dengan pendekatan ISM
   a. Membuat *Structural Self-Interaction Matrix* (SSIM) dengan cara perbandingan keterkaitan berpasangan (*pairwise comparison*) ada empat simbol yang digunakan untuk menunjukan hubungan antara isu-isu CSR sebagai i dan j, maka dapat dihasilkan penilaian sebagai berikut: 'V' – isu i berpengaruh terhadap isu j 'A' – isu j berpengaruh terhadap isu i 'X' – isu i dan j saling mempengaruhi 'O' – isu i dan j tidak berhubungan
   b. Melakukan *reachability matrix* yang didasari dari SSIM yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya. Matrik ini adalah matrik binari, karena masukan pengkategorian dari SSIM di konversi menjadi bilangan 1 dan 0 dengan aturan sebagai berikut: - Jika relasi (i , j) dinotasikan sebagai V, maka masukan (i , j) pada RM menjadi 1 dan masukan (j, i) menjadi 0. - Jika relasi (i , j) dinotasikan sebagai A, maka masukan (i , j) pada RM menjadi 0 dan dan masukan (j, i) menjadi 1. - Jika relasi (i , j) dinotasikan sebagai X, maka masukan (i , j) pada RM menjadi 1 dan dan masukan (j, i) menjadi 1. - Jika relasi (i , j) dinotasikan sebagai O, maka masukan (i , j) pada RM menjadi 0 dan dan masukan (j, i) menjadi 0. Untuk menentukan final reachability matrix (FRM) perlu dilakukan dengan transitivity, transitivity menyatakan bahwa jika elemen A memiliki relasi dengan elemen B

paper.itbang

dan elemen B memiliki relasi dengan elemen C, dapat dinyatakan secara tersirat bahwa A memiliki relasi dengan C. Jika elemen (i , j) dari RM adalah nol (0), maka tidak ada hubungan secara langsung maupun tidak langsung dari elemen i ke j. RM awal sepertinya tidak memiliki karakter ini karena tidak ada relasi yang langsung tapi adanya relasi tidak lengsung dari elemen i ke j, masukan (i , j) juga nol (0). Hubungan langsung bisa dimunculkan dengan mengubah FRM (dengan mengatur masukan yang diagonal menjadi notasi 1) ke succesive power sampai dengan tidak ada masukan yang didapat, 43 kondisi ini berakhir pada kondisi steady-state yang dicapai pada Mn-1 < Mn = Mn+1 (Indrawati, 2013). Penerapan dilakukan dengan memeriksa sel-sel *reachability matrix* yang bernilai nol (0), apakah nilainya telah memenuhi aturan transitivity atau belum.

c. Menentukan level Partitions, Final reachability matrix yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya dibagi dalam tingkatan yang berbeda. Reachability tersebut dan data set yang ada untuk setiap isu CSR yang ada, ditemukan dari *Final reachability matrix* (***Warfield, 1974*** dalam ***Kumar et al., 2014***). Tingkat ini memanfaatkan sekumpulan elemen di Sj dan Si. Reachability set R(Si) terdiri dari elemen itu sendiri dan unsur-unsur lain yang bisa dijangkau dari Si ditetapkan sebagai yang mendahului/antecendent set A(Si). Kemudian interaksi dari sekumpulan Reachability dan sekumpulan antecendent (R(Si) ∩ A(Si)). Elemen yang merupakan R(Si) = R(Si) ∩ A(Si) adalah elemen teratas dari hierarki ISM. Elemen teratas tidak memiliki relasi ke elemen lainnya diatas tingkatannya. Ketika elemen teratas teridentifikasi maka mereka terpisah dari elemen-elemen lainnya, kemudian proses yang sama mengalami iterasi sampai dengan tingkatan dari semua elemen tercapai. Identifikasi tingkatan (level) ini membantu dalam pembangunan digraph dan model akhir ISM. Level partitions yang dilakukan pada RM ini dapat dilakukan dalam beberapa iterasi hingga menemui semua level yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan kriteria elemen adalah sebagai berikut (***Indrawati, 2013***):
   - Memasukan relasi elemen j mana saja yang terkait dengan elemen i1 pada kolom reachability set (dikatakan memiliki relasi jika nilai sel pada tabel final reachability matrix bernilai 1 atau 1*). Untuk penentuan level I, maka dilihat elemen mana saja yang sama-sama muncul pada kolom reachability set dan kolom antecendent set pada satu kriteria. 3. Setelah iterasi 1 selesai kemudian dilakukan iterasi 2, yaitu dengan menghapus semua elemen dan kriteria yang telah menduduki posisi level I pada kolom reachability set, *antecendent set* dan intersections set. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti langkah 2 untuk mendapatkan level II. 4. Setelah iterasi 2 selesai kemudian lakukan iterasi 3, hingga semua level diketahui dengan melakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya.

d. Pembentukan model ISM, dengan bantuan dari terselesainya seluruh iterasi, maka dapat dibentuk tabel rank vector sebagai hasil rekapitulasi.

e. Menggambarkan digraph dan matrik driver power – dependence dari rank vector yang telah dihasilkan pada hasil rekapitulasi level kriteria. Teknik ISM sendiri adalah proses pengkajian kelompok (*group learning process*) dimana model-model struktural dihasilkan

pasca.itbar.ac.id

guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Teknik ISM terutama ditunjukan untuk pengkajian oleh suatu tim, namun bisa juga dipakai oleh seorang peneliti (***Eriyatno, 1998***). Metodologi dan teknik ISM dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyusunan hirarki dan klasifikasi sub-elemen. Prinsip dasarnya adalah identifikasi dari struktur didalam suatu sistem yang memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik (***Eriyatno, 1998***).

❖ **METODE LOCATION QUOTIENT (LQ)**

Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor / komoditi disuatu daerah terhadap peranan sektor / komoditi di daerah yang lebih tinggi. Dengan kata lain LQ menghitung share output sektor i di kabupaten dengan share output sektor i di provinsi. Metode analisa ini dapat digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan (***Tambunan, 1996*** dalam ***Simanjuntak, 2013***). Dengan indikator penetapan bahwa LQ > 1 menandakan bahwa sektor tersebut di daerah yang lebih kecil terjadi surplus produksi dan dapat dijadikan sektor basis, sehingga sektor ini dapat dikembangkan agar terjadi peningkatan surplus di daerah. LQ < 1 menandakan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor yang diunggulkan karena tidak terjadi kelebihan produksi. Dengan formulasi nilai LQ sebagai berikut.

$$LQi = \frac{\frac{PDRB(kab-i)}{PDRB(t-kab)}}{\frac{PDRB(prov-i)}{PDRB(t-prov)}} \qquad (2.14)$$

Dimana,
LQ i = Nilai LQ pada sektor i
PDRB(kab-i) = PDRB sektor i Kabupaten
PDRB(t-kab) = Total PDRB dari seluruh kegiatan sektor Kabupaten
PDRB(prov-i) = PDRB sektor i Provinsi
PDRB(t-prov) = Besaran total PDRB dari seluruh kegiatan sektor Provinsi

❖ **METODE SHIFT SHARE**

Analisis Shift-Share adalah suatu alat analisa yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pergeseran struktur suatu sektor perekonomian pada suatu daerah dalam hubungannya dengan sistem perekonomian yang lebih tinggi. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Dengan menggunakan analisis ini akan dapat terlihat bagaimana peran dan prospek suatu sektor didaerah tertentu. Analisis *shift-share* memisahkan (mendekomposisi) pertumbuhan suatu daerah ke dalam tiga komponen:

1. Komponen pertumbuhan nasional,
2. Komponen pertumbuhan proporsional dan
3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Analisis Shift Share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relative terhadap struktur ekonomi wilayah

bappeltibangda

administrative yang lebih besar sebagai membanding atau refrensi. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel daerah, pendapatan atau output selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh : pertumbuhan nasional (N), bauran industri/industry mix (M) dan keunggulan kompetitif (C). Dengan demikian pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share), pengaruh bauran industri (*industy mix*) disebut *proporsional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share* atau *differential shift*.

3. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

❖ TAHAP PENGUMPULAN DATA

Pada tahapan pengumpulan data ini diawali dengan kajian pustaka (*literature review*) dan studi lapangan (survey) dengan proposisi pelaksanaanya secara paralel. Dalam hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi datadata yang tersedia, baik berupa data primer ataupun data sekunder. Studi lapangan diarahkan untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung dalam strategi penguatan SIDa seperti data wilayah (letak geografis, topografi, dan kondisi ekonomi), PDBR daerah, Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIP Daerah) serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana data-data tersebut dapat mendukung untuk terbentuknya dokumen strategis penguatan sistem inovasi daerah (SIDa). Kajian pustaka dengan berbagai sumber jurnal internasional, artikel publikasi, buku teks dan berbagai artikel ilmiah sebagai dasar dari data sekunder pada kegiatan ini. Selain berupa teks dan artikel data-data sekunder juga didapat dari akses internet berupa wacana dan publikasi mengenai sistem inovasi daerah.

❖ TAHAP PENGOLAHAN DATA

Tahap ini adalah dimana setelah semua tahapan dalam pengumpulan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan telah terkumpul. Pada tahap ini data yang diperoleh dilakukan pengolahan data dengan pendekatan metode yang telah ditentukan. Hasil pengolahan data digunakan untuk membantu knsultan dalam menganalisis sumber daya serta memberikan rekomendasi. Pada tahap ini pendekatan model ISM yang dilakukan oleh ***Kumar et al., (2014)*** berdasarkan isuisu CSR yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh ***Diabat and Govindan (2011)*** dalam pemilihan supllier pada sebuah perusahan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem tersebut untuk diwawancarai dan mengisi kuisioner permasalahan isu-isu tersebut. Maka dalam pekerjaan ini juga akan dilakukan pendekatan ilmu sistem dalam meningkatkan mutu dan efektivitas manajemen oleh ***Eriyatno (1998)***, untuk menstrukturkan hirarki model dengan tatanan sistem inovasi daerah. Seperti yang tertuang pada naskah akademik buku putih penguatan sistem inovasi nasional bahwa penguatan SIDa akan tercapai bila mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di daerah, untuk ini maka kelembagaan SIDa membutuhkan kepemimpinan daerah yang memiliki otoritas formal untuk menggerakan sumber daya yang ada. Maka peran kepemimpinan yang berkaitan dengan struktur administratif dan instrumen-instrumen kebijakan menjadi peran utama dalam penguatan SIDa. (Tim BPPT, 2012).

❖ TAHAP ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Tahap ini merupakan analisa terhadap hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, perancangan dokumen strategi "Road Map" penguatan SIDa dilakukan dengan pendekatan metode *Interpretative Structural Modeling* (ISM). Dari hasil keputusan kelompok tersebut lalu

bappeltbangda

diberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah sehingga rekomendasi yang dilakukan dapat diimplementasikan dengan tepat

- **TAHAP PENGAMBILAN KESIMPULAN DAN SARAN**
  Tahap ini adalah tahapan paling akhir yang dilakukan dalam pekerjaan ini. Dengan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, maka akan dapat diperoleh suatu simpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam pekerjaan ini. Sedangkan saran akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pekerjaan lanjutan.

bappelitbangda

C. KONDISI, PERMASALAHAN DAN KENDALA SERTA TANTANGAN IMPLEMENTASI SISTEM INOVASI DAERAH DI KAB. BANDUNG BARAT

1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANDUNG BARAT

❖ VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023 merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah. Visi ini akan menggambarkan arah dan kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi pembangunan ini merupakan bagian dari pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan pelaksanaan tahap keempat RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025. Visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tersebut adalah "Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan", dengan pengertian agroindustri adalah peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian, dan pengertian wisata ramah lingkungan adalah pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis juga memberikan penguatan pada visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat tersebut dengan menambahkan bahwa ke depan Bandung Barat harus sudah menyatakan bahwa sebagian wilayah sudah menjadi kawasan perkotaan.

Visi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023 perlu manjawab isu strategis dan tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam RPJMD dijelaskan setidaknya terdapat 5 (lima) isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan pada pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu isu terkait pengembangan SDM, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, pertumbuhan daya saing ekonomi melalui aksesibilitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Secara khusus Kabupaten Bandung Barat juga harus memperhatikan pembangunan di Metropolitan Bandung, proyek prioritas strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

"**Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia**"

Kabupaten Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Aspiratif

   Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara

bappeltbandung

langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

2. Kreatif
   Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku .
3. Unggul
   Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Religius
   Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai dan norma harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan SDM, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika.

❖ MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam RPJMD dijelaskan bahwa misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2019 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Secara khusus KLHS sebagai analisis untuk RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, juga kembali menegaskan perlunya untuk tetap memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025. Visi RPJPD tersebut dipandang sudah tepat karena bertolak dari apa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dari sisi penggunaan lahan dan mata pencaharian sebagian besar masyarakat setempat di sektor pertanian, Kabupaten Bandung Barat dapat disebut kabupaten agro. Sehingga dinilai tepat apabila ke depannya Kabupaten Bandung Barat dicita-citakan sebagai kabupaten agroindustri, yaitu integrasi pertanian dengan industri. Di wilayah Kabupaten Bandung Barat juga banyak dijumpai atraksi wisata, dimana untuk memperoleh manfaat nyata atas kehadiran atraksi wisata tersebut perlu menjadi fokus pembangunan di masa datang.

Tambahan dari kedua hal yang menjadi visi RPJPD tersebut adalah pengembangan perkotaan yang antara lain terbentuk oleh pembangunan perumahan oleh pengembang swasta. Di sisi lain perkembangan perkotaan belum menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu meskipun belum

bappelitbangda

dirumuskan sebagai visi Kabupaten Bandung Barat, tetapi perlu disiapkan agar hadir menjadi wilayah perkotaan yang terpadu, efisien, inklusif dan menjadi pendorong perkembangan sosial ekonomi wilayah. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2019 – 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2019 – 2023 disusun berdasarkan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan tambahan pemikiran dari hasil KLHS tersebut di atas. Prinsip-prinsip sebagaimana janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digunakan sebagai dasar penyusunan misi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas.
4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan.
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, perikanan dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.
7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi.

❖ KETERLIBATAN SKPD DALAM PENCAPAIAN MISI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam pencapaian visi dan misi diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pun menyusun tujuan guna mengsukseskan pencapaian misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berikut merupakan pencapaian tujuan tiap SKPD.

bappeltbarat

Tabel C.1 Tujuan SKPD Dalam Pencapaian Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

SKPD	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
Sekretariat Daerah				Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
Sekretariat DPRD				Meningkatnya terwujudnya kinerja pelayanan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung Barat
Inspektorat Daerah				Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
Dinas Pendidikan	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Dapat Dijangkau oleh seluruh masyarakat			Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Dapat Dijangkau oleh seluruh masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			- Meningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial - Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar - Meningkatkan fungsi bangunan publik, serta meningkatnya sumber daya manusia teknik yang berdaya saing - Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

bappelitbangda

SKPD	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
			Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial	
Satpol Pmong Praja	Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan non dasar lainnya			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dinas Sosial	Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Masyarakat Melalui Pelayananyang Optima ldan Berkualitas Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar Lainya Pembentukan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang Berkarakter			Pemerataan Hasil Pembangunan Ekonomi
Dinas Tenaga Kerja		Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan penggerakan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) Pengarusutamaan gender dan anak Meningkatnya Pengaurutamaan Gender dalam			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pelaporan serta pengelolaan program sumber daya, sarana prasarana, dan keuangan D2KBP3A

bappelitbangda

SKPD	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
	pembangunan daerah dan Perlindungan Perempuan Meningkatnya Kualitas hidup dan perlindungan anak			
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar lainnya	Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dinas Lingkungan Hidup			Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan persampahan	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dinas Perhubungan		Terselenggaranya tata kelola administrasi pemerintahan di bidang perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas keselamatan serta kelancaran lalu lintas Penyediaan dan optimalisasi pelayanan angkutan Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial		Terselenggaranya tata kelola administrasi pemerintahan di bidang perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan

bappeltbangda

SKPD	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan		Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Berkelanjutan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan		Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepemudaan dan Olahraga			
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pemenuhan pelayanan dasar dan non dasar lainnya	Pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dinas Perikanan dan Peternakan		Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Dinas Arsip dan Perpustakaan	Peningkatan pelayanan perpustakaan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat			Mewujudkan tata kelola pemerintahan dibidang kearsipan yang baik

bappelitbangda

SKPD	Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, akuntabel dan aplikatif	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, akuntabel dan aplikatif		Mewujudkan tata kelola yang baik Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Meningkatnya perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang aspiratif, akuntabel dan aplikatif
Badan Keuangan dan Aset Daerah				Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

bappelitbangda

2. RENCANA STRATEGI SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

❖ ARAHAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Dalam Kajian Penyusunan Roadmap SIDA Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 dijelaskan bahwa adanya permasalahan yang dihadapi daerah, visi misi pembangunan, tantangan dan harapan terkait pelaksanaan inovasi maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat, adapun arahan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- Arah kebijakan inovasi bidang pelayanan dasar kesehatan yang dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (penyiapan sarana prasarana, tenaga medis, dan layanan tanggap darurat), peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk menjaga kesehatan secara mandiri melalui pendidikan penanganan medis dasar bagi masyarakat.
- Arah kebijakan inovasi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang sasaran berorientasi pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berpengetahuan, cerdas, kreatif, dan terampil dengan sasaran meningkatnya kompetensi dan daya saing masyarakat daerah, yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan (terutama jenjang pendidikan menengah atas/setara), peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dan penguatan kelembagaan pendidikan formal maupun non formal.
- Arah kebijakan inovasi bidang pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa yang sasaran berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan kualitas, daya saing ketenagakerjaan agar terserap di pasar kerja dengan penghasilan yang layak, serta menggiatkan usaha ekonomi mandiri melalui kegiatan wirausaha, UMKM, dan pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
- Arah kebijakan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi daerah sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah serta mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis kearifan lokal, kreativitas, dan ramah lingkungan.
- Arah kebijakan inovasi peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang tercermin dari kemudahan masyarakat mengakses pusat-pusat pelayanan, meningkatnya kualitas dan standar kelayakan infrastruktur, transportasi, dan jaringan teknologi komunikasi.
- Arah kebijakan inovasi pelayanan pemukiman yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kondisi pemukiman masyarakat yang layak dan sesuai standar pemukiman yang sehat.
- Arah kebijakan inovasi pemeliharaan kualitas lingkungan dan antisipasi dampak bencana alam melalui edukasi lingkungan dan mitigasi bencana, ketaatan terhadap regulasi konservasi lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.
- Arah kebijakan inovasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakkan supremasi hukum, berkeadilan, dan partisipatif.

bappeltbarbar

3. STRATEGI PENGUATAN INOVASI

Dalam Kajian Penyusunan Roadmap SIDA Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 perumusan strategi penguatan inovasi daerah digunakan analisis SWOT, yang menggambarkan kekuatan (*strength*-S) dan kelemahan (*Weaknes*-S), serta faktor eksternal yaitu peluang (*Opprotunity*-O), dan kendala/ancaman (*Threat*-T) yang dapat menjadi faktor pendukung dan/atau penghambat pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Bandung Barat. Rumusan analisis SWOT dapat dilihat pada gambar berikut :

bappelitbangda

	Strength/Kekuatan	Weakness/kelemahan
INTERNAL	• Tersedianya kelembagaan yang siap melaksanakan penguatan inovasi • Adanya komitmen ASN dan pimpinan untuk merubah image KBB menjadi lebih baik. • Memiliki staff yang memadai secara *basic* keilmuan dan penguasaan IT. • Memiliki inovasi yang menyasar hingga tingkat kecamatan. • Telah memiliki website, walaupun masih terbatas dalam pengaksesan	• Permasalahan yang dihadapi ASN yang mempengaruhi motivasi dan kinerja dalam melakukan inovasi • keterbatasan SDM operator • Belum seluruh aparat memahami peraturan dan tata tertib • Inovasi Sistem yang memudahkan tata kelola dan pelayanan belum terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh SKPD dan pejabat terkait • Keterbatasan sarana prasarana dan anggaran • Sistem yang masih konvensional, yang berdampak pada sulitnya koordinasi dan informasi lintas sektor (SKPD) • Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu regulasi tingkat atas • Pemenuhan SDM dimana rekrutmen pegawai tidak sesuai dengan bidangnya • Masih adanya ego sektoral dalam pemenuhan kebutuhan data. • Adanya titipan-titipan, SDM, Sarana prasarana serta anggaran yang berdampak pada penerapan inovasi
	Opportunity/Peluang	**Threat/Tantangan/hambatan**
EKSTERNAL	• Berkembangnya sektor ekonomi pariwisata dan pertanian di tingkat desa. • Jaringan internet masuk desa membantu penerapan berbagai aplikasi yang dimiliki. • Memiliki desa-desa unggulan dan berprestasi. • Tingginya jumlah pelaku bisnis di KBB mencapai 10.000 pelaku bisnis • Terdapat 800 perusahaan yang wajib bergabung dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan untuk lulusan SMA/SMK setiap tahunnya. • Jumlah masyarakat yang jenis pekerjaannya berupaya sendiri/wirausaha cukup tinggi • KBB berkembang menjadi salah satu kawasan pembangunan proyek strategis nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi modern	• Tuntutan masyarakat akan pelayanan berbasis online • Keterbatasan akses internet hingga tingkat desa • Masih terdapat double data pelaku UMKM dan ketersediaan database perusahaan • Kurangnya motivasi pelaku UMKM untuk bekerjasama dengan pemerintah • Belum adanya pemahaman yang sama tentang ungkitan ekonomi dari segi pariwisata baik ditingkat desa ataupun pemerintah daerah • Kualitas masyarakat Desa yang beragam, berdampak pada kendala penyampaian informasi • Adanya benturan aturan dalam penerbitan izin pembangunan • Tenaga kerja KBB belum memiliki sertifikasi kompetensi • Pembatasan perkembangan wilayah terbangun condong ke arah barat dan timur dan bagian selatan- tengah. Sedangkan bagian utara, menjadi kawasan perlindungan (kawasan konservasi). • Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah terbangun • Kondisi infrastruktur yang belum memadai

Sumber: *Penyusunan Roadmap SIDA Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018*

bappeltinggi

Strategi penguatan inovasi daerah di KBB, dirumuskan ke dalam 4 (empat) kuadran yaitu (1) strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, (2) strategi mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang, (3) menggunakan kekuatan dan mengantisipasi ancaman, dan (4) strategi mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Dengan demikian rumusan strategi tersebut adalah :

1. Strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang (Strategi S-O)
   - Sinergitas pemberdayaan kelembagaan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan inovasi yang berdampak pada peningkatan sektor ekonomi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi modern.
   - Meningkatkan pemanfaatan IT yang telah ada secara terintegrasi dan dapat diakses masyarakat secara luas
   - Mensosialisasikan gerakan produktifitas ide-ide inovasi dan pelaksanaannya secara konsisten dan disiplin baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa
   - Menggalakkan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang didukung pembinaan, permodalan, dan pemasaran
2. Strategi mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang (Strategi W- O)
   - Meningkatkan motivasi ASN melalui pemberian penghargaan kepada lembaga dan individu (berupa insentif maupun pengembangan karir) atas setiap inovasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan daya saing daerah.
   - Meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan dan ketrampilan IT bagi SDM aparatur dan masyarakat.
   - Meningkatkan/mengembangkan pemanfaatan IT yang telah ada secara terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara luas.
   - Menandatangani pakta integritas terkait komitmen pimpinan dan aparatur untuk melaksanakan inovasi, melalui penguatan kebijakan percepatan inovasi daerah, meminimalisir ego sektoral dan menanggalkan kepentingan-kepentangan yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan inovasi daerah
   - Peningkatan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang mendorong terlaksananya inovasi.
3. Strategi menggunakan kekuatan dan mengantisipasi ancaman (Strategi S-T)
   - Meningkatkan dan mengembangkan berbagai pelayanan berbasis online
   - Bekerjasama dengan perusahaan IT untuk memperluas akses internet hingga tingkat desa.
   - Menyediakan aplikasi yang dapat mendata ulang pelaku UMKM dan database perusahaan.
   - Sosialisasi dan konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat terkait kesamaan paham mengenai ungkitan ekonomi sektor pariwisata yang perlu dikembangkan.
   - Menyiapkan atau memfasilitasi lembaga yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja asal KBB
   - Mematuhi peraturan mengenai penerbitan izin pembangunan dan menggali kreatifitas mengembangkan wilayah berdasarkan potensinya
   - Mengembangkan teknologi pertanian sesuai dengan kondisi keterbatasan lahan.
   - Mengembangkan teknologi infrastruktur berikut upaya menghimpun bantuan keuangan dari kompensasi proyek strategis nasional dan pihak swasta.

bappeltbang

4. Strategi mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman (Strategi W-T)
   - Menerapkan ***reward and punishment*** yang tegas disertai pengarahan yang jelas dan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan berbasis online
   - Bekerja sama dengan swasta dalam meningkatkan akses internet hingga tingkat desa
   - Seleksi dan rotasi SDM aparataur yang sesuai minat dan bidangnya
   - Peningkatan kapasitas SDM aparatur agar mampu membina, memberdayakan, membangun kepercayaan, dan bekerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan kinerja ekonomi di daerah
   - Menanggalkan ego sektoral dan kepentingan-kepentingan sehingga tidak menghambat penyediaan sarana prasarana dan anggaran guna mengembangkan program aplikasi satu data yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendataan UMKM, dan database perusahaan
   - Melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi tentang kesamaan pemahaman tentang ungkitan ekonomi dari segi pariwisata dan wirausaha baik ditingkat desa ataupun pemerintah daerah.
   - Peningkatan kualitas masyarakat Desa agar dapat menerima informasi dan arahan dari pemerintah serta memfasilitasi masyarakat memiliki sertifikasi kompetensi
   - Mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayahnya

4. KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT SAAT INI

Dalam Kajian Penyusunan Roadmap SIDA Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Penguatan SIDa Kabupaten Bandung Barat difokuskan kepada lima dimensi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus penguatan SIDA mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus penguatan SIDA mencakup pengembangan agroindustri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan masyarat, pemerataan pendapatan, dan keseimbangan pembangunan wilayah .
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus penguatan SIDA mencakup pelibatan komunitas masyarakat dan pemuda dan perempuan dalam pembangunan wilayah.
4. Peningkatan infrastruktur, transportasi, penyediaan energi terbaharui,dan air baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan fokus penguatan SIDA mencakup inovasi teknologi infrastruktur, teknologi penyediaan energi terbaharui dan air baku, dan pelestarian lingkungan
5. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik, fokus penguatan SIDA mencakup tata kelola pemerintahan daerah, tata kelola kepegawaian, dan inovasi pelayanan publik

bappelitbangda

Tabel C.2 Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Bandung Barat 2018-2023

FOKUS	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	KEGIATAN PENCAPAIAN
Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan dasar kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas	• Melanjutkan inovasi Layanan aplikasi promosi kesehatan • Pelatihan ketrampilan masyarakat dalam penanganan medis dasar • Layanan tanggap darurat bagi masyarakat miskin dan wilayah kategori kesulitan geografis.
	Peningkatan Aksesibilitas layanan dasar pendidikan yang Berorientasi *life skill* yang terintegrasi dengan dunia kerja	Membentuk masyarakat berpengetahuan tinggi, trampil, berdaya saing sehingga memudahkan penyerapan tenaga kerja, memperoleh penghidupan yang layak dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan	• Pelaksanaan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal berbasis masyarakat dan pesantren • Memfasilitasi bantuan operasional pengelolaan PKBM dari pemerintah pusat • Memfungsikan kembali SKB • Menjamin regulasi daerah mengenai terbitnya SK Bupati tentang alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan • Penyiapan sarana dan prasarana (lahan dan bangunan) SKB • Mengusahakan bantuan pengelolaan SKB dari pemerintah pusat. • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja yang berorientasi memenuhi kebutuhan dunia usaha dan penciptaan wirausaha baru • Menyediakan klinik konsultasi dan bisnis (inkubator bisnis) bagi pengusaha baru dan UMKM • Menetapkan kebijakan yang mewajibkan dunia • usaha (industri besar, perusahaan, dan investor) bermitra dengan UMKM/wirausaha lokal
	Memfasilitasi tenaga kerja terdidik dan terampil utuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi		

bappelitbangda

FOKUS	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	KEGIATAN PENCAPAIAN
	Pengembangan database kemiskinan dan layanan PMKS terintegrasi	Tersedianya database kemiskinan dan PMKS yang dapat dimanfaatkan seluruh perangkat daerah terkait, bahan bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan layanan tanggap kemiskinan	• Pengembangan dan penguatan database kemiskinan dan PMKS yang sudah ada yang terintegrasi • Membangun database kemiskinan (*one big data* PMKS) yang dapat dimanfaatkan berbagai perangkat daerah terkait
Pertumbuhan Ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan kegiatan usaha industri dan pertanian berbasis IPTEK dan inovasi	Meningkatkan kinerja ekonomi pada sektor pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK dan Teknologi.	• Penguatan inovasi teknologi tepat guna bidang pertanian yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. • Mendorong inovasi teknologi tepat guna (TTG) yang berasal dari pengalaman dan penemuan masyarakat serta penerapannya di wilayah KBB. • Meningkatkan budaya inovasi melalui forum inovasi teknologi pertanian berbasis aplikasi (media sosial) • Membentuk komunitas pemuda milenial untuk mengembangkan industri pertanian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi • inovasi peternakan seperti aplikasi tanggap ternak ataupun forum online peternak • inovasi teknologi tepat guna berupa alat deteksi kesehatan ternak
	Pengembangan inovasisektor pariwisata, seni, dan budaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal.	Mewujudkan sinergitas pelestarian nilai budaya dengan pertumbuhan ekonomi daerah	• Pengembangan sektor pariwisata yang mengutamakan pada kegiatan MICE • Inovasi promosi pariwisata berbasis aplikasi • Mengembangkan pasar-pasar tematik terpadu yang berbasis pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal • Menghidupkan kembali objek-objek pariwisata yang sudah ada

bappelitbangda

FOKUS	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	KEGIATAN PENCAPAIAN
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah	Pemberdayaan masyarakat desa dan pemuda yang dinamis dan kreatif	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi wilayah.	• Membangun pusat kegiatan ekonomi masyarakat (PKEM) pedesaan berbasis *homebased entreprise* dan usaha ekonomi kreatif • pembentukan lembaga dana swadaya masyarakat untuk kepentingan kegiatan ekonomi bisnis dan sosial • kerjasama PKEM dan BUMDes dalam menghasilkan dan memasarkan produk usaha • Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui bantuan dana RW yang dapat dipertanggungjawabkan
	Pemberdayaan perempuan dalam ketahanan keluarga dan kesehatan lingkungan	Meningkatkan peran perempuan dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera	• Menggiatkan dasawisma dan membuat forum dasa wisma • Aplikasi laporan warga terkait kegiatan masyarakat dan pemuktahiran data kependudukan sebagai database perangkat daerah terkait • Membuat Rumah Ketrampilan Terpadu yang memberikan ketrampilan bagi kaum perempuan guna memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan keluarga.
Peningkatan Infrastruktur, penyediaan energi terbaharui,dan air baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Pembangunan infrastruktur berbasis rekayasa teknologi dan sesuai dengan karakter geografi KBB	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan inovasi teknologi tepat, pemenuhan kebutuhan energi dan sumber air baku	• Kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi mengenai inovasi teknologi infrastruktur • Memanfaatkan SDA untuk menghasilkan energi terbarukan • Pelestarianlingkungan dan inovasi teknologi penyediaan sumber air baku • Pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai kearifan lokal
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan aspiratif dan pelayanan publik yang inovatif.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepuasan pelayanan publik	• Memperkuat inovasi terkait pencapaian kedisiplinan pegawai melalui inovasi e-presensi. • inovasi penilaian kinerja aparatur yang terintegrasi dengan sistem pengembangan karir. • Melanjutkan inovasi pelayanan publik online seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perijinan, pelayanan pajak, dan lainnya.

bappelitbangda

FOKUS	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	KEGIATAN PENCAPAIAN
			• Pelaksanaan administrasi perkantoran berbasis online (*e-office*) • Peningkatan budaya inovasi di tiap-tiap perangkat daerah melalui penandatangan pakta integritas dan pemberian anugrah bagi pegawai inovatif. • Pengembangan inovasi pemetaan dan layanan pemetaan dan penanggulangan bencana secara terintegrasi dengan keterlibatan kesadaran masyarakat terkait kesadaran bencana

bappelitbangda

5. TANTANGAN IMPLEMENTASI SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dalam upaya pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan implementasi inovasi pembangunan, adapun hambatan tersebut antara lain:

1. Belum jelasnya kepastian hukum seperti belum tersedianya regulasi daerah yang menjamin terlaksananya inovasi daerah, komitmen pimpinan daerah, dan ketegasan dalam penegakan *reward and punishment*.
2. Kondisi sosial politik yang tertib-kondusif yang dapat mendukung inovasi pengembangan sektor ekonomi, bisnis, dan investasi.
3. Belum berkembangnya budaya inovasi, koordinasi, dan kerjasama pelaksanaan inovasi daerah.
4. Perlunya peningkatan pemahaman terhadap Sistem Inovasi Daerah kepada seluruh stakeholder terkait serta profesionalisme birokrasi dan kinerja dalam membangun komitmen pelaksanaan inovasi.

6. PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENYUSUNAN SIDA

Permasalahan atau Kendala dalam kegiatan ini adalah :

PERMASALAHAN	KENDALA	TUJUAN
• Kurangnya kesiapan peran kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk membangun dan mengembangkan sistem inovasi daerah.	• Tidak adanya koordinasi dan sinergisitas antar SKPD maupun lembaga penelitian dalam menghadirkan dan menerapkan ilmu pengetahun dan terknologi.	• Hal ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian sistem inovasi daerah bagi kepentingan pelayanan masyarakat agar produk yang dihasilkan lebih bermanfaat.
• Kurangnya sumberdaya manusia yang ada dalam struktur organisasi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang mengerti tentang IPTEKIN	• Hasil-hasil penelitian yang telah atau belum dilaksanakan lembaga litbang dan perguruan tinggi belum tercatat dalam suatu Sistem database yang kontinu, sehingga banyak hasil kajian ataupun penelitian yang tidak diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan belum dimanfaatkan secara optimal.	• Hal ini bertujuan untuk diketahui secara terbuka baik oleh masyarakat pelaku usaha maupun pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan.
• Sering bergantinya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	• Sehingga pelaksanaan koordinasi harus selalu dilakukan	• Tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan penguatan kelembagaan SIDA dalam rangka pembina karena adanya penghematan anggaran kegiatan

bappeli



D. ANALISIS SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. ANALISIS TEMA INOVASI DAERAH

Dalam penentuan tema inovasi dilihat dari analisis ekonomi potensial sebagai sektor ekonomi yang secara actual berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat serta memiliki nilai keunggulan dibanding sektor lainnya dan analisis potensi kebijakan, berikut merupakan analisis yang dilakukan dalam menentukan tema inovasi daerah.

❖ **ANALISIS EKONOMI POTENSIAL**

Sektor potensial disuatu wilayah sangat penting untuk diketahui sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat difokuskan pada sektor dengan kontribusi yang dominan terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah, berikut merupakan perkembangan distribusi PDRB tiap sektor terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Tabel D.1 Distribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan KBB (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,16	12,68	12,34	12,07	12,11
B, Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,15	1,12	1,05	1,05
C, Industri Pengolahan	39,67	39,96	40,39	40,67	40,85
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F, Konstruksi	7,29	7,26	7,32	7,48	7,23
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,43	14,37	14,12	13,96	13,14
H, Transportasi dan Pergudangan	5,17	5,17	5,14	5,11	5,04
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,94	5,07	5,18	5,24	5,12
J, Informasi dan Komunikasi	2,26	2,39	2,47	2,55	3,32
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,85	0,84	0,84	0,83	0,86
L, Real Estate	1,80	1,82	1,90	1,96	2,01
M,N, Jasa Perusahaan	0,45	0,47	0,48	0,49	0,44
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	2,67	2,56	2,36	2,30
P, Jasa Pendidikan	3,61	3,72	3,72	3,79	4,05
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	0,53	0,54	0,55	0,56
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,05	1,07	1,09	1,10	1,12

(***Sumber :*** *PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016-2020*)

bappelitbangda

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sektor industri memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat, dengan presentasi sebesar 40,85 % di tahun 2020, kemudian ada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,14 % dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 12,11 %.

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Sektor industri pengolahan terdiri dari beberapa sub sektor yaitu:

1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas
2. Industri Makanan dan Minuman
3. Pengolahan Tembakau
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
10. Industri Barang Galian bukan Logam
11. Industri Logam Dasar
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL
14. Industri Alat Angkutan
15. Industri Furnitur
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Adapun sub sektor pertanian sebagai berikut:

bappelitbangda

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
   1.a. Tanaman Pangan
   1.b. Tanaman Hortikultura
   1.c. Perkebunan
   1.d. Peternakan
   1.e. Jasa Pertanian dan Perburuan
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
3. Perikanan

Untuk mengetahui sektor potensial pun dapat diketahui melalui analisis *Location Quotient* (LQ), erdasarkan analisis LQ terdapat beberapa sektor yang merupakan sektor basis di Kabupaten Bandung Barat, pada analisis LQ dilakukan pembandingan antara proporsi satu sektor terhadap total pendapatan wilayah terhadap proporsi satu sektor di wilayah atasnya sehingga dapat dilihat pada sektor dengan nilai LQ lebih dari 1 maka proporsi suatu sektor lebih besar dibanding proporsi wilayah atasnya. Berdasarkan hasil analisis konsultan terdapat beberapa sektor yang merupakan sektor basis diantaranya Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Berikut berupakan hasil analisa LQ Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah atasnya.

bappelitbangda

Tabel D.2 Analisis LQ PDRB Kabupaten Bandung Barat

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	Nilai LQ				
	2016	2017	2018	2019	2020
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,71	1,71	1,71	1,72	1,72
B, Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,56	0,58	0,62	0,63
C, Industri Pengolahan	0,92	0,92	0,93	0,93	0,95
D, Pengadaan Listrik dan Gas	1,62	1,67	1,94	2,01	2,10
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
F, Konstruksi	0,90	0,90	0,88	0,87	0,88
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91	0,93	0,93	0,93	0,89
H, Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,08	1,08	1,08	1,07
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	1,94	1,93	1,93	1,91
J, Informasi dan Komunikasi	0,62	0,60	0,60	0,60	0,59
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34
L, Real Estate	1,55	1,56	1,52	1,52	1,51
M,N, Jasa Perusahaan	1,09	1,09	1,09	1,08	1,07
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	1,38	1,33	1,33	1,22
P, Jasa Pendidikan	1,34	1,32	1,32	1,32	1,34
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,66	0,67	0,67	0,66
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
PDRB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(***Sumber :*** *Hasil Analisis Konsultan, 2021*)

bappeltanggal

Selain itu berdasarkan analisis *shift share* yang dilakukan terdapat beberapa sektor yang berada pada kuadran I, dengan ketentuan bahwa kuadran I menunjukan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang baik, kuadran II menunjukan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat tapi daya saing sektor tersebut kurang baik, pada kuadran III menunjukan pertumbuhan sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat dengan daya saing yang kurang baik sedangkan pada kuadran IV menunjukan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat namun memiliki daya saing yang baik. Berikut merupakan pembagian kuadran menggunajan analisis shift share di Kabupaten Bandung Barat.

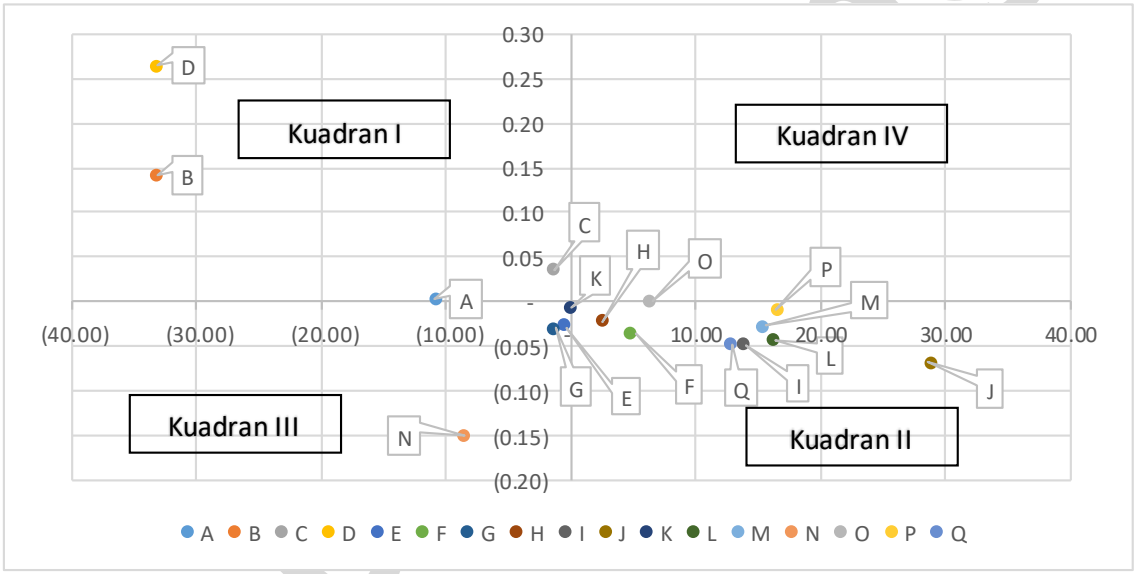
Tabel D.3 Analisis *Shift Share* Kabupaten Bandung Barat

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	PPij	PPWij	Letak Kuadran
	%	%	
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(10,79)	0,00	Kuadran IV
B, Pertambangan dan Penggalian	(33,10)	0,14	Kuadran IV
C, Industri Pengolahan	(1,28)	0,04	Kuadran IV
D, Pengadaan Listrik dan Gas	(33,09)	0,26	Kuadran IV
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0,39)	(0,03)	Kuadran III
F, Konstruksi	4,92	(0,04)	Kuadran II
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,28)	(0,03)	Kuadran IV
H, Transportasi dan Pergudangan	2,62	(0,02)	Kuadran II
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,89	(0,05)	Kuadran II
J, Informasi dan Komunikasi	28,93	(0,07)	Kuadran II
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	(0,01)	Kuadran II
L, Real Estate	16,26	(0,04)	Kuadran II
M, Jasa Perusahaan	15,54	(0,03)	Kuadran II
N, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(8,49)	(0,15)	Kuadran III

bappelitbangda

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	PPij	PPWij	Letak Kuadran
	%	%	
O, Jasa Pendidikan	6,47	0,00	Kuadran I
P, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,60	(0,01)	Kuadran II
Q Jasa Lainnya	12,88	(0,05)	Kuadran II

(***Sumber :*** *Hasil Analisis Konsultan, 2021*)



Gambar D.1 Analisis *Shift Share* Kabupaten Bandung Barat

bappeda.jabarprov.go.id

Berdasarkan analisis diatas terdapat sektor yang memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang tinggi yaitu sektor Jasa Pendidikan, terdapat sektor dengan pertumbuhan yang tinggi namun daya saing kurang baik diantaranya yaitu sektor Kontruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Pada sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan yang cepat namun perlu peningkatan agar dapat memiliki daya saing yang baik.

Selain itu terdapat pula sektor yang terletak di kuadran III dengan karakteristik perkembangan lambat dengan daya saing kurang baik yaitu pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Serta terdapat pula sektor ekonomi dengan karakteristik pertumbuhan yang lambat namn memiliki daya saing yang baik seperti pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang berada dalam kuadran IV perlu dorongan sehingga daya saing yang telah baik ditunjang pula olek kecepatan pertumbuhan yang baik. Sektor yang dapat dikatakan potensial merupakan sektor-sektor yang berada di kuadran IV dikarenakan memiliki keunggulan komparatif namun memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga sangat perlu untuk dikembangkan. Berdasarkan beberapa analisis diatas dapat diketahui sektor sektor potensial di Kabupaten Bandung Barat antara lain sebagai berikut.

Tabel D.4 Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Bandung Barat

Sektor Lapangan Usaha		Distribusi terhadap PDRB	Hasil Analisis LQ	Hasil Shift Share	Kesimpulan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,11	1,72	Kuadran IV	Berkontribusi dominan dan unggul
B	Pertambangan dan Penggalian	1,05	0,63	Kuadran IV	
C	Industri Pengolahan	40,85	0,95	Kuadran IV	Berkontribusi dominan dan unggul
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,75	2,10	Kuadran IV	Berkontribusi rendah namun memiliki keunggulan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,47	Kuadran III	

bappeltbandung

Sektor Lapangan Usaha		Distribusi terhadap PDRB	Hasil Analisis LQ	Hasil Shift Share	Kesimpulan
F	Konstruksi	7,23	0,88	Kuadran II	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,14	0,89	Kuadran IV	Berkontribusi dominan dan unggul
H	Transportasi dan Pergudangan	5,04	1,07	Kuadran II	Sektor basis namun berpangsa pasar rendah
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,12	1,91	Kuadran II	Sektor basis namun berpangsa pasar rendah
J	Informasi dan Komunikasi	3,32	0,59	Kuadran II	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,34	Kuadran II	
L	Real Estate	2,01	1,51	Kuadran II	Sektor basis namun berpangsa pasar rendah
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	1,07	Kuadran II	Sektor basis namun berpangsa pasar rendah
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,30	1,22	Kuadran III	
P	Jasa Pendidikan	4,05	1,34	Kuadran I	Berkontribusi rendah namun unggul
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,66	Kuadran II	
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,12	0,50	Kuadran II	

(***Sumber :*** *Hasil Analisis Konsultan, 2021*)

bappelitbangda

❖ **ANALISIS POTENSI KEBIJAKAN**

Terdapat beberapa kebijakan baik ditingkat Nasional maupun regional Jawa Barat yang menjadi acuan dalam melakukan perencanaan dan dapat diselaraskan dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Bandung Barat, berikut deskripsi kebijakan tersebut:

A Kebijakan Pembangunan Nasional

Visi pembangunan jangka menengah Indonesia yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari:

1. Peningkaktan kualitas manusia Indonesia,
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing,
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya,
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga,
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya,
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selain itu adanya komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan perlu menjadi acuan dalam perencanaan wilayah sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;

bappelitbangda

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan beberapa proyek strategis nasional yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa proyek yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat disimak dalam tabel berikut:

bappelitbangda

Tabel D.5 Program RPJMN 2015-2019 yang Berhubungan dengan Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Proyek Prioritas	Instansi
1	Peningkatan Kualitas Sistem Perkotaan Nasional	Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung) yang terdiri dari Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab. Sumedang	
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar) Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur- Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey)	Kemenhub, KBPU
3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian/*Skill Development Center* (Fungsi Pendidikan)	Kemennaker
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan di Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Kementerian PUPR
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman	DAK; Kementerian PUPR; APBD; Masyarakat; Swasta (CSR)
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota	Kementerian PUPR
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampakan Skala Kota	Kementerian PUPR, KPBU, APBD
		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kementerian PUPR
		Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	DAK, Kementerian PUPR, APBD
6	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Desa	Pembangunan Desa Terpadu di Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri

bappelitbangda

No	Program	Proyek Prioritas	Instansi
7	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembangunan Desa Digital; Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa; Pendampingan pada 74.957 Desa di Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang dan Tasikmalaya; Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes; Pengendalian Penggunaan Dana Desa serta Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Kementerian Desa PDTT
8	Bina Desa	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional; Penetapan Batas Desa serta Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Kementerian Dalam Negeri
9	Bina Pemerintah Desa	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kementerian Dalam Negeri

(***Sumber :*** *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2020-2024*)

bappelitbangda

B Kebijakan Pembangunan Regional Jawa Barat

Merujuk pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, visi Pembangunan Jawa Barat pada periode waktu yang sama adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Visi ini memiliki makna yaitu :

1. Jabar Juara Lahir Batin
   Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.
2. Inovasi
   Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Kolaborasi
   Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Untuk menwujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat ini sendiri.

Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga ujung batas wilayah; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwa nya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastuktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Misi 4 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

bappeltbanjar

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Merupakan suatu keniscayaan bahwa masalah-masalah yang hadir kini adalah masalah baru masa kini, yang hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru pula.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam istilah tata kelola, branding yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai '*Good Governance*' atau 'Tata Kelola yang Baik'. *Good Governance* sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat beberapa isu strategis antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah social;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 Kabupaten Bandung Barat yang terbasuk dalam WP KK Cekungan Bandung yang memiliki tema pengembangan Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dengan arah pengembangan mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan; mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan dan mengembangkan pembangunan dan hunian vertical. Adapun fokus pengembangan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari PKN Metropolitan Bandung kearah pengembangan Industri non polutif; pertanian dan Industri kreatif dan *high tech*.

C Kebijakan Tata Ruang

Kebijakan pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 wilayah pengambangan berdasarkan keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan serta merupakan merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem nasional. Adapun Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung yang merupakan KSN yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.

Selain itu dalam rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 tertuang bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan

bappeltbangda

Bandung Raya. Fasilitas minimum yang harus dimiliki Kabupaten Bandung Barat sebagai PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan dengan skala internasional maupun nasional dan akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional.

Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan di Kawasan Perkotaan Bandung Raya menjadi salah satu amanat yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah di dalamnya. Salah tujuannya untuk mengurangi kecendrungan alih fungsi lahan yang menerus di kawasan perkotaan, mengingat target jumlah kawasan lindung ditargetkan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 45%. Pengendalian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Mendistribusikan kegiatan ekonomi berskala nasional ke arah timur Jawa Barat, yaitu ke PKN Cirebon dan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di sekitar PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.
2. Merealisasikan rencana pengembangan transportasi massal baik untuk angkutan orang maupun barang
3. Mengembangkan pembangunan permukiman vertikal di kawasan-kawasan permukiman yang telah padat dan secara fisik memungkinkan.

Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kawasan yang terletak di bagian Selatan provinsi, dengan arahan bahwa WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. Pembatasan tersebut terkait pengembangan kota-kota yang perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.
Berikut konstelasi kebijakan-kebijakan yang direncanakan terhadap Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Tabel D.6 Konstelasi Arah Kebijakan Vertikal Terhadap Pembangunan Kabupaten Bandung Barat

Kebijakan Pembangunan Nasional	Kebijakan Pembangunan Regiona Jawa Barat	Kebijakan Tata Ruang	Konstelasi
Dalam Nawacita terdapat arahan untuk pembangunan ekonomi dengan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing dan mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Arahan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.	Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung yang merupakan KSN serta Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.	Pengembangan perekonomian berdaya saing memalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif dengan mempertimbangkan lingkungan hidup yang berkalanjutan.
Dalam RPJMN terdapat agenda untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Arahan untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.	Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kawasan yang terletak di bagian Selatan provinsi, dengan arahan bahwa WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya. Pembatasan tersebut terkait pengembangan kota-kota yang perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki.	Memperkuat ketahanan ekonomi dengan mengoptimalkan peningkatan kolaborasi yang dapat mempertahan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana.

bappelitbang

Kebijakan Pembangunan Nasional	Kebijakan Pembangunan Regiona Jawa Barat	Kebijakan Tata Ruang	Konstelasi
Tahapan Pembangunan Berkalanjutan terdapat arahan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan; mendorong inovasi dan Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Visi Pembangunan Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri berdasarkan inovasi dan kolaborasi. Hal tersebut dijabarkan dalam misinya dintaranya Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif	Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi.	Dalam pembangunan dapat mengoptimalkan inovasi sebagai suatu hal yang inklusif berdasarkan kemandirian serta didukung infrastruktur tangguh dan kolaborasi dengan mengoptimalkan potensi wilayah.
Terdapat beberapa Proyek Prioritas dalam RPJMN yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya mencangkup aspek Sistem Perkotaan, Infrastruktur Kereta Api, Produktifitas Tenaga Kerja, Infrastruktur Permukiman dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	WP KK Cekungan Bandung yang memiliki tema pengembangan Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dengan arah pengembangan mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan; mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan dan mengembangkan pembangunan dan hunian vertical.	Fokus pengembangan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari PKN Metropolitan Bandung kearah pengembangan Industri non polutif; pertanian dan Industri kreatif dan high tech.	Proyek prioritas dalam RPJMN dapat dielaborasi dan dioptimalkan manfaatnya dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat serta penyelarasan perkembangan sektor ekonomi dengan pengendalian kualitas lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi non politif.

bappeltbang.id

❖ KONSEP *GREEN INNOVATION* SEBAGAI TEMA INOVASI DAERAH

Berdasarkan analisis Tema Inovasi Daerah diatas diperlukan optimasi terhadap sektor ekonomi potensial yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sektor Pariwista dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sejalan dengan arahan secara vertical terhadap Kabupaten Bandung Barat. Maka Konsep *Green Innovation* merupakan konsep yang cocok untuk menjadi tema inovasi daerah Kabupaten Bandung Barat.

Konsep yang dapat diadopsi dalam upaya penyelarasan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan yaitu konsep *Green Innovation atau eco-innovation* atau yang biasa disebut dengan inovasi hijau merupakan penciptaan produk baru maupun meningkatkan produk secara signifikan. Tidak hanya berfokus pada produk, tetapi berfokus pula pada penciptaan dan pengembangan yang signifikan terhadap proses, metode pemasaran, metode perusahaan yang baru dalam praktik bisnis (**Shashwat, 2019**). Green innovation, tidak hanya memberikan dampak terhadap pengurangan dampak terhadap lingkungan, tetapi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mengubah norma sosial dan nilai-nilai budaya. Chen, Lai dan Wen (2006) turut memberikan pendapat dalam studinya, green innovation merupakan sebuah perangkat inovasi yang didalamnya terkait dengan penciptaan dan pengembangan produk atau proses, termasuk juga inovasi teknologi yang mampu menciptakan penghematan energi, pencegahan polusi, pelaksanaan daur ulang limbah, desain produk yang ramah lingkungan atau pengelolaan lingkungan.

Menurut Kemp dan Pearson (2007) green innovation merupakan sebuah kegiatan yang meliputi produksi, penciptaan suatu produk, proses produksi, layanan, manajemen maupun metode bisnis yang baru atau pengembangan bagi perusahaan untuk mengurangi risiko lingkungan seperti polusi dan dampak dari penggunaan sumber daya. Green innovation menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar dari alternatif yang ada dengan penggunaan teknologi yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Sedangkan menurut Reuvers (2015) green innovation merupakan sebuah proses pengembangan, peningkatan atau membuat sebuah produk maupun proses yang dapat memberikan penurunan yang signifikan terhadap dampak lingkungan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa green innovation merupakan peningkatan secara signifikan atau penciptaan produk, layanan, maupun sistem baru yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti pemborosan sumber daya, dan dampak polusi yang dapat merusak alam sehingga dapat memicu terjadinya bencana alam. Green innovation dilakukan untuk memenuhi tuntutan lingkungan akan kepedulian lingkungan demi keberlangsungan hidup masyarakat maupun perusahaan. Menurut Chen, et al. (2006) green innovation dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu:

a. **Green product innovation**, adalah menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan secara signifikan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. *Green product innovation* mampu meningkatkan kinerja manajemen lingkungan untuk memenuhi persyaratan

bappeltbandung

dalam perlindungan lingkungan. Strategi green product innovation berfokus pada penggunaan sumber daya yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan penggunaan sumber daya yang mengonsumsi energi secara efisien. Implementasi Green product innovation terkait dengan pemilihan material produk yang memberikan dampak polusi seminimal mungkin, penggunaan energi semininal mungkin, penggunaan material secara efisien, memperhatikan kemudahan produk untuk didaur ulang, digunakan kembali atau diuraikan. (Chen, Lai dan Wen, 2006)

b. **Green process innovation**, adalah menciptakan metode produksi atau pengiriman yang baru yang lebih baik dari metode sebelumnya. Green process innovation terkait dengan penghematan energi, pencegahan polusi, dan daur ulang limbah. Menurut Chen, Lai dan Wen (2006) Implementasi green process innovation dapat dilihat dari seberapa efektif proses pembuatan produk atau proses produksi dapat mengurangi emisi bahan berbahaya dan limbah, melakukan daur ulang limbah dan emisi, pengurangan konsumsi listrik, air, batu bara maupun minyak, dan proses produksi yang dapat menghemat penggunaan bahan baku. Penghematan penggunaan bahan baku dan efisiensi produksi dalam green innovation tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik.

❖ **ANALISIS *INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING***

Berdasarkan kajian dari BPPT, 2011 dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi Daerah terdapat enam agenda kebijakan inovasi yang dapat dilakukan, agenda tersebut dalam bentuk indikator-indikator yang terukur dan saling berkaitan. Adapun agenda tersebut terdiri dari:

1. Penataan Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis,
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung IPTEKIN serta kemampuan absorpsi insudtri, khususnya UMKM,
3. Penubuhkembangan bagi kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi,
4. Mendorong budaya inovasi,
5. Meningkatkan keterpaduan pemajuan sistem inovasi di daerah melalui jejaring kerjasama antar daerah dan
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Agenda-agenda kebijakan inovasi tersebut diimplementasikan kedalam lima pilar prakarsa inovasi strategis yang terdiri dari:

1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah,
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah,
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan Inovasi,
4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya,
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan.

Berikut merupakan analisa ISM dalam upaya penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Bandung Barat dari masing-masing agenda kebijakan inovasi serta indikator tiap pilar sistem inovasi daerah.

bappelitbangda

❖ **PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KERANGKA UMUM SISTEM INOVASI DAERAH**

Arah kebijakan pertama dalam sistem inovasi daerah yaitu menata dan mengambangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perijinan. Agenda ini pada intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif, khususnya bagi bisnis dan perkembangan inovasi serta sistem inovasi pada umumnya.

Tabel D.7 Indikator Upaya Penataan dan Pengembangan Kerangka Umum SIDa

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Dokumen RPJMD & RPJPD memuat PSIDa
	2. Jumlah basis data inovasi
	3. Kualitas lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
	4. Waktu perizinan
	5. Jumlah RPK (Ruang Publik Kreatif)
	6. Ratio belanja IPTEKIN terhadap APBD
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Landasan legal bagi pengembangan Klaster Industri
	2. Rencana Induk Klaster Industri
	3. Kualitas infrastruktur dan standar pelayanan
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan Inovasi	1. Infrastruktur jaringan inovasi
	2. Landasan legal jaringan inovasi
4. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah dukungan APBD untuk UKM
	2. Jumlah pembiayaan dari lembaga keuangan dan mitra
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah dokumen rencana induk *Green Innovation Development* (GID)

(***Sumber** : Hasil tabulasi konsultan, Tahun 2021*)

bappeltibida

Pada dasarnya, hal ini berkaitan dengan konteks ekonomi makro, kebijakan fisikal, dan beberapa hal lainnya yang menjadi ranah pemerintah pusat. Walaupun begitu pada konteks tertentu, pemerintah daerah memiliki peran sangat penting misalnya berkaitan dengan perijinan bisnis dan investasi, penyediaan infrastruktur dasar, dukungan aksesbilitas, kualitas hidup dan hal lainnya yang dianggap berhubungan.

Tabel D.8 *Structural self-interaction matrix* 1

Indikator i \ Indikator j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		V	V	A	A	V	V	A	A	O	A	V	V	A
2	V		V	A	A	V	V	X	X	A	A	V	A	O
3	V	V		V	V	A	V	A	A	A	O	O	O	A
4	A	A	V		X	X	A	A	O	O	A	A	V	O
5	A	A	V	X		A	V	V	O	O	O	V	V	V
6	V	V	A	X	A		V	V	V	A	A	A	A	O
7	V	V	V	A	V	V		O	O	A	A	A	V	A
8	A	X	A	A	V	V	O		A	V	V	A	V	O
9	A	X	A	O	O	V	O	A		V	V	A	X	A
10	O	A	A	O	O	A	A	V	V		O	V	V	O
11	A	A	O	A	O	A	A	V	V	O		V	V	V
12	V	V	O	A	V	A	A	A	A	V	V		A	O
13	V	A	O	V	V	A	V	V	X	V	V	A		V
14	A	O	A	O	V	O	A	O	A	O	V	O	V	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:

„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j

„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j

„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu

„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

bappeda

Dari hasil tabel Structural self-interaction matrix 1 kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0.

Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel Reachability matrix 1 (RM), seperti tampak pada table berikut.

Tabel D.9 *Reachability Matrix* 1

		Indikator j													
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indikator i	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
	3	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	4	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	5	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	6	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	8	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
	9	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
	10	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
	11	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
	12	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
	13	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1

Pada tahapan Final reachability matrix 1 (FRM) perlu dilakukan proses *transitivity*, dengan pernyataan aturan jika terdapat poin 1 yang beririsan maka diberi nilai 1.

Maka dari Tabel RM 1 dapat terbentuk *transitivitvy* pada tabel FRM 1 dengan contoh persamaan untuk (i1 , j4) dan (i3 , j9) sebagai berikut.

bappeda

(i1 , j4) = 0 (4.1)
(i1 , ...) = 1 → j2, j3, j6, j7, j12, j13
(... , j4) = 1 → i3, i5, i6, i7, i8, i11, i12
Maka (i1 , j4) = 1
(i3 , j9) = 0 (4.3)
(i3 , ...) = 1 → j4, j5, j7
(... , j9) = 1 → i2, i6, i12, i13, i14
Maka (i3 , j9) = 0

Tabel D.10 *Final Reachability Matrix* 1

		Indikator j														
Indikator j	**Indikator**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Driver Power
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	12
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	10
	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	11
	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	12
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	12
	7	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	10
	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	12
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	13
	13	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	14	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	12
	Dependece	13	14	13	14	13	13	14	12	13	8	8	12	14	10	

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 1 diatas telah memenuhi aturan Transitivity, maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan level partitions nya.

bappeltibanda

Tabel D.11 *Level Partition* 1 (*iteration* 1)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13, 14	I
2	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13	I
3	1,2,3,4,5,6,7,12,13,14	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14	1,2,3,4,5,6,12,13,14	
4	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13	I
5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14	
6	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 13	I
7	1,2,4,5,6,7,9,12,13,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14	1,2,4,5,6,7,9,12,13,14	I
8	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14	1,2,4,5,6,8,9,10,11,12, 13,14	1,2,4,5,6,8,9,10,11,12, 13,14	
9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
10	2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14	2,6,8,9,10,12,13,14	2,6,8,9,10,12,13,14	
11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13, 14	2,6,8,9,11,12,13,14	2,6,8,9,11,12,13,14	
12	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13	1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13	1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13	
13	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 ,14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12,13,14	1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14	I
14	1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14	1,3,5,7,8,9,10,11,13,14	1,3,5,7,8,9,10,11,13,14	

bappeliboangga

Tabel D.12 *Level Partition* 1 (*iteration* 2)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3,5,12,14	3,5,8,9,10,11,12,14	3,5,12,14	II
5	3,5,8,9,12,14	3,3,8,9,10,11,12,14	3,5,8,9,12,14	II
8	3,5,8,9,10,11,12,14	5,8,9,10,11,12,14	5,8,9,10,11,12,14	
9	3,5,8,9,10,11,12,14	5,8,9,10,11,12,14	5,8,9,10,11,12,14	
10	3,5,8,9,10,12,14	8,9,10,12,14	8,9,10,12,14	
11	3,5,8,9,11,12,14	8,9,11,12,14	8,9,11,12,14	
12	3,5,8,9,10,11,12	3,5,8,9,10,11,12	3,5,8,9,10,11,12	II
14	3,5,8,9,10,11,14	3,5,8,9,10,11,14	3,5,8,9,10,11,14	II

Pada level partition 1 untuk iterasi ketiga Tabel 4.7, ditemukan bahwa indikator yang berada pada level ketiga arah kebijakan ini adalah indikator (8, 9, 10 dan 11). (8) Rencana induk klaster industri, (9) kualitas infrastruktur dan standar pelayanan, (10) Infrastruktur jaringan inovasi, dan (11) Landasan legal jaringan ekonomi.

Tabel D.13 *Level Partition* 1 (*iteration* 3)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
8	8,9,10,11	8,9,10,11	8,9,10,11	III
9	8,9,10,11	8,9,10,11	8,9,10,11	III
10	8,9,10	8,9,10	8,9,10	III
11	8,9,11	8,9,11	8,9,11	III

Dari hasil *level partition 3* pada arah kebijakan pertama, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

bappelitbangda

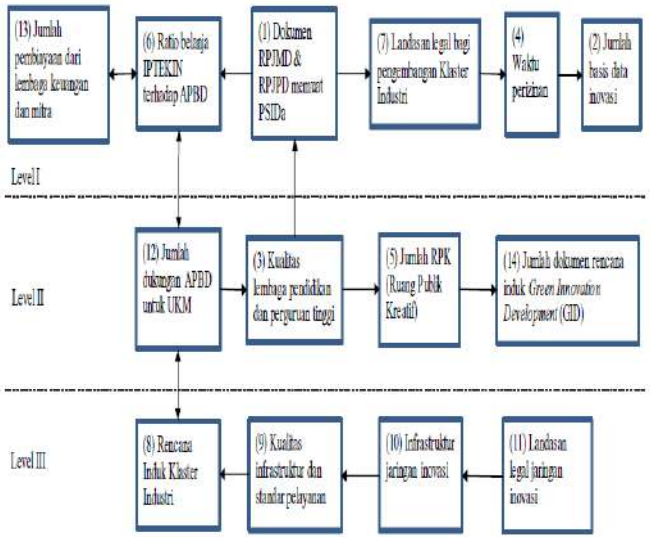
Tabel D.14 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kerangka Umum SIDa

No	Indikator	*Rank Vector*
1	Dokumen RPJMD & RPJPD memuat PSIDa	1
2	Jumlah basis data inovasi	1
3	Kualitas lembaga pendidikan dan perguruan tinggi	2
4	Waktu perizinan	1
5	Jumlah RPK (Ruang Publik Kreatif)	2
6	Ratio belanja IPTEKIN terhadap APBD	1
7	Landasan legal bagi pengembangan Klaster Industri	1
8	Rencana Induk Klaster Kegiatan Ekonomi	3
9	Kualitas infrastruktur dan standar pelayanan	3
10	Infrastruktur jaringan inovasi	3
11	Landasan legal jaringan inovasi	3
12	Jumlah dukungan APBD untuk UKM	2
13	Jumlah pembiayaan dari lembaga keuangan dan Mitra	1
14	Jumlah dokumen rencana induk *Green Innovation Development* (GID)	2

Dari hasil level partition 1 pada arah kebijakan pertama, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel rank vector memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut seperti pada Tabel 4.9.

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan pertama sistem inovasi daerah yaitu penataan dan pengembangan kerangka umum SIDa, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki sebagai berikut.

bappelitbangda



Gambar D.2
Alur Kebijakan Penataan dan Pengembangan Kerangka Umum SIDa

❖ **MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PELAKSANA SIDA**

Arah kebijakan kedua dalam sistem inovasi daerah yaitu memperkuat kelembagaan tim koordinasi penguatan SIDa dan daya dukung IPTEKIN serta mengembangkan kemampuan absorpsi Industri (UMKM).

Tujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah. Tujuan utama lainnya adalah untuk meningkatkan daya ungkit peran IPTEK yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK dan hasil Litbangyasa serta mengembangkannya.

bappelitbangda

Tabel D.15 Indikator Upaya Memperkuat Kelembagaan Pelaksanaan SIDa

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativisat-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Jumlah pertemuan tim koordinasi SIDa
	2. Jumlah sumber daya manusia IPTEKIN
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Jumlah pertemuan lembaga pengelola klaster industri
	2. Jumlah pusat informasi klaster industri
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	1. Terbentuk forum jaringan inovasi
	2. Jumlah layanan laboratorium penelitian
	3. Jumlah pelatihan
4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah pusat inovasi (inkubator) dan bisnis
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan Lingkungan	1. Jumlah forum yang menangani *Green Innovation Development* (GID)

Berdasarkan hasil analisis untuk arah kebijakan kedua SIDa dengan adanya sembilan indikator padal pilar SIDa, maka dihasilkan tabel structural self-interaction matrix 2 (SSIM) seperti pada table berikut.

bappelitbangda

Tabel D.16 *Structural self-interaction matrix* 2

Indikator i	Indikator j									
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		V	A	V	A	V	V	A	O
	2	V		A	V	A	O	X	A	X
	3	A	A		V	V	O	A	V	V
	4	V	V	V		O	V	V	A	V
	5	A	A	V	O		V	V	A	V
	6	V	O	O	V	V		X	O	X
	7	V	X	A	V	V	X		O	V
	8	A	A	V	A	A	O	O		V
	9	O	X	V	V	V	X	V	V	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:

„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j

„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j

„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu

„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

Dari hasil tabel *Structural self-interaction matrix 2* kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0. Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel *Reachability matrix 2* (RM) berikut.

bappelitbangda

Tabel D.17 *Reachability Matrix* 2

		Indikator j								
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator i	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	2	0	1	0	1	0	0	1	0	1
	3	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	4	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	5	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	7	0	1	1	0	0	1	1	0	1
	8	1	1	0	1	1	0	0	1	1
	9	0	1	0	0	0	1	0	0	1

Tabel D.18 *Final Reachability Matrix* 2

		Indikator j									
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**Driver Power**
Indikator i	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	6
	2	0	1	1	1	0	1	1	0	1	6
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	4	0	1	1	1	0	1	1	0	1	6
	5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8
	6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	5
	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	8	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
	9	0	1	0	1	0	1	1	0	1	5
	Dependece	5	9	6	8	4	9	9	3	9	

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 2 diatas telah memenuhi aturan *Transitivity,* maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan *level partitions* nya.

bappeda angga

Tabel D.19 *Level Partition* 2 (*iteration* 1)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,2,4,6,7,9	1,3,5,7,8	1,7	
2	2,3,4,6,7,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	2,3,4,6,7,9	I
3	1,2,3,4,5,6,7,8,9	2,3,4,5,6,7	2,3,4,5,6,7	
4	2,3,4,6,7,9	1,2,3,4,5,7,8,9	2,3,7,9	
5	1,2,3,4,5,6,7,9	3,7,8	3,7	
6	2,3,6,7,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	2,3,6,7,9	I
7	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	I
8	1,2,4,5,6,7,8,9	3,7,8	7,8	
9	2,4,6,7,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9	2,4,6,7,9	I

Tabel D.20 *Level Partition* 2 (*iteration* 2)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,4	1,3,5,8	1	
3	1,3,4,5,8	3,4,5	3,4,5	
4	3,4	1,3,4,5,8	3,4	II
5	1,3,4,5	3,5,8	3,5	
8	1,4,5,8	3,8	8	

Tabel D.21 *Level Partition* 2 (*iteration* 3)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1	1,3,5,8	1	III
3	1,3,5,8	1,5	1,5	
5	1,3,5	3,5,8	3,5	
8	1,5,8	3,8	8	

bapelitbangda

Tabel D.22 *Level Partition* 2 (*iteration* 4)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3,5,8	3,5	3,5	
5	3,5	3,5,8	3,5	IV
8	5,8	3,8	8	

Tabel D.23 *Level Partition* 2 (*iteration* 5)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3,8	3	3	
8	8	3,8	8	V

Tabel D.24 *Level Partition* 2 (*iteration* 6)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3	3	3	VI

Dari hasil *level partition 2* pada arah kebijakan kedua, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

Tabel D.25 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Memperkuat Kelembagaan Tim SIDa

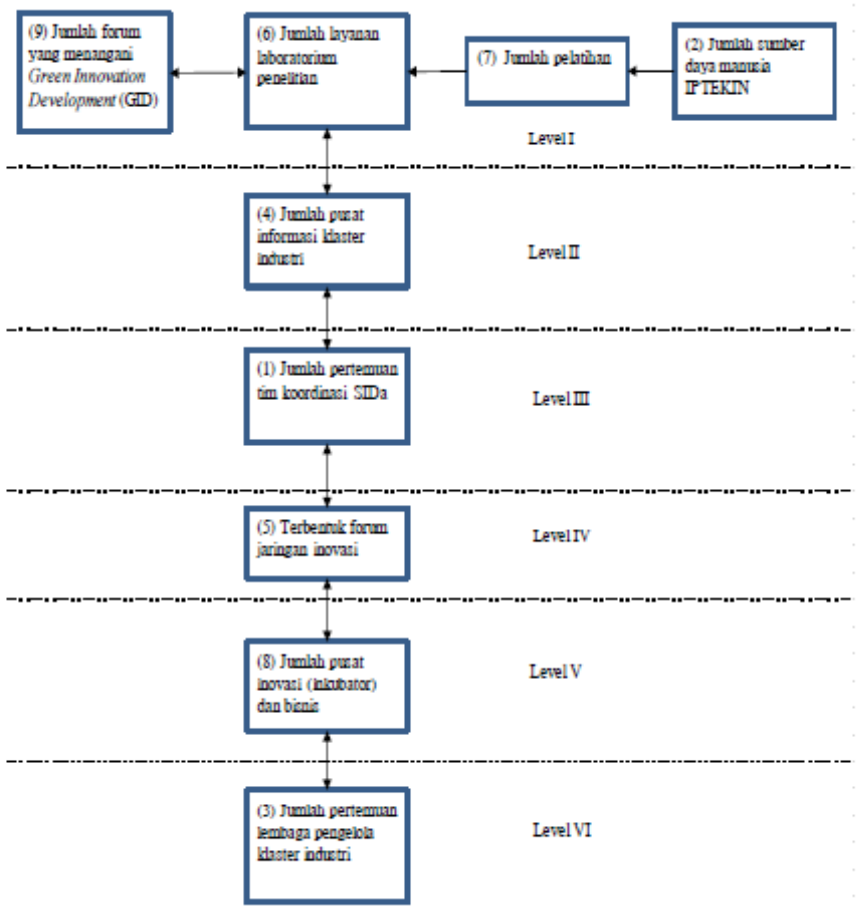
No	Indikator	*Rank Vector*
1	Jumlah pertemuan tim koordinasi SIDa	3
2	Jumlah sumber daya manusia IPTEKIN	1
3	Jumlah pertemuan lembaga pengelola klaster industri	6
4	Jumlah pusat informasi klaster industri	2

bappelitbangda

5	Terbentuk forum jaringan inovasi	4
6	Jumlah layanan laboratorium penelitian	1
7	Jumlah pelatihan	1
8	Jumlah pusat inovasi (inkubator) dan bisnis	5
9	Jumlah forum yang menangani *Green Innovation Development* (GID)	1

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan kedua sistem inovasi daerah yaitu memperkuat kelembagaan tim SIDa dan daya IPTEKIN, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut.

bappelitbangda



Gambar D.3
Alur Pembentukan Kelembagaan SIDa dan Daya IPTEKIN

bapp

❖ **MENUMBUHKEMBANGKAN KOLABORASI BAGI INOVASI**

Arah kebijakan ketiga dalam sistem inovasi daerah yaitu menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa.

Tujuan utamanya adalah mendorong terjadinya interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan, komersialisasi inovasi teknologi dan/atau hasil-hasil Litbangyasa sangat penting bagi pemajuan aktivitas ekonomi yang telah berkembang ataupun yang belum berkembang namun didukung oleh potensi khas keunggulan lokasional daerah perlu menjadi prioritas program daerah.

Tabel D.26 Indikator Upaya Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativisat-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Jumlah aktor inovasi yang ikut pelatihan PSIDa
	2. Jumlah komunitas masyarakat yang berinteraksi di RPK
	3. Jumlah pemanfaatan layanan teknologi (posyantek, wartek, dll)
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Jumlah kerjasama IPTEKIN
	2. Jumlah pertemuan para pemangku kepentingan di klaster industri
	3. Jumlah IPTEKIN yang termanfaatkan
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan Inovasi	1. Jumlah kerjasama difusi inovasi antara perguruan tinggi dan Litbangyasa dengan UKM/IKM
4. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah Wirausaha berbasis IPTEKIN dikalangan pemuda
	2. Jumlah kemitraan strategi dan kolaborasi untuk inovasi
	3. Jumlah kolaborasi antar UMKM inovatif
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan Lingkungan	1. Jumlah kerjasama *Green Innovation Development* (GID)

Berdasarkan hasil analisis untuk arah kebijakan ketiga SIDa dengan adanya 11 indikator padal pilar SIDa, maka dihasilkan tabel structural self-interaction matrix 3 (SSIM) pada berikut.

bappeda litbang

Tabel 4.27 *Structural self-interaction matrix* 3

Indikator i	Indikator j											
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		V	A	V	V	A	V	A	A	V	V
	2	V		A	X	V	A	X	A	A	A	X
	3	A	A		V	V	V	V	O	A	V	V
	4	V	X	V		V	V	V	O	A	A	X
	5	V	V	V	V		V	V	O	A	A	X
	6	A	A	V	V	V		V	V	V	V	V
	7	V	X	V	V	V	V		A	O	A	V
	8	A	A	O	O	O	V	A		A	V	V
	9	A	A	A	A	A	V	O	A		V	V
	10	V	A	V	A	A	V	A	V	V		V
	11	V	X	V	X	X	V	V	V	V	V	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:
„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j
„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j
„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu
„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

bappelitbangda

Dari hasil tabel Structural self-interaction matrix 3 kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0. Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel Reachability matrix 3 (RM), sebagai berikut.

Tabel D.28 ***Reachability Matrix*** **3**

		Indikator J										
Indikator i	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	4	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
	5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
	6	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	8	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	9	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
	10	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	11	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1

Tabel D.29 *Final Reachability Matrix* 3

		Indikator j											
Indikator i	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Driver Power
	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	8
	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	6
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	7	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	5
	8	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8

perpustakaan

	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	10	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	7
	11	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	6
	Dependece	7	11	3	11	11	9	11	6	5	8	11	

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 3 diatas telah memenuhi aturan *Transitivity,* maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan *level partitions* nya.

Tabel D.30 *Level Partition* 3 (*iteration* 1)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
1	1,2,4,5,6,7,10,11	1,3,4,5,6,8,9	1,4,5,6	
2	2,4,5,6,7,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	2,4,5,6,7	I
3	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	3,6,9	3,6,9	
4	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11	I
5	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11	I
6	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1,2,3,4,5,6,9,10,11	1,2,3,4,5,6,9,10,11	
7	2,4,5,7,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	2,4,5,7,11	I
8	1,2,4,5,7,8,10,11	3,4,5,6,8,9	4,5,8	
9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	3,4,5,6,9	3,4,5,6,9	
10	2,4,5,6,7,10,11	1,3,4,5,6,8,9,10	4,5,6,10	
11	2,4,5,6,7,11	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	2,4,5,6,7,11	I

Tabel D.31 *Level Partition* 3 (*iteration* 2)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
1	1,6,10	1,3,6,8,9,10	1,6,10	II
3	1,3,6,8,9,10	3,6,9	3,6,9	
6	1,3,6,8,9,10	1,3,6,9,10	1,3,6,9,10	
8	1,8,10	3,6,8,9	8	
9	1,3,6,8,9,10	3,6,9	3,6,9	
10	6, 10	1,3,6,8,9,10	6, 10	II

bappelitbangda

Tabel D.32 *Level Partition* 3 (*iteration* 3)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3,6,8,9	3,6,9	3,6,9	
6	3,6,8,9	3,6,9	3,6,9	
8	8	3,6,8,9	8	III
9	3,6,8,9	3,6,9	3,6,9	

Tabel D.33 *Level Partition* 3 (*iteration* 4)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
3	3,6,9	3,6,9	3,6,9	IV
6	3,6,9	3,6,9	3,6,9	IV
9	3,6,9	3,6,9	3,6,9	IV

Dari hasil *level partition 3* pada arah kebijakan ketiga, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

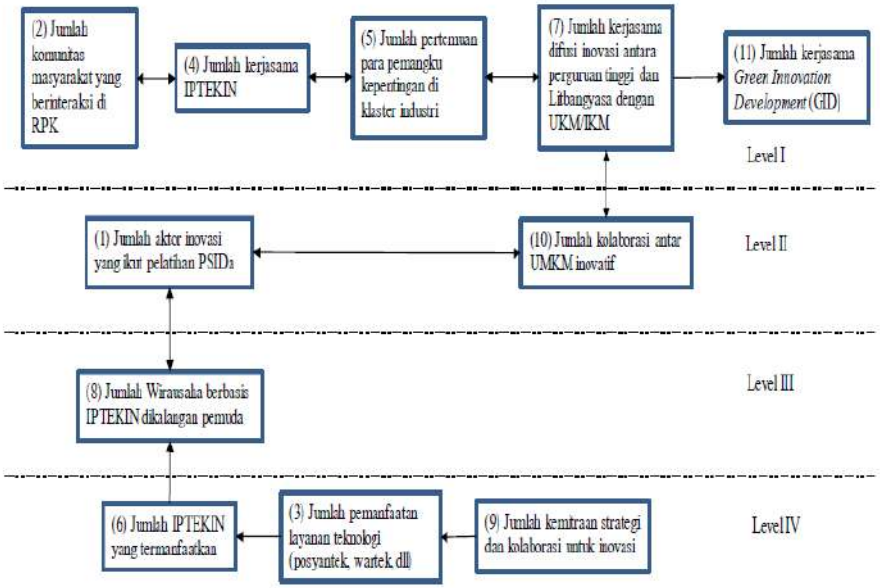
Tabel D.34 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Mengembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi

No	Indikator	*Rank Vector*
1	Jumlah aktor inovasi yang ikut pelatihan PSIDa	2
2	Jumlah komunitas masyarakat yang berinteraksi di RPK	1
3	Jumlah pemanfaatan layanan teknologi (posyantek, wartek, dll)	4
4	Jumlah kerjasama IPTEKIN	1
5	Jumlah pertemuan para pemangku kepentingan di klaster industri	1
6	Jumlah IPTEKIN yang termanfaatkan	4
7	Jumlah kerjasama difusi inovasi antara perguruan tinggi dan Litbangyasa dengan UKM/IKM	1

balitbangda

8	Jumlah Wirausaha berbasis IPTEKIN dikalangan pemuda	3
9	Jumlah kemitraan strategi dan kolaborasi untuk inovasi	4
10	Jumlah kolaborasi antar UMKM inovatif	2
11	Jumlah kerjasama *Green Innovation Development* (GID)	1

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan ketiga sistem inovasi daerah yaitu Penumbuhkembangan Kolaborasi Bagi Inovasi, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut.



Gambar D.4 Alur Kebijakan Penumbuhkembangan Kolaborasi Bagi Inovasi

❖ **MENDORONG TERCIPTANYA INOVASI DAERAH**

Arah kebijakan keempat dalam sistem inovasi daerah yaitu mendorong inovasi daerah, dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi diharapkan dapat mencipkatak kondisi pertumbuhan inovasi yang produktif yang dapat mengakomodir arahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel D.35 Indikator Upaya Mendorong terciptanya

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativisat-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Jumlah apresiasi inovasi terhadap pelaku inovasi
	2. Jumlah relawan inovasi
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Jumlah Publikasi dan sosialisasi budaya inovasi
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	1. Jumlah sosialisasi budaya berjejaring
	2. Jumlah komunitas informasi masyarakat (KIM) sesuai standar pelayanan minimum (SPM) KOMINFO
4. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah Kurikulum Teknoprener
	2. Jumlah program tekno-camp
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah komunitas *Green Innovation Development* (GID)
	2. Jumlah penerapan GID dalam kurikulum pendidikan
	3. Jumlah aprisiasi terhadap kegiatan GID

Berikut hasil analisis ISM untuk menarik keterkaitan antar indikator dan urgensinya terhadap perencanaan di Kabupaen Bandung Barat.

bappelitbangda

Tabel D.36 *Structural self-interaction matrix* 4

Indikator i	Indikator j										
	Indikator	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	1		V	V	A	A	O	V	A	A	A
	2	V		V	V	O	A	A	A	X	A
	3	V	V		V	A	O	A	A	A	A
	4	A	V	V		O	A	O	X	X	O
	5	A	O	A	V		O	V	X	O	V
	6	O	A	O	A	O		V	O	V	A
	7	V	A	A	O	V	V		A	V	A
	8	A	A	A	X	X	O	A		X	O
	9	A	X	A	X	O	V	V	X		O
	10	A	A	A	O	V	A	A	O	O	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:
„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j
„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j
„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu
„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

Dari hasil tabel Structural self-interaction matrix 4 kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0.

Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel Reachability matrix 1 (RM), seperti tampak pada table berikut.

bappelitbangda

Tabel D.37 *Reachability Matrix* 4

Indikator i \ Indikator j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
5	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
8	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
9	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0
10	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

Tabel D.38 *Final Reachability Matrix* 4

Indikator i \ Indikator j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Driver Power
1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6
2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	6
3	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	5
4	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8
7	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	7
8	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
9	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
10	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
Dependece	10	8	9	10	4	3	8	8	10	3	

bapelitbangda

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 3 diatas telah memenuhi aturan *Transitivity,* maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan *level partitions* nya.

Tabel D.39 *Level Partition* 4 (*iteration* 1)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,2,3,4,7,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,7,9	I
2	1,2,3,4,8,9	1,2,5,6,7,8,9,10	1,2,8,9	
3	1,3,4,8,9	1,2,3,5,6,7,8,9,10	1,3,8,9	
4	1,4,5,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,4,5,7,8,9	I
5	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	4,5,8,9	4,5,8,9	
6	1,2,3,4,6,7,8,9	5,6,10	5,6,10	
7	1,2,3,4,7,8,9	1,4,5,6,7,8,9,10	1,4,7,8,9	
8	1,2,3,4,5,7,8,9,10	2,3,4,5,6,7,8,9	2,3,4,5,7,8,9,10	
9	1,2,3,4,5,7,8,9	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,5,7,8,9	I
10	1,2,3,4,6,7,9,10	5,8,10	10	

Tabel D.40 *Level Partition* 4 (*iteration* 2)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
2	2,3,8	2,5,6,7,8,10	2,8	
3	3,8	2,3,5,6,7,8,10	3,8	II
5	2,3,5,6,7,8,10	5,8	5,8	
6	2,3,6,7,8	5,6,10	6	
7	2,3,7,8	5,6,7,8,10	7,8	
8	2,3,5,7,8,10	2,3,5,6,7,8	2,3,5,7,8	
10	2,3,6,7,10	5,8,10	10	

bappeltbangda

Tabel D.41 *Level Partition* 4 (*iteration* 3)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
2	2,8	2,5,6,7,8,10	2,8	III
5	2,5,6,7,8,10	5,8	5,8	
6	2,6,7,8	5,6,10	6	
7	2,7,8	5,6,7,8,10	7,8	
8	2,5,7,8,10	2,5,6,7,8	2,5,6,7,8	
10	2,6,7,10	5,8,10	10	

Tabel D.42 *Level Partition* 4 (*iteration* 4)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
5	5,6,7,8,10	5,8	5,8	
6	6,7,8	5,6,10	6	
7	7,8	5,6,7,8,10	7,8	IV
8	5,7,8,10	5,6,7,8	5,7,8	
10	6,7,10	5,8,10	10	

Tabel D.43 *Level Partition* 4 (*iteration* 5)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
5	5,6,8,10	5,8	5,8	
6	6,8	5,6,8	6,8	V
8	5,8,10	5,6,8	5,8	
10	6,1	5,8,10	10	

bappeltpangda

Tabel D.44 *Level Partition* 4 (*iteration* 6)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
5	5,8,10	5,8	5,8	
8	5,8,10	5,8	5,8	
10	10	5,8,10	10	VI

Tabel 4. 45 *Level Partition* 4 (*iteration* 7)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
5	5,8,10	5,8	5,8	VII
8	5,8,10	5,8	5,8	VII

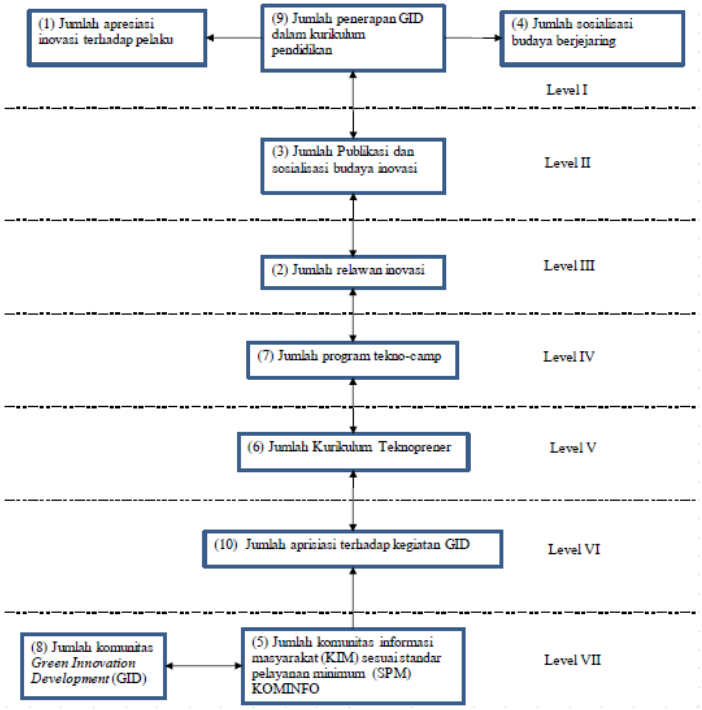
Dari hasil *level partition 4* pada arah kebijakan keempat, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

Tabel D.46 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Mendorong Inovasi Daerah

No	Indikator	*Rank Vector*
1	Jumlah apresiasi inovasi terhadap pelaku inovasi	1
2	Jumlah relawan inovasi	3
3	Jumlah Publikasi dan sosialisasi budaya inovasi	2
4	Jumlah sosialisasi budaya berjejaring	1
5	Jumlah komunitas informasi masyarakat (KIM) sesuai standar pelayanan minimum (SPM) KOMINFO	7
6	Jumlah Kurikulum Teknoprener	5
7	Jumlah program tekno-camp	4
8	Jumlah komunitas *Green Innovation Development* (GID)	7
9	Jumlah penerapan GID dalam kurikulum pendidikan	1
10	Jumlah aprisiasi terhadap kegiatan GID	6

bappeda-banggai

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan keempat sistem inovasi daerah yaitu Mendorong Inovasi Daerah, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut.



Gambar D.5 Alur Kebijakan Mendorong Terciptanya Inovasi Daerah

bappeda

❖ **MEMBANGUN JEJARING KERJASAMA ANTAR DAERAH**

Arah kebijakan kelima dalam sistem inovasi daerah yaitu memperkuat jaringan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pusat. Tujuan utama dari agenda ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi yang sejalan serta saling melengkapi serta memperkuat rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di seluruh wilayah Tanah Air.

Tabel D.47 Indikator Upaya Mambangun Jejaring Terciptanya Inovasi Daerah

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativisat-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Jumlah kerjasama antar daerah sekitar yang sinkron dengan IPTEKIN
	2. Jumlah kerjasama antar daerah dengan pusat daerah yang sinkron dengan IPTEKIN
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster 3. industri unggulan daerah	1. Jumlah diversivikasi dan nilai tambah produk
4. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi	1. Jumlah kerjasama antar daerah
	2. Jumlah program pusat ke daerah
5. Mendorong perkembangan usaha- usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri
6. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah kebijakan daerah dalam *Green Innovation Development* (GID)

Berikut hasil analisis ISM untuk menarik keterkaitan antar indikator dan urgensinya terhadap perencanaan di Kabupaen Bandung Barat.

bappelitbangda

Tabel D.48 *Structural self-interaction matrix* 5

Indikator i	Indikator j							
	Indikator	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	1		O	V	V	O	V	V
	2	O		V	O	V	V	V
	3	V	V		A	A	X	O
	4	V	O	A		O	V	V
	5	O	V	A	O		V	V
	6	V	V	X	V	V		X
	7	V	V	O	V	V	X	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:
„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j
„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j
„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu
„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

Dari hasil tabel Structural self-interaction matrix 5 kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0.

Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel Reachability matrix 1 (RM), seperti tampak pada table berikut.

Tabel D.49 *Reachability Matrix* 5

Indikator	Indikator j							
	Indikator	1	2	3	4	5	6	7
	1	1	0	1	1	0	1	1
	2	0	1	1	0	1	1	1
	3	0	0	1	0	0	1	0

bapelitbangda

	4	0	0	1	1	0	1	1
	5	0	0	1	0	1	1	1
	6	0	0	1	0	0	1	1
	7	0	0	0	0	0	1	1

Tabel D.50 *Final Reachability Matrix* 5

Indikator	1	2	3	4	5	6	7	Driver Power
1	1	0	1	1	0	1	1	5
2	0	1	1	0	1	1	1	5
3	0	0	1	0	0	1	1	3
4	0	0	1	1	0	1	1	4
5	0	0	1	0	1	1	1	4
6	0	0	1	0	0	1	1	3
7	0	0	1	0	0	1	1	3
Dependece	1	1	7	2	2	7	7	

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 3 diatas telah memenuhi aturan *Transitivity,* maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan *level partitions* nya.

Tabel D.51 *Level Partition* 5 (*iteration* 1)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,3,4,6,7	1	1	
2	2,3,5,6,7	1	1	
3	1,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,6,7	I
4	3,4,6,7	1,4	4	
5	3,5,6,7	2,5	5	
6	3,6,7	1,2,3,4,5,6,7	3,6,7	I
7	3,6,7	1,2,3,4,5,6,7	3,6,7	I

bappelitbangda

Tabel D.52 *Level Partition* 5 (*iteration* 2)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,4	1	1	
2	2,5	2	2	
4	4	4	4	II
5	5	5	5	II

Tabel D.53 *Level Partition* 5 (*iteration* 3)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1	1	1	III
2	2	2	2	III

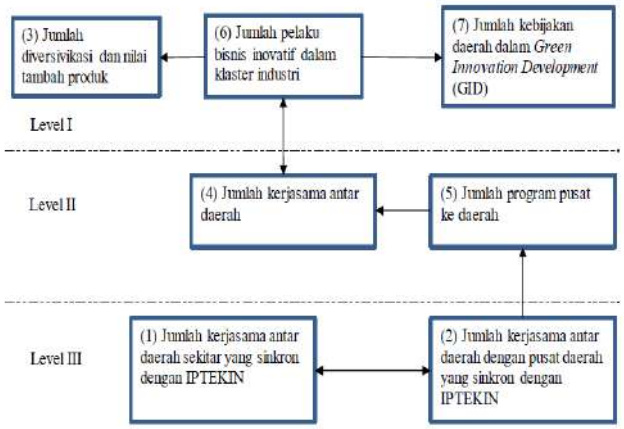
Dari hasil *level partition 4* pada arah kebijakan keempat, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

Tabel D.54 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Membangun Kerjasama Antar Daerah

No	Indikator	*Rank Vector*
1	Jumlah kerjasama antar daerah sekitar yang sinkron dengan IPTEKIN	3
2	Jumlah kerjasama antar daerah dengan pusat daerah yang sinkron dengan IPTEKIN	3
3	Jumlah diversivikasi dan nilai tambah produk	1
4	Jumlah kerjasama antar daerah	2
5	Jumlah program pusat ke daerah	2
6	Jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri	1
7	Jumlah kebijakan daerah dalam *Green Innovation Development* (GID)	1

bappelitbangda

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan kelima sistem inovasi daerah yaitu Membangun Jejaring Kerjasama Antar Daerah, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut.



Gambar D.6 Alur Kebijakan Mendorong Jejaring Kerjasama Antar Daerah

- **PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL**

  Arah kebijakan keenam dalam sistem inovasi daerah yaitu melakukan penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu HKI (Hak Karya Intelektual) dan lingkungan. Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan di tingkat nasional maupun daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan daerah.

bappeltbangda

Tabel D.55 Indikator Upaya Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Pilar SIDa	Indikator
1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativisat-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah	1. Cakupan penaganan permasalahan AMDAL
	2. Jumlah HKI (Hak Karya Intelektual)
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah	1. Jumlah klaster industri yang berwawasan lingkungan
	2. Jumlah produk klaster industri yang berstandar internasional
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengemban gan jaringan inovasi	1. Jumlah penerapan standar Internasional
	2. Jumlah pertemuan internasional
	3. Jumlah sosialisasi HKI
4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	1. Jumlah produk inovatif yang berkualitas, ramah lingkungan dan bersertifikasi.
	2. Jumlah kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan	1. Jumlah kerjasama internasional dalam *Green Innovation Development* (GID)

bappeltanaga

Berikut hasil analisis ISM untuk menarik keterkaitan antar indikator dan urgensinya terhadap perencanaan di Kabupaen Bandung Barat.

Tabel D.56 *Structural self-interaction matrix* 6

Indikator i \ Indikator j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		A	A	V	V	O	O	V	O	V
2	A		A	V	V	A	V	O	O	X
3	A	A		A	A	V	O	V	O	A
4	V	V	A		A	O	A	A	A	V
5	V	V	A	A		A	O	A	A	A
6	O	A	V	O	A		V	V	O	V
7	O	V	O	A	O	V		A	V	V
8	V	O	V	A	A	V	A		O	O
9	O	O	A	A	A	O	V	O		O
10	V	X	O	V	A	V	V	O	O	

Untuk menunjukan hubungan antara indikator sebagai i dan j, dengan ketentuan sebagai berikut:
„V" – indikator i memicu/mencapai indikator j
„A" – indikator i dipicu/dicapai dengan indikator j
„X" – indiktor i dan indikator j saling memicu/membantu
„O" – indikator i dan indikator j tidak berhubungan

Dari hasil tabel Structural self-interaction matrix 6 kemudian dilakukan langkah pembentukan tabel matrik binari, dari masukan tabel SSIM berupa V, A, X dan O akan dikonversi menjadi bilangan 1 dan 0.

Dengan aturan hubungan relasi (i, j) dan (j, i) yang dimasukan kedalam tabel Reachability matrix 1 (RM), seperti tampak pada table berikut.

bappelitbangda

Tabel D.57 *Reachability Matrix* 6

		Indikator j									
Indikator i	**Indikator**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
	3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	6	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1
	7	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
	8	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	9	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1

Tabel D.58 *Final Reachability Matrix* 6

Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**Driver Power**
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6
2	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	7
3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8
5	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	5
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	7
8	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	8
9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
10	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	7
Dependece	9	8	10	9	10	5	6	6	4	9	

perpustakaan

Pada Tabel *Final Reachability Matrix* 1 diatas telah memenuhi aturan Transitivity, maka pada tahapan berikutnya adalah ditentukan level partitions nya.

Tabel D.59 *Level Partition* 6 (*iteration* 1)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
1	1,2,3,4,5,10	1,2,3,4,5,6,8,9,10	1,2,3,4,5,10	I
2	1,2,3,4,5,7,10	1,2,3,4,6,7,9,10	1,2,3,4,7,10	
3	1,2,3,4,5,6,7,8,10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,2,3,4,5,6,7,8,10	I
4	1,2,3,4,5,6,8,10	1,2,3,4,6,7,8,9,10	1,2,3,4,6,8,10	
5	1,3,5,6,8	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1,3,5,6,8	I
6	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	3,4,5,6	3,4,5,6	
7	2,3,4,5,7,9,10	2,3,6,7,8,10	2,3,7,10	
8	1,3,4,5,7,8,9,10	3,4,5,6,8,9	3,4,5,8,9	
9	1,2,3,4,5,6,8,9,10	6,7,8,9	6,8,9	
10	1,2,3,4,5,7,10	1,2,3,4,6,7,8,9,10	1,2,3,4,7,10	

Tabel D.60 *Level Partition* 6 (*iteration* 2)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
2	2,4,7,10	2,4,6,7,9,10	2,4,7,10	II
4	2,4,6,8,10	2,4,6,7,8,9,10	2,4,6,8,10	II
6	2,4,6,7,8,9,10	4,6	4,6	
7	2,4,7,9,10	2,6,7,8,10	2,7,10	
8	4,7,8,9,10	4,6,8,9	4,8,9	
9	2,4,6,8,9,10	6,7,8,9	6,8,9	
10	2,4,7,10	2,4,6,7,8,9,10	2,4,7,10	

Tabel D.61 *Level Partition* 6 (*iteration* 3)

Indikator	*Reachability Set*	*Antecendent Set*	*Intersections Set*	Level
6	6,7,8,9,10	6,9	6,9	
7	7,9,10	6,7,8,10	7, 10	

bappeltbangda

8	7,8,9,10	6,8,9	8,9	
9	6,8,9,10	6,7,8,9	6,8,9	
10	7, 10	6,7,8,9,10	7, 10	III

Tabel D.62 *Level Partition* 6 (*iteration* 4)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
6	6,7,8,9	6,9	6,9	
7	7,9	6,7,8	7	
8	7,8,9	6,8,9	8,9	
9	6,8,9	6,7,8,9	6,8,9	IV

Tabel D.63 *Level Partition* 6 (*iteration* 5)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
6	6,7,8	6	6	
7	7	6,7,8	7	V
8	7,8	6,8	8	

Tabel D.64 *Level Partition* 6 (*iteration* 6)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
6	6,8	6	6	
8	8	6,8	8	VI

Tabel D.65 *Level Partition* 6 (*iteration* 7)

Indikator	***Reachability Set***	***Antecendent Set***	***Intersections Set***	Level
6	6	6	6	VII

bappelitbangda

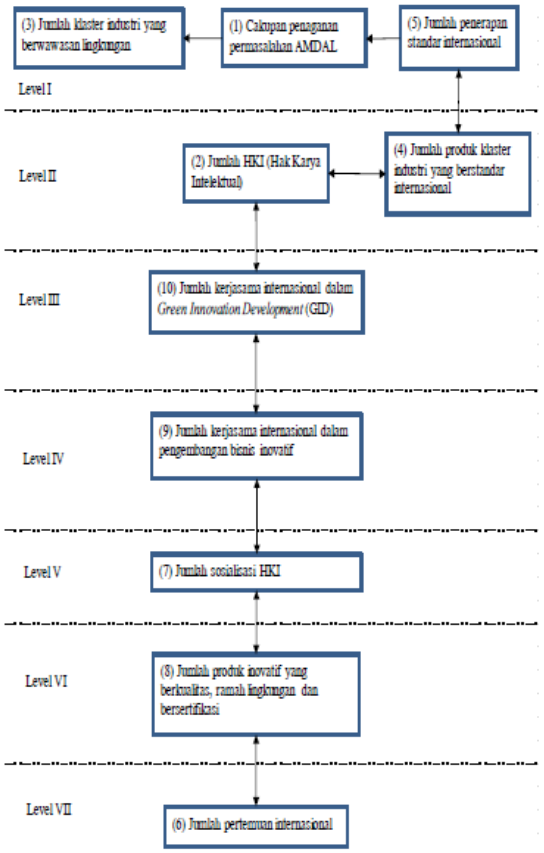
Dari hasil *level partition 3* pada arah kebijakan pertama, memberikan hasil tingkatan pada masing – masing indikator yang ada pada setiap level nya. Tabel *rank vector* memberikan gambaran dari tingkatan indikator tersebut.

Tabel D.66 Rank Vector Untuk Arah Kebijakan Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

No	Indikator	*Rank Vector*
1	Cakupan penaganan permasalahan AMDAL	1
2	Jumlah HKI (Hak Karya Intelektual)	2
3	Jumlah klaster industri yang berwawasan lingkungan	1
4	Jumlah produk klaster industri yang berstandar internasional	2
5	Jumlah penerapan standar internasional	1
6	Jumlah pertemuan internasional	7
7	Jumlah sosialisasi HKI	5
8	Jumlah produk inovatif yang berkualitas, ramah lingkungan dan bersertifikasi	6
9	Jumlah kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis Inovatif	4
10	Jumlah kerjasama internasional dalam *Green Innovation Development* (GID)	3

Berdasarkan hasil analisa ISM pada arah kebijakan kelima sistem inovasi daerah yaitu Penyelarasan Dengan Perkembangan Global, digambarkan dalam struktural model ISM berdasarkan hierarki seperti pada gambar berikut.

bappeltbangda



Gambar 4.7 Alur Kebijakan Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

bappeda.jogja

2. INDIKATOR TUJUAN UTAMA PENGUATAN SIDA

Dari analisis model ISM diatas pada masing-masing arah kebijakan sistem inovasi daerah di Kabupaten Bandung Barat dilakukan penentuan hirarki teratas dari enam arah kebijakan SIDa yang menjadi indicator tujuan utama penguatan sistem inovasi daerah.

Dari arah kebijakan pertama SIDa penataan dan pengembangan kerangka umum SIDa, indikator tujuan yang terbentuk dari model ISM adalah adanya landasan legal bagi pengembangan Klaster Agroindustri. Arah kebijakan kedua SIDa penguatan kelembagaan dan daya IPTEKIN, indikator tujuan utamanya adalah jumlah forum yang menangani Green Innovation Development (GID). Arah kebijakan ketiga SIDa penumbuh kembangan kolaborasi bagi inovasi, indikator tujuan utamanya adalah jumlah komunitas masyarakat yang berinteraksi di Ruang Publik Kreatif (RPK).

Arah kebijakan keempat SIDa pendorong inovasi daerah, indikator tujuan utamanya adalah penerapan GID pada kurikulum pendidikan. Arah kebijakan kelima SIDa jejaring kerja sama antar daerah, indikator tujuan utamanya adalah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri. Arah kebijakan keenam SIDa penyelarasan dengan perkembangan global, indikator tujuan utamanya adalah klaster industri yang berwawasan lingkungan.

Tabel D.67 Tujuan Utama Penguatan SIDa

No	Tujuan Utama Penguatan SIDa
1	Landasan legal bagi pengembangan Klaster Industri
2	Jumlah forum yang menangani *Green Innovation Development* (GID)
3	Komunitas masyarakat yang berinteraksi di Ruang Publik Kreatif (RPK)
4	Penerapan *Green Inovation Development* (GID) pada kurikulum pendidikan
5	Pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri
6	Klaster industri yang berwawasan lingkungan

bappeda bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
(BAPPELITBANGDA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

E. STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. PENANGULANGAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Tema Sistem Inovasi Daerah yang diusulkan dalam kajian ini adalah *green innovation* yang dapat diartikan sebagai sistem yang penciptaan produk, layanan, maupun sistem baru yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga pencapaian pembangunan tidak melupakan aspek lingkungannya, adapun sektor yang menjadi prioritas yaitu sektor industri berbasis pertanian, sektor perdagangan yang mengoptimalkan UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Sistem inovasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Berikut inovasi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Tabel E.1 Strategi Inovasi Dalam Upayan Penanggulangan Permasalahan

Masalah	Strategi Inovasi
1. Permasalahan Aspek Perekonomian	
Sektor industri pengolahan dan agroindustri	
- Kualitas tenaga kerja yang kurang sesuai dengan kebutuhan	- Pengadaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri - Menghimpun jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal untuk mengadakan on job training dan pelatihan - Reorientasi pertanian bagi generasi milenial
- Pencemaran lingkungan	- Membuat pengelolaan limbah terpadu - Sosialisasi konsep 3R pada sampah yang berdaya guna - Aglomerasi sektor industry agar penggunaan sarana dapat terpadu dan optimal
- Belum ada hilirisasi hasil produk pertanian	- Pemberdayaan masyarakat dan produk lokal berbasis pertanian - Menstimulus penggunaan teknologi dalam pengelolaan hasil pertanian - Inovasi bidang pengembangan agroindustri (teknologi produksi pangan, pengolahan, dan distribusi)
Sektor Industri Pariwisata	
- Pengelolaan yang kurang baik	- Pengadaan pelatihan pengelolan wisata - Kolaborasi pertanian dan pariwisata melalui program eduwisata pertanian dan festival budaya dan pertanian (Sasapian pasca panen, atau pada saat festival pembangunan) - Pengembangan wisata budaya melalui objek wisata tematik
- Akses menuju lokasi wisata yang kurang baik	- Perencanaan jaringan transportasi berbasis tempat wisata - Mengembangkan industri pariwisata berbasis *meeting industry*

bappeliranga

Masalah	Strategi Inovasi
- Falisitas penunjang (fasum dan fasos) yang masih kurang baik	- Merubah format pengembangan ekonomi wilayah berupa industrialisasi sektor pertanian dan pariwisata - Memprioritaskan pengembangan wilayah di daerah tertinggal dengan menggunakan konsep aglomerasi dan kutub pertumbuhan (growth pole) di KBB
Sektor Pertanian	
- Kurangnya SDM yang berkualitas serta	- Reorientasi pertanian bagi generasi milenial - Pelatihan dan pendampingan terhadap petani - Meningkatkan sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan.
- pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk dan lainnya) kurang lancar;	- Penyediaan input sektor pertanian yang ramah lingkungan dan mengoptimalkan untur organik - Mengadakan pelatihan terhadap petani
- kualitas pengolahan pasca panen masih rendah;	- Penggunaan teknologi dalam pengelolaan pascapanen - Adanya sistem distribusi pasca panen yang terinegrasi - Optimasi koperasi pertanian
Sektor Perdagangan dan UMKM	
- Adanya dominasi barang impor;	- Pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM - Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam produksi barang dengan ciri khas lokal
- Promosi produk industri lokal masih dirasa kurang;	- Mengadakan pelatihan terbimbing dalam pemasaran produk lokal - Penggunaan teknologi informasi untuk promosi produk
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;	- Perbaikan kualitas prasar tradisional - Rebranding pasar tradisional dengan mengadopsi kearifan lokal atau potensi alam setempat
2. Permasalahan Infrastruktur	
- Konektivitas antar kecamatan kurang baik	- Meningkatkan akses keterjangkauan wilayah (infrastruktur) - Inovasi transportasi yang dapat

bappeltoaliga

Masalah	Strategi Inovasi
	menyiasati kesulitan geografis.
- Sarana prasarana transportasi kurang memadai	- Menyediakan sarana transportasi bagi masyarakat kepusat layanan publik dan fasilitas publik lainnya - Perencanaan pengadaan sarana prasarana prasarana berbasis transit (TOD)
3. Permasalahan Pelayanan Umum	
- Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah	- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat hingga jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. - Meningkatkan pelatihan, ketrampilan, dan kecakapan hidup
- Distribusi sarana dan prasarana pendidikan belum merata	- Memperkuat kelembagaan pendidikan non formal dalam penyelenggaraan pendidikan - Mengoptimalkan SKB sebagai media belajar berbasis masyarakat
- Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas	- Penambahan sarana prasarana dan tenaga medis - Mengembangkan layanan darurat dan cepat tanggap - Memperkuat upaya preventif berupa edukasi kesehatan dan (sosialisasi PHBS dan pelatihan dan ketrampilan penanganan medis dasar)
4. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
- Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan	- Pembangunan Desa Terpadu yang dapat bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri - Optimasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) - Optimasi pemanfaatan potensi desa dalam mendorong program *One Village One Product* (OVOP)
- Lemahnya pengelola profil desa	Pengadakan Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Belum optimalnya pemahanan dan pemanfaatan teknologi informasi	Pengadaan pelatihan kepada masyarakat desa terkait penggunaa teknologi Penyediaan sarana teknologi yang berbasis di desa

bappeda bandung

Masalah	Strategi Inovasi
5. Permasalahan Aspek Lingkungan	
Tingginya arus alih fungsi lahan yang mengancam kawasan lindung dan kawasan pertanian serta meningkatkan potensi *run-off water* yang tinggi	- Konsistensi penerapan RTRW dan penyediaan RDTR untuk menjaga terpeliharanya wilayah konservasi - Inovasi pertanian yang dapat mensiasati keterbatasan lahan - Inovasi/rekayasa bangunan ramah lingkungan - Inovasi sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan
Pencemaran lingkungan berupa limbah industri maupun limbah padat (sampah)	- Merancang kebijakan kompensasi dampak lingkungan yang diberlakukan kepada swasta - Pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk mengelola sampah melalui bank sampah - Kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan/ pemanfaatan sampah (program zero waste) - Perancangan Sistem Pengelola Limbah Domestik Terpusat
Peningkatan kebutuhan sumber air baku	- Penyediaan dan pengelolaan air secara terpadu - Inovasi teknologi pengolahan air bersih (misalnya *rainwater membran distillation*)
Potensi rawan bencana yang tinggi seperti potensi gempa sesar lembang dan longsor alih fungsi lahan	- Kebijakan yg diperuntukan kepada swasta dan masyarakat mengenai rekayasa bangunan yang dapat mengantisipasi bencana alam - Edukasi mitigasi bencana kepada swasta dan masyarakat
Adanya wabah Covid-19	- Penerapan protocol kesehatan
6. Permasalahan Aspek Sosial dan Kependudukan	
IPM Kabupaten Bandung Barat yang cukup rendah	- Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat hingga jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. - Meningkatkan pelatihan, ketrampilan, dan kecakapan hidup
Pertumbuhan penduduk yang tinggi	- Inovasi desain perumahan untuk

bappelitbangda

Masalah	Strategi Inovasi
	mengantisipasi kepadatan penduduk - Inovasi pelayanan dengan penggunaan teknologi
Presentase pemiskinan masyarakat yang tinggi	- Menggalakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program wirausaha - Menciptakan iklim usaha yang baik bagi industri ekonomi rakyat - Memfasilitasi UMKM untuk bekerjasama dengan sektor swasta. Setiap investor/industri besar wajib bekerjasama/ memiliki rekanan dengan UMKM - Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan masyarakat

bappelitbangda

2. ARAHAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

❖ ARAHAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kemudian dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang mungkin dapat dilakukan dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat, adapun arahan Penguatan SIDa antara lain sebagai berikut:

- Arah kebijakan inovasi penataan dan pengembangan kerangka umum sistem inovasi daerah dilakukan melalui Pengembangan basis data (indikator penting) inovasi dan bisnis; Pengembangan regulasi yang kondusif; Besaran investasi bidang Iptekin; Perbaikan pelayanan publik; Pengadaan pemerintah yang pro bisnis inovatif; Pengembangan infrastruktur dasar inovasi dan bisnis dan Pemberian insentif untuk penerapan inovasi dan bisnis.
- Arahan kebijakan inovasi memperkuat kelembagaan palaksana sistem inovasi daerah dapat dilakukan melalui membentuk pusat inovator dan bisnis didalamnya terdapat forum inovasi yang merupakan pusat klaster industri dan tempat pertemuan pelaku inovasi yang menangani *Green Innovation Depelopment* (GID) maupun pelaku inovasi.
- Arahan Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi dapat dilakukan dengan optimasi kemitraan strategis pemanfaatan layanan teknologi dan IPTEKIN yang dapat menstimulus jumlah wirausaha bebasis IPTEKIN dan UMKM yang menerapkan inovasi; kerjasama lembaga pendidikan dan penelitian dengan UMKM yang dapat meningkatkan aktor yang berperan pelaksanaan *Green Innovation Develoment* (GID)
- Arahan Mendorong Terciptanya Inovasi Daerah dapat dilakukan dengan optimasi pelaksanaan *Green Innovation Develoment* (GID) melalui komunitas yang menerapkan kurikulum teknoprener; apresiasi terhadap inovasi serta penerapan *Green Innovation Develoment* (GID) dalam kurikulum pendidikan
- Arahan Membangun Jejaring Kerjasama Antar Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri; adanya kebijakan daerah yang mendukung *Green Innovation Develoment* (GID) yang dapat mendatangkan kerjasama dengan stakeholder di daerah baik secara vertical maupun horizontal
- Arahan Penyelarasan Dengan Perkembangan Global dapat dilaksanakan dengan peningkatan penerapan standar internasional yang mendukung industri berwawasan lingkungan; meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan inovasi dan dapat meningkatkan produk inovatis berkualitas yang ramah lingkungan dan bersertifikasi.

Selain itu terdapat pula arahan dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Barat, berikut adalah arahan penanggulangan permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung Barat:

- Arah kebijakan inovasi peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang tercermin dari kemudahan masyarakat mengakses pusat-pusat pelayanan, meningkatnya kualitas dan standar kelayakan infrastruktur, transportasi, dan jaringan teknologi komunikasi.
- Arah kebijakan inovasi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang sasaran berorientasi pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berpengetahuan, cerdas, kreatif, dan terampil dengan sasaran meningkatnya kompetensi dan daya saing masyarakat daerah, yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi pendidikan (terutama jenjang pendidikan menengah atas/setara),

bappeltbandung

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dan penguatan kelembagaan pendidikan formal maupun non formal.

- Arah kebijakan inovasi bidang pelayanan dasar kesehatan yang dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (penyiapan sarana prasarana, tenaga medis, dan layanan tanggap darurat), peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk menjaga kesehatan secara mandiri melalui pendidikan penanganan medis dasar bagi masyarakat.
- Arah kebijakan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi daerah sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah serta mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis kearifan lokal, kreativitas dan ramah lingkungan.
- Arah kebijakan inovasi pemeliharaan kualitas lingkungan dan antisipasi dampak bencana alam melalui edukasi lingkungan dan mitigasi bencana, ketaatan terhadap regulasi konservasi lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.
- Arah kebijakan inovasi bidang pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa yang sasaran berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan kualitas, daya saing ketenagakerjaan agar terserap di pasar kerja dengan penghasilan yang layak, serta menggiatkan usaha ekonomi mandiri melalui kegiatan wirausaha, UMKM, dan pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

❖ STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Berdasarkan hirarki model ISM yang terbentuk pada bab sebelumnya, memiliki enam level / tahapan dalam mencapai tujuan utamanya. Dalam proses penyusunannya hirarki tujuan utamanya berada pada level pertama yang didorong oleh level kedua dan seterusnya. Berikut merupakan strategi penguatan SIDa Kabupaten Bandung Barat.

1. Landasan legal bagi pengembangan Klaster Industri

Level pertama dari hierarki arahan Penataan dan Pengembangan Kerangka Umum Sistem Inovasi Daerah ini menyatakan bahwa perlunya landasan legal bagi pengembangan industry. Dengan demikian pelaksanaan sistem inovasi daerah dapat memiliki kepastian hukum dalam implementasinya dan dapat diselaraskan dengan kebijakan kebijakan lainnya. Berikut adalah analisa dari data yang ada saat ini serta rekomendasi terbentuknya kerangka umum sistem inovasi daerah.

bappelitbangda

Tabel E.2 Strategi landasan legal bagi terbentuknya klaster industri

Landasan legal bagi terbentuknya klaster industri
Sumber daya : Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian meuprkan sektor yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian wilayah di Kabupaten Bandung Barat serta memiliki daya saing yang baik. Jika diperinci kembali dari keempat sektor yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung Barat yaitu sektor agroindustri, sektor UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata memiliki dampak yang langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Lingkungan : Hal itu didukung pula dengan fisik lingkungan Kabupaten Bandung Barat dengan potensi pariwisata yang tinggi dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi pula serta pertumbuhan penduduk yang tinggi yang sangat berpotensi menjadi pasar ataupun tenaga kerja dalam pengoptimalkan keempat sektor tersebut. Sehingga sangat diperlukan perencanaan dan aspek legal yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada.
Knowledge Storage Base **Kelembagaan :** Dalam hal ini dinas terkait yaitu Bapedalitbangda berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun dan merencanakan landasan legal terkait pengembangan sektor agroindustri, sektor UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata. **Kebijakan :** Dukungan kebijakan diperlukan sebagai legalitas optimasi percepatan pengembangan sektor agroindustry, sektor UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata, dengan adanya legalitas tersebut maka akan berdampak pada penambahan jumlah basis data inovasi, legalitas perizinan, rencana pengapilkasian GID serta anggaran.
Aplikasi Inovasi : Penyusunan rencana induk yang menjadi pedoman dalam peningkatan laju pertumbuhan sektor agroindustri, sektor UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata perlu dilakukan sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berimplikasi pada membaiknya iklim invertasi pada sektor tersebut. Yang kemudian menjadi efek pengganda pada aspek lainnya seperti lapangan usaha dan tergeraknya sektor lainnya.

bappelitbangda

2. Jumlah forum yang menangani *Green Innovation Development*

Dalam upaya memperkuat kelembagaan palaksana sistem inovasi daerah jumlah forum yang menangani GID merupakan satu hal yang penting, dengan kompleksitas forum yang konsen dalam penanganan inovasi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas inovasi yang dihasilkan. Berikut strategi optimalisasi forum yang menangani SID.

Tabel E.3 Strategi Peningkatan Jumlah Forum Yang Menangani GID

Optimalisasi forum yang menangani GID
Sumber daya : Banyaknya jumlah pelaku bisnis di KBB serta perusahaan dapat menjadi peluang banyaknya forum yang menerapkan SID dalam kegiatan perekonomiannya, hal tersebut didukung pula tersedianya kelembagaan hingga tingkat kecamatan yang menerapkan inovasi.
Lingkungan : Berkembangnya sektor ekonomi pariwisata dan pertanian di tingkat desa yang ditunjang jaringan internet yang mendukung pengembangan sektor ekonomi dengan teknologi yang menghasilkan produksi yang lebih efisien. Masyarakat usia produktif perlu dilibatkan dalam forum terkait GID dengan didampingi dan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan ekonom yang berkelanjutan. **Infrastruktur :** Forum GID perlu dibangun dan ditata struktur organisasinya dengan melibatkan aparatur daerah, akademisi, praktisi dan para pelaku bisnis.
Knowledge Storage Base **Kelembagaan :** Perlu adanya pemberdayaan kelembagaan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan inovasi dapat memicu peningkatan sektor ekonomi serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim ekonomi. Dengan kompleksnya forum yang menangani GID maka pengembangannya akan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas **Kebijakan :** Penggunaan teknologi dan perekonomian yang mempertimbangkan aspek lingkungan selaras dengan fungsi Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara yang merupakan Kawasan Konservasi. **Aset tak berwujud :** Aliran pengetahaun dengan dimensi aliansi industri, interaksi antara industri-universitas, interaksi industri-pemerintah, difusi teknologi, mobilitas personal dan subsistem institusi. Nilai-nilai tersebut wajib untuk dimunculkan oleh semua anggota tim koordinasi, karena hal tersebut tidak nampak tetapi efek yang ditimbulkan sangat berdampak terhadap keberlangsungan tujuan.
Aplikasi Inovasi : Menciptakan iklim yang bersahabat dalam terbentuknya forum yang menangani GID dengan pendampingan dari instansi terkait sehingga forum tersebut dapat terselenggara dengan baik. Dibentuk sebuah keterkaitan jaringan dan interaksi dimana adanya permintaan akan inovasi yang dapat diakses, diadopsi, dimanfaatkan dan dikembangkan dengan mudah karena adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dari segi penyedia pengetahuan dan inovasi terus melakukan penciptaan dan pengembangan melalui para ahli serta pendanaan yang kuat akan penelitian oleh pemerintah daerah. Difusi dan penyerapan inovasi teknologi yang baik diharapkan dimiliki oleh para wirausaha dengan dukungan modal dan keinginan yang kuat.

bappeda kbb

3. Komunitas masyarakat yang berinteraksi di Ruang Publik Kreatif

Dalam upaya Menumbuhkembangkan Kolaborasi Bagi Inovasi yang berbasis pada masyarakat perlu dilakukan, dengan demikian perekonomian masyarakat dapat terdampak secara langsung. Berikut strategi optimalisasi forum SID.

Tabel E.4 Strategi Peningkatan Komunitas Masyarakat yang Berinteraksi di RPK

Komunitas Masyarakat Yang berinteraksi di RPK
Sumber daya : Jumlah masyarakat dengan jenis pekerjaan wirausaha yang cukup tinggi sehingga interaksi di ruang publik kreatif sangat diperlukan untuk saling bertukar inovasi hal tersebut ditunjang tersedianya kelembagaan yang siap melaksanakan penguatan inovasi.
Lingkungan : Berkembangnya sektor ekonomi pariwisata dan pertanian di tingkat desa yang ditunjang jaringan internet yang mendukung pengembangan sektor ekonomi dengan teknologi yang menghasilkan produksi yang lebih efisien. Masyarakat usia produktif perlu dilibatkan dalam forum terkait GID dengan didampingi dan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan ekonomi yang berkelanjutan.
Knowledge Storage Base **Kelembagaan :** Perlu adanya pemberdayaan kelembagaan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan inovasi dapat memicu peningkatan sektor ekonomi serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim ekonomi. Dengan kompleksnya forum yang menangani GID maka pengembangannya akan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas **Kebijakan :** Penggunaan teknologi dan perekonomian yang mempertimbangkan aspek lingkungan selaras dengan fungsi Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara yang merupakan Kawasan Konservasi. Kemampuan individu untuk mampu membentuk kelompok, sebagai pengembangan populasi daerah yang kuat serta mampu menciptakan persaingan daerah kepada persaingan secara global. Maka penguatan SIDa tidak cukup hanya dibentuk menjadi tim dan kelompok kerja, tetapi peraturan secara tertulis mengenai kewajiban tim berdiskusi dan belajar bersama langsung dengan masyarakat.
Aplikasi Inovasi : Menciptakan iklim yang bersahabat dalam terbentuknya forum yang menangani GID dengan pendampingan dari instansi terkait sehingga forum tersebut dapat terselenggara dengan baik.

bappeliangda

4. Penerapan *Green Inovation Development* (GID) pada kurikulum pendidikan

Dalam upaya Mendorong Terciptanya Inovasi Daerah malalui institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana inovasi, berikut strategi penerapan Green Inovation Development (GID) pada kurikulum pendidikan.

Tabel E.5 Penerapan GID Dalam Kurikulum Pendidikan

Penerapan GID Dalam Kurikulum Pendidikan
Sumber daya : Kapastis SMA, SMK daerah secara kuantitas sudah cukup memenuhi kategori untuk melakukan riset daerah, maka perlu dikembangkan dari segi kualitasnya. Dengan masuknya GID dalam kurikulum sekolahnya maka nilai pembangunan berkelanjutan dapat ditanamkan sejak dini. Selain itu sektor pendidikan informal perlu pula mengadopsi konsep tersebut.
Lingkungan : Penguatan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan teknoprener dalam sistem inovasi meliputi komponen yang berhubungan dengan penguatan regulasi, kecerdasan intelektual dari SDM, kegiatan kolaborasi sekolah dengan UMKM serta pembiayaan daerah untuk kegiatan bisnis teknologi.
Knowledge Storage Base **Kelembagaan :** Perlu adanya pemberdayaan kelembagaan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan inovasi dapat memicu peningkatan sektor ekonomi serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim ekonomi. Dengan kompleksnya forum yang menangani GID maka pengembangannya akan lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat luas **Kebijakan :** Penggunaan teknologi dan perekonomian yang mempertimbangkan aspek lingkungan selaras dengan fungsi Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung Utara yang merupakan Kawasan Konservasi. Kelembagaan yang meliputi hukum, peraturan dan perlindungan hak harus dijalankan dengan baik, karena hal tersebut mampu memberikan pengukuran yang jelas untuk peningkatan HKI (Hak Karya Intelektual) dan Paten daerah. **Infrastruktur :** Tingkatkan kemampuan badan penelitian daerah dengan sekolah / universitas, jumlah konsultan dan kantor pusat pelatihan perlu dibangun dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah, tingkat penggunaan teknologi informasi pada rumah tangga juga perlu disosialisasikan sebagai indikator kualitas dan cakupan jaringan komunikasi didaerah.
Aplikasi Inovasi : Dalam strategi ini hal terpenting adalah tingkat kecerdasan dan kreativitas dari SDM di daerah, berdasarkan penelitian yang telah ada tingkat pendidikan dan masyarakat yang mampu bekerja dan berwirausaha berkaitan erat dengan kemampuan teknologi dan pengetahuannya.

bappelitbangda

5. Meningkatkan pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri

Dalam upaya Membangun Jejaring Kerjasama Antar Daerah perlu peningkatan pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri, berikut strategi peningkatan peran serta pelaku bisnis dalam klaster industri.

Tabel E.6 Peningkatan Peran Pelaku Bisnis Inovatif Dalam Klaster Industri

Peningkatan Peran Pelaku Bisnis Inovatif
Sumber daya : Jumlah wirausahawan di Kabupaten Bandung Barat yang banyak serta ditunjang perusahaan yang dapat berperan dalam bisnis inovatif.
Lingkungan : Jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi modal penting dalam pengembangan bisnis dalam klaster industry selain itu masih tersedianya lahan untuk pengembangan klaster industry di Kabupaten Bandung Barat.
Knowledge Storage Base **Infrastruktur:** Pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat digunakan sebagai dasar pembangaunan situs-situs atau lokasi prasarana klaster industri. Pembangunan prasarana yang menunjang penguatan sektor ekonomi potensial. **Kebijakan :** Pemberlakuan peraturan terhadap koordinator lembaga klaster olahan kayu, untuk selalu mengupdate dan memberikan informasi kongrit mengenai produk dan jenis olahan kayu yang dihasilkan oleh kewirausahaan klaster tersebut. **Jaringan Modal :** Pemerintah daerah siap dalam penyediaan APBD untuk penelitian, dan mampu menggandeng Bank yang ada di daerah untuk bekerja sama dengan pelaku bisnis inovasi dalam rangka pembiayaan modal usaha.
Aplikasi Inovasi : Pengembangan kebijakan inovasi dalam tim koordinasi perlu dilakukan secara mekanisme, terutama pada penataan lembaga, dokumen strategis penguatan sistem inovasi, program koordinasi terbuka, penyederhanaan secara administratif yang dapat mempengaruhi inovasi di sektor bisnis dan pemerintahan..

bappeltbangda

6. Klaster industri yang berwawasan lingkungan

Dalam upaya Penyelarasan Dengan Perkembangan Global yang berorientasi pada lingkungan dapat dilakukan dengan pembangunan klaster industri berwawasan lingkungan, berikut strategi peningkatan klaster industri yang berwawasan lingkungan.

Tabel E.7 Peningkatan Peran Pelaku Bisnis Inovatif Dalam Klaster Industri

Klaster industri yang berwawasan lingkungan
Sumber daya : Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Bandung Barat sehingga sangat potensial untuk dikembangkan, pererapan industry berbasis lingkungan sejalan dengan kebikajan yang menetapkan Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan konservasi.
Lingkungan : Kompetensi ekonomitingkat industri dengan dimensi seleksi strategi, kemampuan koordinasi pada organisasi, kemampuan teknikal dan fungsional, dan kemampuan adaptif atau belajar. Faktor-faktor kompetensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelaku bisnis inovati klaster industri.
Knowledge Storage Base **Kebijakan :** Pengembangan regulasi yang dapat mendukung pengembangan kewirausahaan harus diciptakan. Kebijakan perlindungan kekayaan intelektual harus dibuat dan dikembangkan serta adanya reward untuk memicu masyarakat menjadi lebih peka terhadap keinovasian wirausaha berbasis teknologi. **Infrastruktur :** Ruang Inkubator inovasi perlu dibangun dan ditata struktur organisasinya yang melibatkan aparatur daerah, akademisi, praktisi dan para pelaku bisnis.
Aplikasi Inovasi : Optimasi klaster industri yang berwawasan lingkungan perlu dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat mengingat kontribusi sektor ini yang dominan yang juga ditunjang kebijakan Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan konservasi.

bappelitbangda

3. STRATEGI OPTIMALISASI ASPEK PEREKONOMIAN

❖ SEKTOR ARGOINDUSTRI

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya pengembangan agroindustry, program tersebut antara lain :

1. Program yang berkaitan dengan aspek produksi khususnya perlunya memperhatikan ketersediaan produk pertanian yang dipakai sebagai bahan baku, baik dalam kuantitasnya, kualitasnya maupun kontinuitasnya. Secara kuantitas, bahan baku harus tersedia secara cukup setiap saat manakala bahan baku tersebut diperlukan. Ini tidak mudah karena produk pertanian yang dipakai sebagai bahan baku tersebut adalah bersifat musiman. Dilihat dari sisi kualitas, maka bahan baku seyogyanya harus tersedia secara tepat. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan berakibat pada menurunnya kualitas produk agroindustri yang kemudian secara kuantitas, maka bahan baku harus tersedia secara kontinyu sepanjang tahun, karena proses produksi terus berjalan tidak peduli apakah saat itu musim hujan atau musim kemarau. Untuk itu ketersediaan bahan baku ini harus diperhatikan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
2. Program yang berkaitan dengan aspek konsumsi khususnya bersamaan dengan berkembangnya dinamika permintaan pasar, baik pasar individu atau rumah tangga ataupun pasar institusi, baik pasar yang ada di dalam negeri maupun pasar luar negeri. Proposisi ini menjadi penting bersamaan dengan perubahan yang besar pada preferensi konsumen terhadap produk- produk agroindustri.
3. Program yang berkaitan dengan aspek distribusi khususnya bersamaan dengan berkembangnya dinamika para pesaing (*competitors*) perusahaan agroindustri yang menyalurkan produksi sampai ke tangan konsumen, baik konsumen yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Proposisi ini menjadi penting karena seringnya ditemukan berdirinya perusahaan agroindustri yang kurang memperhatikan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, sehingga dengan demikian perusahaan tersebut kurang dapat berkembang seperti yang diharapkan.
4. Program yang berkaitan dengan kondisi internal perusahaan. Program ini berkaitan dengan kondisi kualitas dan sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan, khususnya dalam bidang kemampuan manajerialnya. Faktor ini juga berkaitan dengan perlunya memperhatikan dampak dari perubahan global khususnya pengaruh informasi dan teknologi yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada masa depan perusahaan agroindustri tersebut.

❖ SEKTOR PERTANIAN

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya pengembangan pertanian, program tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian melalui revitaslisasi penyuluh, pendamping dan pelatihan pertanian; permberdayaan pemuda; penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani dan pengembangan kelembagaan petani.
2. Memperluas basis produksi secara berkelanjutan melalui pelibatan investasi swasta atau bank dalam permodalan; penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan serta pembentukan klaster pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian; pengembangan keuangan perdesaan san pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran.

pappelitbangda

4. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna optimasi pemanfaatan seumberdaya berdasarkan spesifikasi lokasi; pengembangan produk yang berdaya saing; penyelarasan dan integrase dengan penguasaan IPTEK pertanian dan perluasan jejaring diseminasi dan penjaringan umpan balik inovasi pertanian.

❖ **SEKTOR UMKM**

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya pengembangan UMKM, program tersebut antara lain :

1. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
2. Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan, prasarana mendasar akan sangat membantu adalah sarana perhubungan.
3. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
4. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervesi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*).
5. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

❖ **SEKTOR PARIWISATA**

Terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan dalam upaya pengembangan UMKM, program tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dengan konsep market driven atau berorientasi pasar serta dapat mengoptimalkan keunggulan suatu destinasi wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan.
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata dengan mendasarkan pada analisis pasar secara kontinyu atau berkelanjutan.
3. Meningkatkan citra Kabupaten Bandung Barat sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan pendekatan *service quality oriented* (SQO) atau pendekatan berbasis kualitas layanan.
4. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dengan menggunakan konsep pengembangan berorientasi, efektifitas dan efisiensi.

4. STRATEGI OPTIMASI INFRASTRUKTUR

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya optimasi infrastruktur, program tersebut antara lain :

a. Membangun kerjasama MoU dengan perguruan tinggi mengenai inovasi teknologi infrastruktur yang sesuai dengan karakter geografis KBB.
b. Memanfaatkan SDA untuk menghasilkan energi terbarukan
c. Pelestarian lingkungan dan inovasi teknologi penyediaan sumber air baku (*rainwater membrane distillation*).
d. Menerapkan nilai-nilai kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan.

5. STRATEGI OPTIMALISASI PELAYANAN UMUM

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya optimasi pelayanan umum, program tersebut antara lain

bappelitbangda

:

a. Melanjutkan program yang sudah ada disertai peningkatan upaya kesehatan yang bersifat promotif-preventif dengan cara melakukan inovasi penyuluhan, sosialisasi, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat mengenai kesehatan keluarga, kualitas gizi, dan kemampuan penanganan medis dasar (pertolongan pertama). Kemampuan penanganan medis dasar bersifat wajib dimiliki masyarakat agar berguna dalam menghadapi masalah kesehatan sehari-hari.
b. Program pelayanan tanggap darurat untuk membantu masyarakat miskin dan tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis. Misalnya melakukan layanan darurat call dan kegiatan patroli kesehatan.
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berorientasi life skill, melalui program Masyarakat KBB maju, pintar, dan berdaya saing. Program yang dapat dilaksanakan diantaranya pelayanan pendidikan non formal berbasis masyarakat; kurikulum pendidikan vokasional dan pelatihan masyarakat yang terintegrasi dengan kebutuhan peningkatan ekonomi daerah sektor industri, pertanian, dan pariwisata; Membangun jaringan kolaborasi dengan dunia usaha mengenai kompetensi tenaga kerja yang diperlukan dalam rangka penyaluran ketenagakerjaan terampil ke dunia usaha serta penyesuaian pengajaran dengan wabah Covid-19.
d. Pengembangan sistem pemerintahan yang bersih dan aspiratif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, dengan tujuan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepuasan pelayanan publik. Program yang dapat dilaksanakan diantaranya pelaksanaan inovasi e-presensi untuk memperkuat kedisiplinan pegawai; membuat inovasi yang mampu menilai kinerja aparatur yang terintegrasi dengan sistem pengembangan karir; melanjutkan inovasi pelayanan publik *online* seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perijinan, pelayanan pajak, dan lainnya; inovasi administrasi perkantoran berbasis online (*e-office*), melalui *e- office* yang mendukung tindak lanjut kegiatan, surat menyurat, dan disposisi lebih cepat sehingga komunikasi dan koordinasi antar SKPD maupun dalam SKPD terlaksana lebih cepat, efektif dan efisien serta peningkatan budaya inovasi di tiap-tiap perangkat daerah melalui perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan Bupati KBB untuk menghasilkan minimal 1 usulan inovasi per perangkat daerah per tahun dan pemberian anugrah pegawai inovatif daerah.

6. STRATEGI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya optimasi permberdayaan masyarakat desa, program tersebut antara lain :

a. Melakukan pusat kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis *homebased entreprise.* Kegiatan ekonomi yang dilakukan menunjang pada peningkatan sektor unggulan yakni industri kreatif, industri pertanian, maupun pariwisata.
b. Inovasi pembangunan ekonomi melalui pembentukan lembaga dana swadaya masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial, dimana semua masyarakat berkesempatan memiliki saham yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.
c. Peningkatan peran masyarakat dan pemuda dalam mengembangkan BUMDes.
d. Membuat forum pusat kegiatan ekonomi masyarakat

bappelitbang.kbb.go.id

berbasis daring yang berisikan konsultasi, diskusi, informasi, fasilitasi pemasaran dan jaringan ekonomi dan pelaku usaha.

7. STRATEGI OPTIMALISASI LINGKUNGAN HIDUP

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya optimasi permberdayaan masyarakat desa, program tersebut antara lain :

a. Pembenahan penggunaan lahan sehingga dapat meminimalisir alih fungsi lahan;
b. Pengolahan limbah berbasis teknologi;
c. Penrencanaan penanggulangan bencana daerah yang responsive dan berbasis masyarakat;
d. Penanggulangan pandemic Covid-19 yang terintegrasi dengan sektor lainnya.

8. STRATEGI OPTIMALISASI KEPENDUDUKAN

Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dalam upaya optimasi permberdayaan masyarakat desa, program tersebut antara lain :

a. Memperkuat penggunaan sistem yang sudah ada dengan cara menyambungkan berbagai aplikasi layanan yang digunakan perangkat daerah lain dengan memanfaatkan sistem data base utama (one big data PMKS) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah yang berkepentingan.
b. Layanan "*one big data* PMKS" tersebut bukan hanya sekedar kumpulan data melainkan juga tersambung dengan pimpinan dalam hal pengambilan kebijakan dan layanan tanggap darurat bagi PMKS.
c. Menggiatkan kembali dasawisma dan membuat forum dasawisma berbasis online, sebagai forum konsultasi, diskusi permasalahan yang dihadapi, informasi, dan pembaharuan data keluarga dan masyarakat.
d. Membuat aplikasi laporan warga, yang isinya melaporkan pemuktahiran data penduduk/warga, tindakan penyimpangan administratif pengurus/pengelola warga dan tindakan indisipliner (RT/RW, pemerintah desa), serta laporan kegiatan warga yang terindikasi melakukan penyimpangan norma-norma (sosial, agama, dan hukum). Aplikasi laporan warga juga sebagai saranan penyampaian aspirasi yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
e. Dalau upaya pengarusutamaan gender perlu ada program untuk menjadikan perempuan sebagai duta lingkungan maupun duta ketahanan keluarga di tingkat kewilayahan dan berperan langsung dalam pelestarian dan menjaga kesehatan lingkungan, misalnya sebagai pengelola bank sampah (*duta zero waste villages*), penggerak tanaman obat keluarga, community farming, dan lain-lain. Membuat Rumah Ketrampilan Terpadu yang tujuannya memberikan ketrampilan bagi kaum perempuan di desa, seperti ketrampilan menjahit, memasak, membuat hantaran, tata rias, menganyam, dan lain-lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan keluarga.

9. PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Fokus dan program prioritas penguatan SIDa Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang telah disusun di atas, dapat dilihat pada table berikut.

bappeltbangda

Tabel E.8 Fokus Prioritas Penguatan SIDa

Fokus	Program Prioritas	Tujuan	Kegiatan Pencapaian
Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Pembentukan landasan legal bagi pembentukan klaster industri sektor Agroindustri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata.	Mengoptimalkan sektor potensial untuk memicu pertumbuhan perekonomian	• Pemuatan SIDa dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Bandung Barat • Penyusunan *masterplan* pengembangan sektor Agroindustri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata sebagai arahan pengembangan sektor potensial di Kabupaten Bandung Barat • Pembentukan forum yang konsen terhadap implementasi *Green Innovation Development* (GID) • Pembangunan Ruang Publik Kreatif untuk mengoptimalkan penerapan inovasi berbasis masyarakat • Menerapkan *Green Innovation Development* (GID) dalam kurikulum pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal • Menstimulus pelaku bisnis untuk berinovasi melalui bantuan pemodalan serta pelatihan dan pendampingan • Merencanakan klaster sektor Agroindustri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata yang teraglomerasi dan terintegrasi
	Pembentukan forum yang menangani *Green Innovation Development*	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan *Green Innovation Development*	
	Komunitas masyarakat yang berinteraksi di Ruang Publik Kreatif	Menumbuhkan inovasi yang berbasis masyarakat sehingga dampak pembangunan menyentuh langsung masyarakat	
	Penerapan *Green Inovation Development* (GID) pada kurikulum pendidikan	Mendorong terciptanya inovasi daerah yang berbasis *Green Inovation Development* yang produktif	
	Meningkatkan pelaku bisnis inovatif dalam klaster industri	Mengintegrasikan bisnis dengan inovasi terutama terhadap pengembangan klaster industri potensial di Kabupaten Bandung Barat	
	Klaster industri yang berwawasan lingkungan	Mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan	
Meningkatkan sektor ekonomi potensial	Peningkatan sektor agroindustri	Optimalisasi sektor agroindustri sebagai sektor ekonomi potensial	• Membuat sistem penyediaan bahan baku yang terintegrasi • Optimasi koprasi bagi pelaku usaha agroindustri • Pendampingan pemasaran produksi agroindustri • Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku agroindustri
	Peningkatan sektor	Optimalisasi sektor pertanian	• Pelatihan dan pendampingan bagi petani terutama bagi petani

bappeltbandung

Fokus	Program Prioritas	Tujuan	Kegiatan Pencapaian
	pertanian	sebagai sektor ekonomi potensial	muda • Mempertahankan pertanian sebagai basis melalui insentif bagi petani dan bantuan akses permodalan • Penyediaan sarana dan prasarana pertanian • Pendampingan dalam penggunaan teknologi bagi petani
	Peningkatan sektor UMKM	Optimalisasi sektor UMKM sebagai sektor ekonomi potensial	• Peningkatan kapasitas pengembangan UMKM terkait akses modal, penggunaan teknologi dan manajerial • Pendampingan penggunaan teknologi dalam upaya pemasaran • Mengintegrasikan UMKM yang ditunjang database yang terbarukan • Pendampingan pengembangan UMKM • Melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan UMKM
	Peningkatan sektor pariwisata	Optimalisasi sektor pariwisata sebagai sektor ekonomi potensial	• Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata • Mengembangkan pemasaran pariwisata dengan mengoptimalkan teknologi diantaranya dengan optimasi media sosial, web situs wisata dan media lainnya seperti iklan visual dan iklan cetak • Membenahi sarana dan prasarana destinasi wisata terutama akses jalan • Menerapkan protocol kesehatan pada sektor pariwisata
Meningkatkan aktivitas antar wilayah	Penanganan penyediaan prasarana jalan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	• Pelibatan perguruan tinggi dalam menemukan inovasi teknologi infrastruktur • Perencanaan infrastruktur jalan berbasis transit (TOD) untuk menunjang aksesibilitas dan kawasan wisata
	Penanganan penyediaan prasarana air	Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan air bersih	• Penerapan teknologi penyediaan air baku (*rainwater membrane distillation*) yang dapat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang merupakan

bappelitbangda

Fokus	Program Prioritas	Tujuan	Kegiatan Pencapaian
			proyek strategis nsional dalam RPJMN • Perencanaan penyediaan air bersih yang terintegrasi
Meningkatkan kepuasan terhadap palayanan umum	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Bandung Barat	• Menggalakan pelatihan kerja yang menunjang sektor agroindustri, pertanian, UMKM dan pariwisata • Membangun jejaring kolaborasi dengan swasta dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja • Kegiatan belajar berbasis masyarakat berupa PKBM maupun SKB • Penyesuaian pengajaran dengan kondisi wabah Covid-19
	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung Barat	• Penyuluhan kesehatan di tiap desa • Sosialisasi PHBS sebagai tindakan preventif • Pelayanan yang cepat tanggap dengan pengoptimalan petugas kesehatan di tiap desa dan *call center* layanan darurat • Peningkatan kualitas posyandu dan puskesmas di tiap desa
	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Menciptakan SDM pemerintahan yang unggul dan profesional	• Program *e-presensi* • Inovasi penilaian kinerja aparatur yang terintegrasi dengan sistem pengembangan karir • Pelayanan publik berbasis online • Penggunaan teknologi dalam administrasi perkantoran (*e-office*) • Kewajiban perancangan inovasi bagi tiap SKPD
Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat desa	Menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing	• Pembangunan desa terpadu dan desa digital yang dapat dikolaborasikan dengan Kementerian Desa karena merupakan Proyek Prioritas dalam RPJMN • Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional • Pembenahan infrastruktur perdesaan yang dapat dikolaborasikan dengan Kementerian PUPR karena merupakan Proyek Prioritas dalam RPJMN • Pemberdayaan BUMDes di tiap desa

bappelitbangda

Fokus	Program Prioritas	Tujuan	Kegiatan Pencapaian
			• Penggunaan teknologi dapam upaya pemasaran potensi tiap desa • Pemberdayaan Pemuda dan wanita
Lingkungan hidup	Pengurangan alih fungsi lahan	Melindungi fungsi lindung di Kabupaten Bandung Barat	• Penegakan peraturan penataan ruang yang tegas • Pembentukan rencana tata ruang yang terbarukan • Insentif bagi masyarakat yang menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan
	Pengolahan limbah	Menjaga kualitas lingkungan agar tidak tercemar	• Membangun pengolahan limbah terpadu • Koordinasi antar pelaku industry dalam pengolahan limbah • Pengawasan dalam pengolahan limbah
	Siaga bencana	Meminimalisir kerugian jika terjadi bencana	• Penyediaan mitigasi bencana yang terupdate • Pengoptimalisasian Tagana • Respon yang cepat terhadap tenanganan bencana
	Penanganan wabah Covid-19	Meminimalisir penyebaran wabah Covid-19	• Sosialisasi wabah Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi • Tindakan pencegahan yang terintegrasi • Penanganan yang cepat
Peningkatan kualitas SDM	Pengurangan kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	• Pembenahan database PMKS melalui optimasi layanan "*one big data* PMKS" • Mengaktifasi kembali dasawisma dengan penggunaan teknologi • Penggunaan teknologi dalam mengakomodir laporan masyarakat melalui aplikasi laporan warga • Optimasi PKK dalam upaya pengarusutamaan gender dan penggerak ekonomi keluarga

bappelitbangda

10. RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

Penetapan indikator kinerja penguatan SIDa bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian penguatan SIDa. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator output dan outcome program penguatan SIDa per tahun. Penetapan indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan SIDa, dan penilaian pencapaian kondisi inovasi yang diinginkan.

Indikator kinerja penguatan SIDa dapat dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh atau dampak dari satu atau lebih indikator capaian kinerja terhadap capaian indikator kinerja penguatan SIDa secara keseluruhan. Indikator kinerja merupakan hal-hal yang bersifat indikasi-indikasi kinerja atau keberhasilan pencapaian tujuan penguatan SIDa di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penentuan indikator kinerja penguatan SIDa Kabupaten Bandung Barat perlu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya kapasitas kelembagaan dan SDM, cakupan pelayanan, kebutuhan publik, pembiayaan, dukungan regulasi, kualitas dan standar pelayanan, ketersediaan sarana, budaya dan jaringan inovasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dibuatlah kerangka indikator kinerja penguatan SIDa Kabupaten Bandung Barat, pada tabel berikut :

bappelitbangda

Tabel 5.9 Rencana Aksi Penguatan SIDa

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Pemuatan SIDa dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Bandung Barat	- SIDa dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat - Konsep SIDa dapat disinergiskan dengan perencanaan yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat	Bapedalitbangda Dinas PUTR		√			
	Penyusunan masterplan pengembangan sektor Agroindustri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata sebagai arahan pengembangan sektor potensial di Kabupaten Bandung Barat	- Tersusunnya masterplan sektor potensial - Pengembangan sektor potensial melibatkan akademisi - Terkoordinasi seluruh stakeholder terkait pengembangan sektor potensial	Bapedalitbangda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Korepasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan			√		
	Pembentukan forum yang konsen terhadap implementasi *Green Innovation Development (GID)*	- Adanya landasan hukum pengaplikasian *Green Innovation Development (GID)* - Terbentuknya kelembagaan pelaksana *Green Innovation Development (GID)* - Sosialisasi *Green Innovation Development (GID)* ke instansi terkait di lingkungan Kabupaten Bandung Barat	Bapedalitbangda		√			
	Pembangunan Ruang Publik Kreatif untuk mengoptimalkan penerapan inovasi	- Adanya Ruang Publik Kreatif - Adanya pengelola Ruang Publik Kreatif - Sosialisai Ruang Publik Kreatif di masyarakat - Perancangan kegiatan di Ruang Terbuka Kreatif	Bapedalitbangda Dinas PUTR		√			

bappelitbangda

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
	berbasis masyarakat	yang dapat menstimulasi munculnya inovasi						
	Menerapkan *Green Innovation Development* (GID) dalam kurikulum pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal	- Tersosialisasikannya *Green Innovation Development* dalam dunia pendidikan melalui praktisi pendidikan - Diterapkannya *Green Innovation Development* dalam pendidikan formal maupun non formal	Bapedalitbangda Dinas Pendidikan		√			
	Menstimulus pelaku bisnis untuk berinovasi melalui bantuan pemodalan serta pelatihan dan pendampingan	- Diadakannya pelatihan terbimbing bagi pelaku bisnis - Adanya akses terhadap pemodalan - Memberikan bantuan teknis dalam pemasaran bisnis	Bapedalitbangda Dinas Korepasi dan UKM Dinas Ketenagakerjaan	√				
	Merencanakan klaster sektor Agroindustri, Pertanian, UMKM dan Pariwisata yang teraglomerasi dan terintegrasi	- Tersusunnya klaster sektor potensial - Pengembangan sektor potensial melibatkan akademisi - integrasinya pelaku usaha disektor potensial	Bapedalitbangda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Korepasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUTR		√			
Meningkatkan sektor ekonomi potensial	Pelatihan dan pendampingan pelaku sektor ekonomi potensial	- Terselenggaranya pelatihan - Koordinasi dengan swasta untuk mengadakan *on job training* - Terselenggaranya pelatihan pemasaran produk	Dinas Pendidikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		√			

bappelitbangda

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
	(agroindustry, pertanian, UMKM dan pariwisata)	pada sektor potensial - Terselenggarakannya pelatihan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan sektor potensial - Terlaksanakan pendampingan bagi pelaku usaha - Tersedianya akses terhadap permodalan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Korepasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Ketenagakerjaan					
	Optimalisasi koperasi untuk menunjang sektor ekonomi potensial	- Terbentuknya koperasi tiap sektor potensial - Terjalinnya kerjasama koperasi dengan lembaga pendanaan - Terbentuknya sistem kerja koperasi yang mandiri dan dapat menunjang optimasi sektor potensial	Dinas Korepasi dan UKM	√				
	Penyediaan sarana prasarana penunjang aktifitas produksi sektor potensial	- Tersedianya database bahan baku sektor produksi yang terintegrasi dan berbasis teknologi - Penyediaan sarana dan prasarana yang mencangkup pertanian, pariwisata dan industry - Perbaikan jalan akses sektor pariwisata - Peningkatan kualitas destinasi wisata	Dinas PUPR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Korepasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan			√		
	Gerakan Milenial Petani (Gemini)	- Bertambahnya jumlah wirausaha baru - Meningkatnya pemuda yang aktif	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√				
	Penggunaan teknologi	- Tersedianya aplikasi forum wisata	Dinas Komunikasi,		√			

bappelitbanga

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
	berbasis aplikasi	- Tersedianya aplikasi petanian - Pemasaran sektor potensial berjalan lebih luas	Informasi dan Statistik					
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah	Perencanaan infrastruktur jalan berbasis TOD	- Tersedianya rencana TOD di Kabupaten Bandung Barat terutama untuk pengoptimalkan sektor ekonomi potensial - Terintegrasinya angkutan umum dengan pusat kegiatan terutama terkait sektor ekonomi potensial - Penyediaan infrastrur jalan berbasis TOD	Dinas Perhubungan Dinas PUPR					√
	Penerapan teknologi penyediaan air baku (*rainwater membrane distillation*)	- Jerjalinnya koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang merupakan proyek strategis nsional dalam RPJMN - Optimalnya pelaksanaan perlindungan air baku	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup				√	
Peningkatan kualitas pendidikan	Pelatihan berbasis sektor potensial (agroindustry, pertanian, UMKM dan pariwisata)	- Terselenggaranya pelatihan - Terjalinnya kerjasama dengan pelaku industri sektor potensial - Dilibatkannya perguruan tinggi dalam pelatihan	Dinas Pendidikan Dinas Ketenagakerjaan	√				
	Optimasi Pembelajaran berbasis masyarakat	- Aktifnya PKBM dan SKB - Dilibatkannya perguruan tinggi dalam pembelajaran	Dinas Pendidikan	√				
	Pembelajaran di masa pandemic metode hybrid online dan kunjungan guru	- Angka pertisipasi siswa yang tinggi meski aktivitas KBM belum optimal - Tenaga pengajar dapat mengunjungi siswa dengan rutin - Tatap muka terbatas berlangsung dengan optimal	Dinas Pendidikan	√				
Peningkatan kualitas pendidikan	Optimalisasi posyandu yang dilengkapi faskes yang memadai	- Fasilitas kesehatan yang memadai di tiap desa - Tersedianya tenaga kesehatan di tiap desa - Terselenggaranya sosialisasi PHBS - Program pelayanan kontroling kesehatan dapat	Dinas Kesehatan		√			

bappeltbangda

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
		berlangsung rutin						
	Optimasi *Call Center* darurat pelayanan kesehatan	- Tersedianya nomor kontak yang dapat dihubung - Tersedianya petugas kesehatan yang siaga - Tersedianya kendaraan yang siaga serta terintegrasinya dengan instansi yang menyediakan kendaraan darurat - Tersedianya sistem untuk mengetahui fasilitas kesehatan mana yang dapat melakukan penanganan tindak lanjut	Dinas Kesehatan	√				
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Pelayanan berbasis teknologi informasi	- Optimalnya fitur *e-presensi* - Optimalnya fitur *e-office* - Terselenggaranya pelayanan public berbasis online - Setiap SKPD dapat mengusulkan inovasi terkait bidang kerjanya - Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah KBB		√			
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembangunan Desa Terpadu	- Koordinasi dengan Kementerian Desa - Terselenggaranya pelatihan bagi apparat desa - Tersedianya infrastruktur pedesaan yang terintegrasi khususnya penyediaan akses internet, penyediaan air, listrik dan jaringan jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas PUPR Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				√	
	Optimasi BUMDes	- Tersedianya BUMDes ditiap desa - Bidang usaha BUMDes yang berjalan optimal - Kerja sama yang dijalin BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Koperasi dan UMKM		√			
	Pemberdayaan Perempuan	- Kegiatan PKK yang aktif ditiap desa - Adanya pendampingan terkait optimasi PKK - ketrampilan bagi kaum perempuan di desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian		√			

bappeltbangda

Inovasi	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Pelaksanaan				
				1	2	3	4	5
		- meningkatnya jenis pelatihan dan ketrampilan yang dapat memberikan nilai tambah - meningkatnya kesejahteraan keluarga	Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.					
	Pemberdayaan Pemuda	- Adanya karang taruna dan Tagana di tiap desa - Kegiatan karang taruna dan Tagana yang aktif ditiap desa - Adanya pendampingan terkait optimasi PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemuda dan Olahraga BPBD	√				
Pelestarian lingkungan hidup	Pengolahan limbah terpadu	- Terbengunnya sarana pengelolaan limbah terpadu - Jumlah industry yang mengelola limbanya - Pengawasan pengelolaan limbah	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUTR				√	
Pengurangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi	- Terbebahinya database PMKS - Adanya aplikasi laporan warga - Terdapanya pendampingan terhadap masyarakat miskin	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial		√			

bappelitbangda

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kajian ini Kerangka Kebijakan Inovasi/KKI *(Innovation Policy Framework)* merupakan pijakan kolaboratif yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam penguatan sistem inovasi secara sistemik. Adapun KKI tersebut terdiri dari 6 (enam) elemen, yaitu:

1. Mengembangkan iklim/lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek, serta meningkatkan kapasitas absorpsi dunia usaha;
3. Meningkatkan interaksi dan kemitraan iptek & inovasi, serta pelayanan berbasis teknologi/pengetahuan;
4. Mengembangkan budaya inovasi;
5. Meningkatkan keterpaduan/koherensi penguatan sistem inovasi;
6. Meningkatkan penyelarasan dengan dinamika perkembangan global.

Agenda-agenda kebijakan inovasi tersebut diimplementasikan kedalam lima pilar prakarsa inovasi strategis yang terdiri dari:

1. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah,
2. Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah,
3. Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan Inovasi,
4. Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya,
5. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakini sumber energi, air bersih, TIK, transportasi dan lingkungan.

Tema penguatan inovasi daerah kabupaten bandung barat yaitu *green innovation* yang dapat diartikan sebagai sistem yang penciptaan produk, layanan, maupun sistem baru yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga pencapaian pembangunan tidak melupakan aspek lingkungannya, adapun sektor yang menjadi prioritas yaitu sektor industri berbasis pertanian, sektor perdagangan yang mengoptimalkan UMKM, sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Dalam proses pembangunan di Kabupaten Bandung Barat terjadi berbagai permasalahan yang secara garis besat terkait aspek perekonomian, peyalanan umum, permasalahan insfrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, lingkungan dan sosial kependudukan. Dengan adanya sistem inovasi daerah ini dapat mengintegrasikan penanganan permasalahan tersebut serta mengoptimalisasikan sektor-sektor yang menjadi tema inovasi daerah sehingga harapannya dengan adanya Sistem Inovasi Daerah ini Kabupaten Bandung Barat bukan hanya dapat menanggulangi permasalahan pembangunannya namun dapat juga mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya melalui optimasi sektor potensialnya.

bappelitbangda

bappelitbangda